

Dr. Saifuddin Yunus
Dr. Suadi Zainal
Fadli, SP, M.Si



MODAL SOSIAL,

KEMISKINAN

DAN PEMBANGUNAN

Dr. Saifuddin Yunus.
Dr. Suadi Zainal. Fadli, SP, M.Si

MODAL SOSIAL, KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN

Editor:
Dr. Sulaiman Ismail

Diterbitkan Oleh:



CV. SEFA BUMI PERSADA - ACEH
2021

MODAL SOSIAL, KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN

Penulis : **Dr. Saifuddin Yunus.**
Dr. Suadi Zainal. Fadli, SP, M.Si

Hak Cipta © 2021 pada Penulis

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penerbit:

SEFA BUMI PERSADA

Anggota Ikapi Aceh N0.021/DIA/2020

Jl. Malikussaleh No. 3 Bayu Aceh Utara - Lhokseumawe

email: www.sefabumipersada.com

Telp. 085260363550

Cetakan I : September 2021– Lhokseumawe

ISBN: 978-623-6983-34-8

Halaman. 156

Ukuran 16,8 x 23 cm

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan buku ini yang sangat penting ini. Selawat teriring salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad S. A. W beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Ditjen Pendidikan Tinggi, Direktorat Sumber Daya yang telah mendanai penelitian kami hingga selesai. Terima Kasih juga kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh yang banyak membantu dari segi administrasi sehingga penelitian ini dapat selesai. Kami juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Dinas Pertanian kabupaten Aceh Tamiang, Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah serta seluruh informan yang terlibat dalam penelitian ini.

Buku ini merupakan hasil riset, yang dikemas sebagai rujukan untuk mata kuliah yang berkaitan dengan modal sosial. Buku ini sangat cocok digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa, peneliti dan akademisi yang tertarik dengan isu modal sosial. Mengingat peran modal sosial begitu penting dalam penguatan institusi sosial dalam masyarakat, maka tidak heran peran modal sosial sering dikaitkan dengan industri, organisasi, pendidikan bahkan dengan keluarga. Buku ini lebih fokus kepada modal sosial, kemiskinan dan pembagunan. Semoga buku ini dapat menambah referensi dalam bidang ilmu sosial khususnya sosiologi.

Lhokseumawe, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pengertian Kemiskinan.....	3
1.3 Kemiskinan di Aceh	7
1.4 Modal Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi.....	17
1.5 Pembangunan Berkelanjutan	20
 BAB II MODAL SOSIAL DAN DETERMINASINYA	
2.1 Pengertian Modal Sosial.....	26
2.2 Klasifikasi dan Determinan Modal Sosial.....	29
2.3 Kepercayaan (Trust)	34
2.4 Jaringan (Network).....	36
2.5 Norma (Share Value).....	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	42
3.2 Sumber Data	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.4 Analisis Data.....	44
 BAB IV MODAL SOSIAL DAN KEMISKINAN	
4.1 Tingkat Modal Sosial Petani di Aceh	46
4.2 Stok Modal Sosial Petani di Aceh.....	66
4.3 Hubungan Modal Sosial Dengan Kemiskinan	70
4.4 Hubungan Stok Modal Sosial Masyarakat dan Tingkat Kemiskinan	80
4.5 Penyebab Tinggi atau Rendahnya Modal Sosial Dalam Masyarakat.....	84

BAB V MODAL SOSIAL DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	
5.1 Pembangunan dan Pembangunan Pertanian	90
5.2 Modal Sosial dan Pembangunan Pertanian.....	103
5.3 Modal Sosial dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan	111
BAB VI PENGUATAN MODAL SOSIAL DAN MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN	
6.1 Program Pemerintah Untuk Memperkuat Modal Sosial	118
6.2 Dampak Program Pemerintah Terhadap Pengentasan Kemiskinan	130
6.3 Model Pengentasan Kemiskinan	138
DAFTAR PUSTAKA	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus, sejak tahun 2008 hingga 2018 telah menerima dana otonomi khusus Rp 56,67 triliun, namun besar dana tersebut belum optimal dimanfaatkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Laporan Badan Pusat Statistik Aceh jumlah penduduk miskin di Aceh hingga Maret 2018 mencapai 15,97%. Sebagian besarnya adalah petani di pedesaan yang mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama (Okezone, 2018).

Untuk meningkatkan pendapatan mereka, berbagai macam program pemberdayaan telah dilakukan pemerintah. Pada tahun 2018 Pemerintah Aceh bertekad menguatkan sektor pertanian melalui program peningkatan luas tanam, pengamanan dari organisme pengganggu dan perubahan iklim, mendistribusikan pupuk bersubsidi, menyediakan benih unggul, sarana produksi, meningkatkan kemampuan petani, penguatan kelembagaan dan penerapan teknologi (Gatra, 2018). Program-program tersebut dipandang dapat meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi kebanyakan petani masih tetap miskin. Faisal Ridha (Ketua Gerbang Tani Aceh) mengatakan petani Aceh menempati urutan termiskin di Sumatera dan urutan ke empat terburuk di tingkat nasional. Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh per September 2017 hanya 94.18, sementara Lampung 105,97 (Lintas Nasional, 2017).

Hal ini terjadi karena strategi pemberdayaan mengabaikan aspek modal sosial masyarakat sebagai elemen penting bagi pembangunan pertanian. Modal finansial yang memadai dan

teknologi pertanian yang canggih belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh sebab itu, modal sosial mesti dilihat sebagai elemen penting, di samping modal lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh. Modal sosial diyakini oleh banyak pakar berkontribusi positif terhadap keberhasilan pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Ia dapat dimanfaatkan sebagai energi untuk mengatasi kemiskinan, diantaranya melalui peningkatan dan pemanfaatan jejaringan (Amalia, Ayu Diah, 2015). Pemanfaatan modal sosial secara tepat dan terarah pada satu komunitas miskin, dapat mendatangkan keuntungan bagi mereka. Modal sosial *bonding* dan *bridging* komunitas petani dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka (Zuber, Ahmad, Selamat Yulius, Saheb, 2013).

Uraian tersebut menjelaskan bahwa modal sosial merupakan perkara yang urgen dalam setiap pembangunan, di samping modal finansial dan sumber daya alam. Tak terkecuali pembangunan pertanian, diperlukan upaya penguatan modal sosial petani untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Tulisan ini dipandang sangat penting, mengingat selama ini pemberdayaan petani/pembangunan pertanian yang dilakukan pemerintah belum mempertimbangkan modal sosial sebagai masalah dan solusi bagi peningkatan kesejahteraan petani. Seorang analis kebijakan Bappenas, Santoso (2014) menyebutkan bahwa kelemahan pertanian yang harus diperbaiki, yakni; (1) Pengelolaan pasca panen rendah; (2) Infrastruktur kurang; (3) Lahan sempit; (4) Modal tidak mencukupi; (5) Pendidikan rendah; (6) Penguasaan teknologi kurang; (7) Ketrampilan rendah; dan (8) Mental malas.

Buku ini sangat menarik untuk dibaca terutama bagi mahasiswa dan peneliti yang mengkaji tentang modal sosial, karena buku ini berbeda dengan referensi lainnya tentang modal sosial yang hanya menitik beratkan pada peran, fungsi dan pengaruh modal sosial dalam pembangunan. Sementara buku ini lebih

menitikberatkan pada penguatan modal sosial yang digunakan sebagai modal pengentasan kemiskinan, dengan fokus sebagai berikut: Tingkatan modal sosial petani dan tingkat kemiskinan, hubungan modal sosial dengan kemiskinan, penyebab tinggi rendahnya modal sosial petani, kebijakan pemerintah dalam penguatan modal sosial petani, dampak program pemberdayaan terhadap penguatan modal sosial dan pengentasan kemiskinan serta model penguatan modal sosial untuk pengentasan kemiskinan. Data dalam buku ini merupakan hasil penelitian penulis yang dilakukan selama tiga tahun (2019-2021) di Aceh Tamiang, Aceh Tengah dan Pidie Jaya.

1. 2 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menjadi masalah besar pada setiap wilayah. Kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi akibat dari lemahnya daya beli. Kemiskinan juga dapat menimbulkan masalah sosial karena meningkatnya angka kriminalitas, rendahnya tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan walaupun tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, pada bagian ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu terutama yang terkait dengan modal sosial dan pengentasan kemiskinan.

Penelitian pertama mengenai peran modal sosial terhadap kesejahteraan dan kemiskinan rumah tangga di Indonesia dilakukan oleh Grootaert (1999) dengan lokasi penelitian di Jambi, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut menganalisis modal sosial pada tingkat mikro (individual, rumah tangga) dan meso (komunitas). Batasan yang digunakan mencakup asosiasi horizontal dan vertikal. Hasil analisis yaitu peran modal sosial dalam

peningkatan kesejahteraan hampir sama dengan peran modal manusia. Rumah tangga dengan modal sosial tinggi memiliki pengeluaran per kapita lebih tinggi, aset fisik dan tabungan lebih banyak, serta akses terhadap kredit lebih baik.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Fadli (2015) dengan judul “modal sosial dan pendapatan masyarakat”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa modal sosial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kerjasama dan saling percaya sebagai unsur modal sosial memberi peluang masyarakat memperoleh keuntungan secara kolektif. Aktivitas bersama yang dihasilkan dari interaksi sosial yang intensif dapat meningkatkan produktifitas ekonomi. Stok modal sosial berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Modal sosial menjadi penentu percepatan pembangunan ketika modal fisik dan manusia berkurang. Modal sosial mendorong masyarakat untuk melakukan kerjasama (*collective action*) untuk mencapai tujuan bersama.

Kebijakan pemerintah Aceh dalam pemberdayaan ekonomi, khususnya mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik dalam bentuk pemberian bantuan sawit atau modal fisik (Sewa Lahan, Penyediaan bibit, pupuk dan peralatan) telah memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pendapatan petani. Namun demikian sampai saat ini petani belum dapat keluar sepenuhnya dari belenggu kemiskinan (Saifuddin, dkk 2014). Selanjutnya Saifuddin, dkk (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa masalah yang timbul dari program bantuan sawit tersebut diantaranya adalah petani tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama pada masa tanaman sawit belum menghasilkan dan harga sawit rendah. Oleh karena itu, jika masyarakat terutama petani memiliki modal sosial (seperti jaringan dan aksi kolektif petani sawit) yang kuat, maka permasalahan tersebut mungkin tidak akan terjadi.

Kaplale (2012) dalam penelitiannya menjelaskan, bahwa penyebab kemiskinan petani yaitu akibat menurunnya produktifitas usaha tani, sulit memperoleh lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, ketergantungan terhadap alam dan kondisi yang ada, biaya dalam proses ritual adat, serta terbatasnya akses terhadap modal. Kamarni (2012) mengatakan, umumnya masyarakat miskin memiliki karakteristik lemahnya jaringan sosial terhadap antar kelembagaan (*interlinkage institution*) yang ada, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Oleh karena itu perlu model dan strategi pengentasan kemiskinan yang efektif dan efisien.

Huraerah (2013) menjelaskan, strategi pengentasan kemiskinan adalah: *pertama*, program pengentasannya tidak hanya prioritas pada aspek ekonomi, strategi pengentasan kemiskinan hendaknya dapat mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan lain-lain. *Kedua*, strategi peningkatan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*) serta informasi pasar. *Ketiga*, melibatkan masyarakat miskin dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan dalam pemberdayaan. *Keempat*, strategi pemberdayaan (*empowerment*) dilakukan melalui; (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat, dan (3) memberdayakan atau melindungi. Kamarni (2012) mengatakan dalam pengentasan kemiskinan, modal social merupakan komponen penting. Modal sosial dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemampuan masyarakat melalui dimensi yang ada dalam sosial capital, persatuan, budaya/adat istiadat, kepercayaan dan partisipasi.

Penelitian Budhi Cahyono (2014) menyimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan dapat dilakukan

tidak hanya melalui pemberdayaan ekonomi, namun juga melalui penguatan modal sosial, dan community development. Penguatan sosial dapat dilakukan dengan mengembangkan skema-skema penguatan modal sosial, seperti peningkatan fungsi BPD, LKMD, Gapoktan, PKK, BUMDes, dan Koperasi. Penguatan sosial kapital dilakukan dengan memaksimalkan peran Lembaga lembaga sosial dengan memfokuskan pada penguatan aspek kepercayaan, mutual respect, dan mutual benefit, serta memperhatikan faktor budaya dan nilai-nilai yang berlaku. Dimensi inti telaah dari modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat (bangsa) untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama, dimana kerjasama ini diwarnai oleh suatu pola inter-relasi yang imbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat.

Hasil penelitian Purwito Zanuar Rahmadi dan Bambang Santoso (2016) adalah petani sawah berlahan sempit dalam pemenuhan nafkah rumah tangga memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya. Dengan modal sosial, petani mampu menjalankan alternatif pendapatan lain diluar aktifitas bertani, dengan begitu mampu mengurangi kesukaran hidup dalam upaya pemenuhan nafkah rumah tangga.

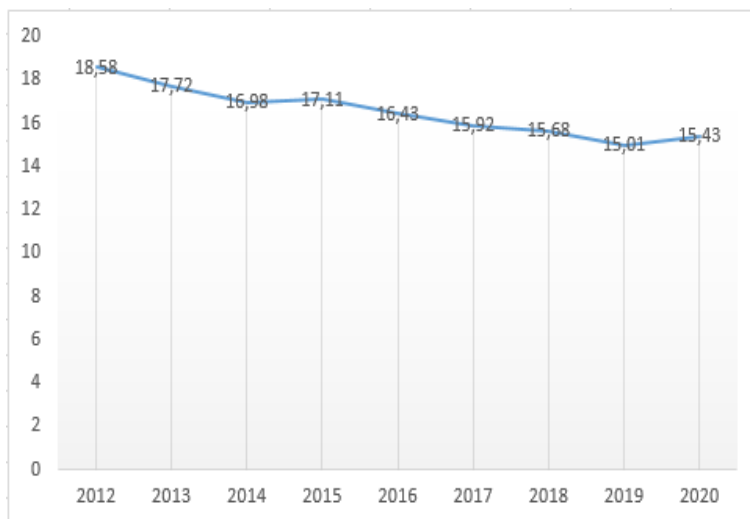
Berbagai alternatif kegiatan yang dilakukan petani dalam upaya pemenuhan nafkah rumah tangga dengan memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya yaitu seperti aktifitas beternak, berhutang, dan gotong royong pengerjaan lahan pertanian. Petani sawah terus menjaga modal-modal yang sekarang dimiliki, terutama modal sosial yang sangat berperan penting, karena modal sosial sebagai jembatan penghubung petani sawah untuk mengakses modal ekonomi yang diperlukan petani untuk pemenuhan nafkah rumah tangga. Modal sosial memiliki peran paling besar dalam strategi untuk menjaga keberlanjutan dari jaringan-jaringan petani di dalam

masyarakat yang membantu dalam pemenuhan nafkah rumah tangganya.

1.3 Kemiskinan di Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, diantaranya gas, minyak bumi, batubara dan lain sebagainya. Namun sumber daya alam yang melimpah tersebut tidak serta merta membuat rakyat di provinsi tersebut keluar dari garis kemiskinan. Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik melalui Aceh Dalam Angka didapati bahwa angka kemiskinan Aceh pada periode 2020 berada pada angka 15,43. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.1: Persentase Kemiskinan Aceh 2012-2020



Sumber: Diolah dari Aceh Dalam Angka

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam sembilan tahun terakhir angka kemiskinan memang mengalami penurunan dari 18,58% pada tahun 2012 turun ke angka 15,43% pada tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 angka kemiskinan di Aceh naik 19 ribu orang (15,43%) atau tertinggi di Sumatera. Bila dilihat persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatera, Aceh menduduki peringkat nomor satu. Kemiskinan Aceh 15,43% lalu diikuti Bengkulu 15,30% dan Sumatera Selatan 12,98%. (Agus Setiadi, 2021).

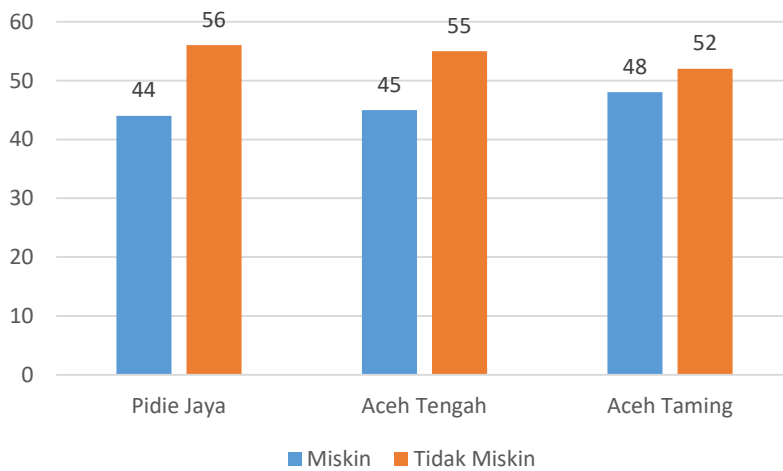
Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kesalahan manajemen anggaran oleh Pemerintah Aceh yang terjadi sejak lama. Hal ini karena bukan pertama kalinya Aceh didaulat menjadi daerah termiskin di Sumatera, meskipun anggaran pembangunannya cukup besar. Ke depan yang perlu diperbaiki adalah kebijakan, perencanaan, dan manajemen anggaran. Saat ini Aceh mempunyai APBA cukup besar ditambah dana otonomi khusus, tapi belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggaran Pemerintah Aceh sebesar Rp 9,384 triliun untuk penanggulangan kemiskinan. Anggaran itu berasal dari APBA Rp 8,058 triliun, APBN Rp 1,285 triliun dan CSR Rp 41 miliar (Zamzami, 2021).

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, T Ahmad Dadok, Aceh masuk daerah pandemic Covid-19, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berbagai kendala yang ditimbulkan. Mulai tidak lancarnya mobilitas ekonomi, sampai dengan dibatasinya aktivitas masyarakat. Penambahan penduduk miskin di Aceh masih di bawah nasional. Persentase penduduk miskin Indonesia per September 2020, jelasnya adalah 10,19% atau naik 0,97 poin dibandingkan September 2019 (9,22%). Sedangkan angka kemiskinan Aceh 15,01% tahun 2020 menjadi 15,43%. Dalam hal ini naik sebesar 0,42%, masih rendah

dibandingkan dengan kenaikan secara nasional yang mencapai 0,93 poin (Muhammad Iqbal, 2021).

Sedangkan persentase keluarga petani miskin dan tidak miskin di tiga Kabupaten yaitu di Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan Pidie Jaya adalah berbeda-beda. Persentase petani yang miskin yang paling tinggi yaitu di Kabupaten Aceh Tamiang dan yang paling rendah adalah di Kabupaten Pidie Jaya. Begitu juga sebaliknya persentase petani yang termasuk dalam katafori tidak miskin yang paling banyak adalah di Kabupaten Pidie Jaya.

Grafik 1.2: Persentase jumlah petani miskin dan tidak miskin di Pidie Jaya, Aceh Tengah dan Aceh Tamiang tahun 2019.



Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat petani yang menetap di wilayah perdesaan sangat tinggi. Semua kabupaten menunjukkan persentase kemiskinan berada di

atas 40 %. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari persentase kemiskinan total provinsi maupun kabupaten. Salah satu cara yang disepakati secara internasional untuk mengukur penghasilan rata-rata penduduk sebuah negara adalah dengan menghitung PDB Per Kapita. Atau jumlah total PDB dalam setahun dibagi jumlah penduduk negara tersebut. PDB adalah singkatan dari Produk Domestik Bruto atau dalam bahasa Inggris disebut *Gross Domestic Product* (GDP). Dalam pemahaman awam, PDB ini ibarat kapasitas produksi sebuah negara, makin tinggi makin makmur negara itu.

Terkait hal tersebut perlu kita melihat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini untuk mengetahui GDP, yaitu berada pada angka Rp 15 ribu triliun, angka ini tentu mengalami kenaikan setiap tahunnya, kecuali ada kondisi crash ekonomi seperti tahun 1998. Jadi kalau ada istilah pertumbuhan ekonomi 5%, itu artinya kapasitas produksi naik 5% dari angka Rp 15 ribu triliun, atau sekitar Rp 750 triliun per tahun. Untuk mendapatkan angka rata-rata penghasilan per penduduk (per kapita) maka angka PDB Rp 15 triliun tersebut dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini.

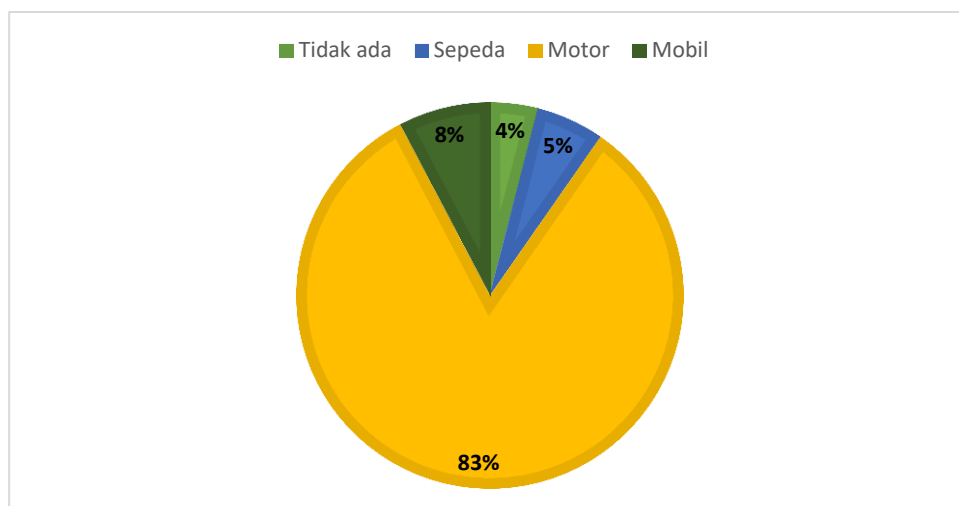
Jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 adalah 265 juta (ranking terbesar 4 dunia, setelah China, India dan Amerika). Indonesia memang negara besar, dengan demikian PDB Perkapita saat ini adalah Rp 15 triliun dibagi 265 juta penduduk = Rp 56 juta setahun, artinya dalam sebulan = Rp 4,6 juta. Jadi rata-rata penghasilan orang Indonesia saat ini adalah 4.6 Juta. Tentu saja itu adalah angka rata-rata. Ada yang penghasilannya jauh di atas angka tersebut namun ada juga yang masih berada dibawahnya, misalnya penghasilan masyarakat di Aceh.

Pemerintah Aceh menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2019 sebesar Rp 2.916.810. Jumlah tersebut naik

sebesar Rp 216.810 jika dibandingkan dengan UMP tahun 2018 yakni sebesar Rp 2,7 Juta. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh tahun 2019. Pergub tersebut berlaku bagi seluruh pekerja dan karyawan, baik di perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan usaha sosial lainnya. Pemerintah Aceh menetapkan UMP dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Pada 19 Oktober 2018. Dewan Pengupahan Provinsi Aceh mengusulkan dalam sidang bahwa besaran UMP Aceh tahun 2019 sebesar Rp 2.916.810. “UMP yang telah ditetapkan oleh Gubernur mulai berlaku terhitung 1 Januari 2019 (Serambi Indonesia, 1 November 2018).

Selanjutnya terkait pendapatan petani di Aceh dapat dijelaskan bahwa pendapatan petani minimum perbulan yaitu Rp. 100.000,- sedangkan pendapatan maksimum yaitu Rp.18.000.000,- perbulan, dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp. 2.116.166,-. Angka ini tentunya jauh di bawah GDP nasional yang berada pada angka 4.6 Juta perbulan. Berdasarkan data BPS tahun 2018 jika sumber penghasilan kepala rumah tangga sebagai buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan maka dikategorikan miskin. Sedangkan rata-rata penghasilan petani di Aceh adalah di atas Rp. 600.000,-, yaitu dengan jumlah Rp. 2.116.166,-. Perbulan. Selain penghasilan petaninya di atas Rp. 600.000 perbulan, mayoritas petani di Aceh memiliki motor sendiri yaitu mencapai 82%, untuk mempermudah transportasi, hal ini sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.3: Kepemilikan Kenderaan



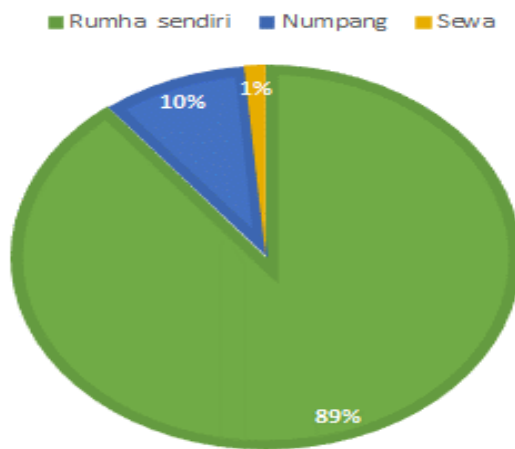
Sumber: Data Penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 248 orang responden (83%) petani di Aceh menyatakan memiliki Motor, 23 orang responden (8%) menyatakan mempunyai mobil, 17 orang responden (5%) menyatakan mempunyai sepeda serta hanya 12 orang responden (4%) yang menyatakan tidak mempunyai kendaraan. Oleh karena itu mengacu pada data Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa kriteria miskin berikutnya adalah jika tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Sementara petani di Aceh hanya empat% yang tidak mempunyai kendaraan sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan petani di Aceh tidak masuk dalam kategori miskin yang ditetapkan oleh BPS juga.

Terkait dengan status kepemilikan rumah dapat dijelaskan bahwa 89% petani di Aceh sudah memiliki rumah sendiri. Ini

artinya meskipun mereka berprofesi sebagai petani mayoritas mereka telah memiliki rumah sendiri. Untuk lebih mengenai status kepemilikan rumah dapat dilihat pada grafik berikut ini:

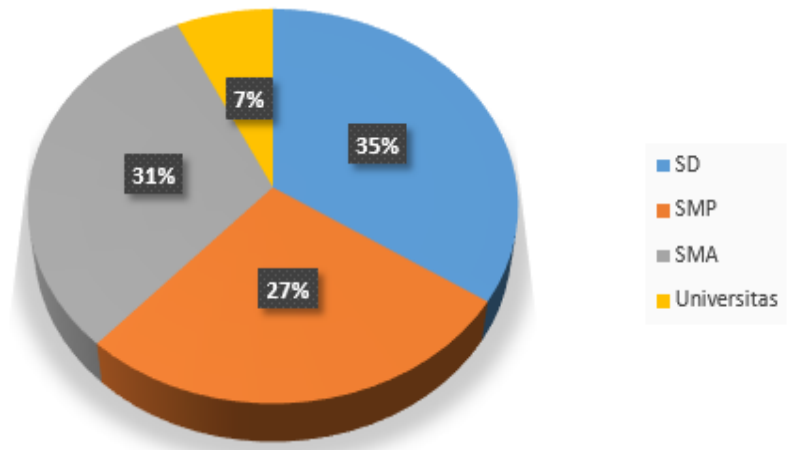
Grafik 1.4: Status Kepemilikan Rumah



Sumber: Data Penelitian 2019

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa 268 orang responden (89%) sudah memiliki rumah sendiri, 28 orang responden (10%) masih tinggal menumpang dan 4 orang responden (1%) masih sewa rumah. Sementara itu mayoritas petani yang berpendidikan di atas SD sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 1.5: Gambaran Tingkat Pendidikan



Sumber: Data Penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 103 orang responden (35%) berpendidikan tingkat SD, 94 orang responden (31%) berpendidikan tingkat SMA, 82 orang responden (27%) berpendidikan tingkat SMP dan 21 orang responden (7%) berpendidikan tinggi tingkat Universitas. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BPS masyarakat dapat dikategorikan miskin jika Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tamat SD / tidak tamat SD / tidak sekolah. Jika melihat pada data tersebut 65% responden adalah tamat berpendidikan SMP, SMA serta tamatan Universitas.

Merujuk pengertian kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kemiskinan dengan kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut (<http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps>). Kriteria tersebut adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dianggap miskin, sementara dari hasil kajian didapati bahwa kondisi petani di Aceh tidak memenuhi sembilan kriteria tersebut,

tapi hanya mempunyai 6 kriteria yaitu, point nomor 1, 2, 3, 4, 7 dan 8. Oleh karena itu petani tersebut tidak termasuk katagori miskin menurut versi BPS.

Menurut Asra (2012) ada tiga pendekatan utama untuk pengukuran kemiskinan yaitu, pendapatan, pengeluaran rumah tangga, dan indikator kesejahteraan. Pengeluaran per kapita rumah tangga diukur dari pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan selama sebulan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita rumah tangga telah digunakan dalam berbagai penelitian (Grootaert, 1999; Grootaert & Bastelaer, 2002; Aker, 2007; Tenzin, et al., 2013; Baiyegunhi, 2014).

Penggunaan pengeluaran perkapita rumah tangga mengasumsikan bahwa (i) setiap anggota dalam rumah tangga mengonsumsi barang dan jasa adalah sama, tanpa memandang usia dan jenis kelamin, (ii) setiap anggota rumah tangga memiliki kebutuhan yang sama, tanpa memandang usia dan jenis kelamin, dan (iii) pengeluaran dua atau tiga orang atau lebih yang hidup bersama adalah sama seperti jika mereka hidup secara terpisah (Mukherjee & Benson, 2003).

Indonesia telah memiliki sukses luar biasa dalam penanggulangan kemiskinan sejak tahun 1970an. Periode dari akhir tahun 1970an hingga pertengahan tahun 1990an dianggap sebagai episode 'pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin (*propoor growth*)' terbesar dalam sejarah perekonomian negara manapun, dengan keberhasilan Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan lebih dari separuhnya. Setelah sempat meningkat selama krisis ekonomi (23 persen lebih pada tahun 1999), angka kemiskinan pada umumnya tidak jauh dari angka-angka sebelum krisis (16 persen pada tahun 2005).

Kunci dari pemulihan tersebut terletak pada stabilitas ekonomi makro sejak pertengahan tahun 2001 dan penurunan harga barang, terutama beras yang penting untuk konsumsi masyarakat miskin. Akan tetapi, walaupun ada penurunan angka kemiskinan secara terus menerus, belum lama ini terjadi kenaikan angka kemiskinan yang tak terduga. Penyebab utama terjadinya perubahan tersebut diperkirakan adalah melonjaknya harga beras diperkirakan kenaikan sekitar 33% harga beras yang dikonsumsi oleh kaum miskin antara bulan Februari 2005 dan Maret 2006, yang sebagian besar menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 17,75%.

1.4 Modal Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan perekonomian yang lazim digunakan dalam Ilmu Ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di dunia sangat bervariasi dimana umumnya negara-negara dikawasan Asia memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Akan tetapi merupakan suatu keajaiban, negara-negara dengan sumber daya alam yang rendah namun memiliki investasi manusia dan teknologi yang tinggi seperti negara Jepang dan Korea yang berada di kawasan Asia Timur memiliki laju perekonomian yang tinggi. Menurut Bank Dunia keajaiban tersebut penyebabnya adalah kebijakan pemerintah yang menciptakan lingkungan kelembagaan dan organisasi menjadi lebih efisien, terciptanya pertukaran informasi antar pemerintah, industri dan koperasi (World Bank 1993; Stiglitz 1996)

Studi makro World Bank dan Stiglitz menyebutkan manusia dan fisik yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum secara jelas menyebut faktor modal sosial. Beberapa studi luar negeri

memberikan wawasan bagaimana peran modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat atau keuntungan usaha. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Putnam (1993) di Italia yang menjelaskan komunitas masyarakat Itali bagian Utara. Dimana penyebab keberhasilan ekonomi komunitas Italia bagian Selatan adalah tingginya aktivitas asosiasi dan sukarelawan antara anggota komunitas. Sebaliknya asosiasi sebagaimana di komunitas Italia bagian Utara tidak banyak dan frekuensinya lebih rendah.

Selain itu studi di Somalia oleh Buckley (1996) mengutarakan setelah kekacauan pemerintah sipil mengakibatkan merosotnya pendapatan masyarakat hampir diseluruh negeri, kecuali masyarakat kota pelabuhan di Bosaso. Masyarakat di pelabuhan Bosaso tidak terpengaruh karena adanya organisasi lokal keamanan, dewan dari orang-orang tua dan dengan dukungan masyarakat lokal menghidupkan perdagangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Buckley, 1996)

Sementara studi di India oleh Pathan menyebutkan konflik antara pejabat dan masyarakat lokal di Gujarat India menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan setelah kejadian itu masyarakat diarahkan dalam manajemen hutan dan sejak itu konflik menurun dan terciptanya produktifitas dan pendapatan tumbuh (Pathan etc, 1993).

Hasil penelitian Hanafri (2009) menunjukkan bahwa terdapat korelasi signifikan antara modal sosial dan partisipasi dan keanggotaan kelompok diluar komunitas terhadap variabel kemiskinan pada masyarakat nelayan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan partisipasi nelayan khususnya keikutsertaannya terhadap asosiasi dan organisasi yang ada khususnya yang memiliki potensi jaringan ke luar, dengan demikian akses yang diharapkan menjadi lebih meningkat dan nantinya

berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan rata-rata mereka (kemiskinan berkurang).

Studi lain oleh Aloysius Gunadi Brata (2004) yang menunjukkan bagaimana modal sosial memberikan manfaat ekonomis bagi pelaku ekonomi informal perkotaan. Michael Woolcock merangkum dari beberapa penelitian tentang kemiskinan di berbagai negara, mulai dari kota-kota di pedalaman AS (Wilson, 1996) hingga desa-desa di India (Kozel dan Parker, 1998), Tanzania (Narayan, 1997) dan Indonesia (Grootaert, 1998) secara umum memiliki kesamaan dalam masyarakatnya yaitu kurangnya "*bridging*" modal sosial. Tanpa akses untuk menggunakan jejaring informasi, orang-orang yang tinggal di kota-kota pedalaman terperangkap kedalam pekerjaan bergaji rendah (Loury, 1977).

Penelitian Abidin (2008) mengenai modal sosial pada kalangan pengusaha UMK (Usaha Mikro dan Kecil) di Jakarta menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara modal sosial dan keuntungan UMK di Pusat Industri Kecil (PIK) Pulogadung Jakarta. Para pengusaha UMK mendapat keuntungan atau kemudahan berusaha karena hubungan yang baik dengan keluarga, dengan sesama pengusaha, dan dengan pemilik order atau pemesan produk dan jasa. Modal sosial mempengaruhi modal manusia (pendidikan) dan modal fisik dalam menciptakan keuntungan. Modal sosial merupakan aspek penting dalam kegiatan proses produksi barang dan jasa. Aspek pendidikan, modal fisik dan modal manusia bisa lebih optimal apabila pengusaha juga memiliki modal sosial. Temuan lain menyebutkan bahwa modal sosial lebih memiliki keeratan terhadap keuntungan modal fisik dan kontribusi modal sosial terhadap keuntungan lebih besar dibandingkan dengan modal fisik.

1.5 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan berkonsentrasi kepada tiga buah pilar yakni pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin tercapainya keharmonisan antara ketiga buah pilar tersebut pelaksanaan pembangunan haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan manusia (Loekman, 1999). Pengoptimalan tersebut dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.

Kata keberlanjutan sekarang ini digunakan secara meluas dalam lingkup program pembangunan. Frasa kata keberlanjutan dapat diartikan sebagai menjaga agar sesuatu upaya terus berlangsung, kemampuan untuk bertahan dan menjaga agar tidak merosot. Dalam konteks pertanian, keberlanjutan untuk tetap produktif sekaligus tetap mempertahankan basis sumber daya.

Asdak (2012) mengatakan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan, diperlukan tiga syarat, yaitu terlanjutnya secara ekologis, ekonomi dan sosial. Keambrukan jalannya pembangunan dapat terjadi apabila salah satu syarat tidak terpenuhi. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Martopo & Mitchell Sumarwoto dalam Sugandhy & Hakim (2007) mengatakan pembangunan berkelanjutan adalah perubahan yang menuju kearah positif atau lebih baik didalam aspek sosial, ekonomi yang pelaksanaannya tidak mengabaikan aspek ekologi atau lingkungan dan sosial dimana seluruh lapisan masyarakat bergantung kepada aspek lingkungan. Keberhasilan penerapan

pembangunan berkelanjutan memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang dilakukan secara terpadu.

Sementara pertanian berkelanjutan diartikan sebagai pengelolaan sumberdaya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam (Dudung, 2001).

Salikin (2003) mengatakan pembangunan pertanian yang dimaksud adalah pembangunan pertanian dalam arti luas, meliputi bidang-bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Pembangunan pertanian harus dilakukan secara seimbang dan disesuaikan dengan daya dukung ekosistem sehingga kontinuitas produksi dapat dipertahankan dalam jangka panjang, dengan menekankan tingkat kerusakan lingkungan sekecil mungkin.

Kegiatan pertanian dilakukan untuk memaksimalkan dampak sosial dari pemanfaatan sumber daya biologis dengan memelihara produktivitas dan efisiensi produksi komoditas pertanian yang dihasilkan, pertanian berkelanjutan juga memperhatikan pentingnya memelihara kualitas lingkungan hidup, dan menjaga produktifitas sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang.

Terdapat lima dimensi sistem pertanian berkelanjutan menurut Zamora dalam Salikin (2003) yaitu (1) ekologi; (2) kelayakan ekonomi; (3) kepantasan budaya; (4) kesadaran sosial; (5) pendekatan holistik. Tujuan pertanian berkelanjutan menurut Manguiat dalam Salikin (2003) ada tujuh macam kegiatan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup, yaitu: (1) meningkatkan pembangunan ekonomi; (2) memprioritaskan kecukupan pangan; (3) meningkatkan pengembangan sumber daya manusia; (4) meningkatkan harga diri; (5) memberdayakan dan memerdekakan petani; (6) menajaga stabilitas lingkungan (aman, bersih, seimbang,

diperbarui); dan (7) memfokuskan tujuan produktifitas untuk jangka panjang. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial (Astuti, dkk, 2015).

Banyak orang menggunakan definisi yang lebih luas dalam menilai pertanian bisa dikatakan pertanian berkelanjutan jika mencakup hal-hal berikut (Sudalmi, 2010): Pertama, mantap secara ekologis, yang berarti bahwa kualitas sumberdaya alam dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara keseluruhan dari manusia, tanaman dan hewan sampai organisme tanah ditingkatkan Kedua hal ini akan terpenuhi jika tanah dikelola dan kesehatan tanaman, hewan serta masyarakat dipertahankan melalui proses biologis.

Sumberdaya lokal dipergunakan sedemikian rupa sehingga kehilangan unsur hara, biomassa, dan energy bisa ditekan serendah mungkin serta mampu mencegah pencemaran. Tekanannya adalah pada penggunaan sumberdaya yang bisa diperbarui. Bisa berkelanjutan secara ekonomis, yang berarti bahwa petani bisa cukup menghasilkan untuk pemenuhan kebutuhan dan atau pendapatan sendiri, serta mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk mengembalikan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Keberlanjutan ekonomis ini bisa diukur bukan hanya dalam hal produk usahatani yang langsung, namun juga dalam fungsi melestarikan sumberdaya alam dan meminimalkan risiko.

Kedua, adil, yang berarti bahwa sumberdaya dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar semua anggota masyarakat dan hak-hak mereka dalam penggunaan lahan terpenuhi, modal yang memadai, disertai bantuan teknis serta peluang pemasaran yang terjamin. Semua orang memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan, baik di lapangan maupun di dalam masyarakat.

Ketiga, manusiawi, yang berarti bahwa semua bentuk kehidupan (tanaman, hewan dan manusia) dihargai. Martabat dasar semua makhluk hidup dihormati, dan hubungan serta institusi menggabungkan nilai kemanusiaan yang mendasar, seperti kepercayaan, kejujuran, hargadiri, kerjasama dan rasa sayang. Integritas budaya dan spiritual masyarakat dijaga dan dipelihara.

Keempat, luwes, yang berarti bahwa masyarakat pedesaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi usahatani yang berlangsung terus, misalnya penambahan jumlah penduduk, kebijakan, permintaan pasar dan lain-lain.

Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Pertanian berkelanjutan yang sebenarnya adalah yang berkelanjutan secara ekonomi yang dicapai dengan: penggunaan energi yang lebih sedikit, minimalnya jejak ekologi, lebih sedikit barang berkemasan, pembelian lokal yang meluas dengan rantai pasokan pangan singkat, lebih sedikit bahan pangan terproses, kebun komunitas dan kebun rumah yang lebih banyak, dan lain sebagainya.

Food and Agriculture Organization (1995) melalui komisi perikanan mengartikan pembangunan berkelanjutan, yang dituangkan dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, adalah pelestarian dan pengelolaan sumberdaya alam ditujukan untuk menjamin keberlanjutan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Pengembangan konsevasi seperti tanah, air, tanaman dan sumberdaya genetik tidak menyebabkan degradasi lingkungan, menggunakan teknologi yang tepat dan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek

lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berpijak dari pengertian-pengertian di atas, paradigma pembangunan yang semula berfokus pada pertimbangan ekonomi semata bergeser kepada paradigma pembangunan dengan sektor lingkungan dan sosial sebagai sektor yang tidak bisa ditinggalkan.

Dalam sudut pandang praktis, pembangunan berkelanjutan adalah ketika proses pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang, dilakukan secara terencana, sistematis, dan tanpa membahayakan generasi selanjutnya. Dalam kondisi seperti ini, masing-masing aspek akan saling bergantung di antara yang satu dengan yang lain, sehingga strategi yang ditetapkan merupakan mekanisme penting untuk mengintegrasikan berbagai program dalam suatu sikap yang harmonis.

Dengan demikian salah satu prinsip pembangunan yang berkelanjutan adalah adanya keterlibatan *stakeholders*, karena setiap pihak memiliki sumber daya dan peran yang bisa didayagunakan secara proporsional, sekaligus akan mengubur paradigma lama yang berasumsi bahwa pemerintah berperan sebagai pemasok atau penyedia, dan digantikan dengan peran fasilitator serta pemberdaya potensi masyarakat.

Merujuk kepada konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) sebagaimana tertuang dalam laporan Brundtland, yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan berkonsep pada pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya, indikator daya dukung lingkungan menjadi penting untuk dipahami. Pada empat dasawarsa terakhir negara-negara diseluruh dunia

sedang menghadapi persoalan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan (UNDP, 2006)

Fenomena ini mengakibatkan tekanan terhadap ekosistem bumi, yang berpotensi melebihi kemampuan ekosistem bumi dalam mendukung kehidupan. Pada periode yang sama menurut Galli et, al (2010) penambahan penduduk dunia telah mencapai tingkat dimana laju konsumsi dan laju emisi limbah telah melebihi kemampuan ekosistem bumi untuk memperbaiki diri.

BAB II

MODAL SOSIAL DAN DETERMINASINYA

2.1 Pengertian Modal Sosial

Konsep modal sosial memiliki pengertian yang berbeda-beda di kalangan pakar ilmu ekonomi dan pakar ilmu sosial. Masalah konsep kapital (modal dalam modal sosial) bersumber pada beberapa keterbatasan dan referensi. Konsep kapital dalam referensi ekonomi mempertimbangkan referensi bukan ekonomi yang sering kali terbatas, konsep kapital dalam referensi ilmu sosial terlalu sedikit mempertimbangkan referensi ekonomi, sehingga sulit untuk mencapai keseragaman pengertian (Lawang 2004).

Menurut Coleman dalam Eko (2004) modal sosial ditetapkan oleh fungsinya. Modal sosial bukan sebuah entitas tunggal, tetapi berbagai macam entitas yang berbeda-beda dengan dua elemen bersama yang terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan pelaku-pelaku tertentu dalam struktur itu. Sebagaimana bentuk modal lain, modal sosial adalah produktif, memungkinkan pencapaian tujuan tertentu yang dalam ketiadaannya akan tidak mungkin. Sebagaimana modal fisik dan modal manusia, modal sosial sama sekali tidak *fungible* tetapi mungkin spesifik untuk aktivitas tertentu. Tidak seperti modal lain modal sosial melekat dalam struktur hubungan antara para pelaku dan diantara para pelaku. Walaupun definisi tersebut tidak begitu jelas, namun kumpulan tindakan, hasil dan hubungan yang berbeda ditetapkan sebagai modal sosial.

Modal sosial juga dapat dilihat sebagai sekumpulan asosiasi diantara orang-orang yang mempengaruhi produktivitas komunitas yang mencakup jaringan dan norma sosial. Jaringan dan norma secara empirik saling berhubungan dan memiliki konsekuensi ekonomi yang penting. Modal sosial berperan di dalam memfasilitasi kerjasama dan koordinasi untuk manfaat bersama bagi anggota-anggota asosiasi (Putnam 1993)

Paldam dalam Laba (2006) menggambarkan modal sosial sebagai perekat yang menyatukan masyarakat. Paldam membagi pendekatan teoritis terhadap modal sosial kedalam kepercayaan, kerjasama dan jaringan. Kepercayaan memudahkan kerelaan untuk bekerjasama, hubungan yang sama juga berlaku antara kepercayaan dan jaringan. Dalam hal ini definisi dari jaringan akan bermakna ketika ditempatkan dalam kepercayaan-kerjasama.

Narayan (1999) memberikan definisi modal sosial sebagai norma dan hubungan sosial yang tertambat didalam struktur sosial masyarakat yang memungkinkan orang-orang untuk mengkoordinasikan tindakan dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan Portes (1998) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan dari para pelaku untuk mendapatkan manfaat melalui keanggotaan di dalam jaringan sosial atau struktur sosial lainnya.

Leser (2000) mendefinisikan modal sosial sebagai kesejahteraan atau keuntungan yang terjadi karena adanya hubungan sosial antar individu. Ada tiga dimensi utama yang mempengaruhi perkembangan dari keuntungan itu yaitu struktur hubungan, dinamika interpersonal yang terjadi dalam struktur serta konteks dan bahasa umum yang digunakan individu dalam struktur.

Fukuyama (1995) menjelaskan *social capital* secara sederhana bisa didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota

suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantara mereka. Jika anggota-anggota kelompok itu mengharapkan para anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai.

Selanjutnya Bank Dunia mendefinisikan modal sosial dalam dua versi yaitu modal sosial merupakan norma, institusi, dan hubungan sosial yang membentuk kualitas interaksi sosial didalam masyarakat dan modal sosial adalah norma, institusi, dan hubungan sosial yang memungkinkan orang dapat bekerjasama (Bank Dunia 1998). Kedua definisi tersebut perbedaannya terletak pada variabel terikatnya. Definisi pertama kualitas interaksi sosial didalam masyarakat menjadi variabel terikat dan pada definisi yang kedua peluang orang untuk melakukan kerjasama sebagai variabel terikatnya.

Walaupun definisi modal sosial di kalangan pakar-pakar ilmu ekonomi dan pakar-pakar ilmu sosial berbeda-beda, akan tetapi secara umum modal sosial memiliki tiga unsur utama yaitu (1) Rasa percaya, (2) Norma dan (3) Jaringan kerja. Ketiga unsur utama tersebut dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat modal sosial di dalam suatu wilayah.

Nasution (2016) juga mengatakan bahwa Modal sosial memiliki hubungan positif terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga, sehingga mengurangi kemiskinan. Artinya akumulasi modal sosial dapat meningkatkan akses modal lain (modal manusia, modal keuangan, dan modal fisik) berkaitan dengan peningkatan penghasilan rumah tangga miskin.

Konsep-konsep modal sosial tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian yang berhubungan dengan masalah pengentasan kemiskinan khususnya petani, namun modal sosial ditempatkan sebagai faktor yang mempengaruhi (variabel independen). Oleh sebab itu, penulis ingin

melakukan penelitian dengan menempatkan sumberdaya sosial (modal sosial) sebagai faktor yang perlu dikuatkan sebagai model dalam pengentasan kemiskinan petani di Aceh. Penelitian ini akan menghasilkan model pengentasan kemiskinan petani di Aceh melalui penguatan modal sosialnya.

2.2 Klasifikasi dan Determinan Modal Sosial

Uphoff (1999) membedakan modal sosial ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi struktural dan dimensi kognitif. Dimensi struktural bersumber dari peranan dan aturan dalam jaringan suatu organisasi sosial dan hubungan interpersonal, serta prosedur-prosedur dan presenden-presenden, yang didorong oleh faktor dinamis baik vertikal maupun horizontal. Dimensi kognitif bersumber dari norma-norma, nilai-nilai, sikap-sikap dan keyakinan yang hidup di dalam masyarakat sipil oleh dorongan kepercayaan, solidaritas, kerjasama dan persahabatan. Unsur modal sosial kognitif mempengaruhi/mengarahkan orang pada aksi kolektif yang menghasilkan manfaat bersama, sedangkan unsur-unsur struktural berperan di dalam memperlancar/memfasilitasi aksi kolektif itu. Dimensi-dimensi dari modal sosial struktural dan kognitif harus dikombinasikan untuk mewakili potensi agregat dari aksi kolektif yang mendatangkan manfaat bersama yang telah ada di dalam suatu komunitas (Krishna 2000; Uphoff 1999, *diacu dalam* Grootaert dan van Bastaeler 2002).

Modal sosial juga dapat dinilai pada level mikro, meso, dan makro. Pada level mikro, modal sosial dapat terlihat dalam bentuk jaringan horisontal antara individu dan rumah tangga serta norma-norma yang mengatur hubungan itu dan nilai-nilai yang melandasi jaringan horisontal ini. Pengamatan modal sosial pada level meso mencakup hubungan horisontal dan vertikal di antara kelompok, diilustrasikan dengan pengelompokan asosiasi lokal menurut

wilayah. Sedangkan pada level makro, modal sosial dapat diamati di dalam bentuk lingkungan kelembagaan dan politik yang mempengaruhi seluruh kegiatan ekonomi dan sosial, serta kualitas dari pengaturan pemerintah. Pada level makro, modal sosial berkaitan dengan ekonomi kelembagaan yaitu kualitas insentif dan kelembagaan yang merupakan faktor penentu yang utama dari pertumbuhan ekonomi (Grootaert dan van Bastaeler 2002).

Woolcock dan Narayan *dalam* Vipriyanti (2007), menyatakan bahwa ada empat perspektif modal sosial dalam pembangunan ekonomi, yaitu (1) pandangan komunitarian (*the communitarian view*), pandangan ini menyamakan modal sosial dengan organisasi pada level lokal (seperti asosiasi, klub, dan kelompok-kelompok warga). Modal sosial diukur secara sangat sederhana yaitu melalui jumlah dan kepadatan suatu organisasi dalam komunitas tertentu, semakin banyak akan lebih baik dan selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, (2) pandangan jaringan (*the networks view*), menekankan pentingnya asosiasi vertikal dan horisontal antar individu, dan hubungan di dalam organisasi dan antar organisasi seperti kelompok-kelompok komunitas dan perusahaan. Dalam pandangan ini terdapat dua dimensi dasar dari modal sosial pada level komunitas, yaitu yang dikenal dengan *bonding social capital (strong intra community ties)* dan *bridging social capital (weak extra community network)*.

Perspektif ini menganggap bahwa masyarakat dapat dicirikan oleh bawaan (*endowment*) mereka akan kedua dimensi modal sosial tersebut. Perbedaan kombinasi antar kedua dimensi akan mempengaruhi hasil yang diperoleh dari modal sosial, (3) pandangan kelembagaan (*the institutionsl view*), berpendapat bahwa jaringan kerja komunitas dan masyarakat sipil, secara luas adalah hasil dari keadaan politik, hukum, dan lingkungan kelembagaan. Pandangan ini telah menghasilkan sejumlah metodologi dan fakta empiris yang kuat

namun hanya untuk kebijakan makro, (4) pandangan sinergi (*the synergy view*), menggabungkan pandangan jaringan dan kelembagaan atas dasar asumsi bahwa tidak satupun pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) akan dapat berjalan sendiri di dalam mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Modal sosial digunakan sebagai variabel penghubung, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kerangka hubungan antara pendapat Woolcock dan Narayan dengan pendapat Grootaert dan van Bastaeler terhadap modal sosial

Fokus Penilaian	Level /perspektif modal sosial	
	Grootaert dan van Bastaeler	Woolcock dan Narayan
Hubungan horisontal antar individu atau asosiasi lokal	Mikro	<i>The Communitarian view</i>
Hubungan horisontal dan vertikal antar asosiasi/kelompok	Meso	<i>The Network view</i>
Jaringan kerja komunitas Hasil keadaan politik, hukum dan kelembagaan.	Makro	<i>The Institutional view</i>
Hubungan antara Masyarakat, Pemerintah dan swasta		<i>The Synegrgy view</i>

Sumber: Woolcock dan Narayan (2000); Grootaert dan van Bastaeler (2002) dalam Vipriyanti (2007)

Pretty dan Ward (2001) menyatakan bahwa modal sosial dibangun dari empat aspek yaitu (1) hubungan dari rasa percaya, (2) resiprositas dan pertukaran, (3) aturan umum, norma dan sangsi, (4) koneksi, kerjasama dan kelompok. Rasa percaya mempermudah kerjasama dan mengurangi biaya transaksi. Rasa percaya dapat dibedakan atas dua tipe yaitu percaya terhadap individu yang dikenal dan percaya terhadap individu yang tidak dikenal yang semakin meningkat karena percaya pada struktur sosial yang dikenal. Membangun rasa saling percaya membutuhkan waktu tetapi mudah sekali hilang. Ketika masyarakat tidak saling percaya maka kerjasama tidak akan terbangun. Resiprositas dan pertukaran juga meningkatkan kepercayaan

Determinan modal sosial seperti jaringan kerja, norma dan rasa percaya mempengaruhi kinerja pembangunan desa. Jaringan kerja berpengaruh positif jika dampak proteksi terhadap perilaku *rent-seeking* lebih besar. Norma berdampak positif jika peluang berkembangnya kreatifitas lebih besar dari peluang menipisnya etika dalam masyarakat. Rasa saling percaya akan mendorong peningkatan kinerja pembangunan bila mampu membangun kerjasama dan mengurangi konflik.

Untuk menentukan determinan dari modal sosial perlu memahami keputusan individu dalam melakukan investasi modal sosial. Modal sosial individu ditentukan oleh umur, mobilitas, jarak dan penghasilan dari tingkat ketrampilan. Modal sosial individu ini berkaitan erat dengan *human capital*. Ketika individu berinvestasi untuk dapat berkomunikasi secara baik maka individu tersebut meningkatkan modal sosial dirinya dan masyarakat. Akan tetapi jika individu tersebut meningkatkan kemampuan dirinya untuk menipu orang lain maka dia meningkatkan modal sosialnya sendiri dan mengurangi modal sosial masyarakat (Glaeser *et al*, 2001). Determinan modal sosial juga dapat mencakup instabilitas ekonomi

dan politik, hubungan *patron-client*, pendidikan, jenis pekerjaan, adanya *collective interest* dan legitimasi pasar bagi nilai-nilai bersama (*common value*). Selain itu pengutan internal dan eksternal juga mempengaruhi terjalannya norma bersama dan jaringan kerja (Christoforou 2003).

Tingkat modal sosial dalam suatu masyarakat dapat diukur dari indikator densitas keanggotaan dalam berbagai organisasi sosial, tingkat rasa saling percaya antara individu dalam masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap aktivitas yang bersifat saling membantu (Putnam 1995). Perbedaan yang besar dalam keefektifan pemerintahan regional di Italia tidak disebabkan oleh sumberdaya yang dimiliki atau oleh strukturnya melainkan karena perbedaan dalam modal sosial wilayah tersebut (Putnam 1993). Hasil penelitian Putnam di Italia memperlihatkan kesuksesan Italia Utara karena kekayaan sosial dari kehidupan berkelompok, sebaliknya Italia Selatan mengalami kemunduran karena "*amoral familism*" seperti ketidakpercayaan yang dikombinasi dengan ikatan kekeluargaan yang kuat. Namun demikian ukuran tersebut masih sangat sederhana karena hanya melihat modal sosial dari kehidupan berkelompok saja.

Mengukur tingkat stok modal sosial masyarakat di suatu wilayah dapat dilakukan melalui pengukuran hasil (*outcome*) dari modal sosial itu sendiri. Hasil yang tercipta dari ketersediaan modal sosial yang umumnya digunakan sebagai indikator modal sosial dapat dikelompokkan dalam kelompok *proximal* indikator maupun *distal* indikator. *Proximal* indikator adalah hasil modal sosial yang berhubungan langsung dengan komponen inti dari jaringan kerjasama, rasa percaya dan resiprositas seperti penggunaan *civic engagement* sebagai indikator dari jaringan kerja sosial. *Distal* indikator adalah hasil tidak langsung dari modal sosial seperti indeks harapan hidup, status kesehatan, tingkat kriminalitas, tingkat

partisipasi dalam pendidikan, tingkat pengangguran dan tingkat pendapatan rumah tangga (Viprianti 2007).

2.3 Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan adalah rasa percaya yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk saling berhubungan. Ada tiga hal inti yang saling terkait dalam kepercayaan yaitu: (1) *Hubungan* antara dua orang atau lebih. Termasuk dalam hubungan tersebut adalah institusi, yang dalam hal ini diwakili oleh orang. Seseorang percaya pada institusi tertentu untuk kepentingannya, karena orang-orang dalam institusi itu bertindak. (2) *Harapan* yang akan terkandung dalam hubungan itu, yang kalau direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. (3) *Interaksi sosial* yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud. Dengan ketiga dasar tersebut kepercayaan dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial (Lawang 2004)

Percaya berarti seseorang memiliki kerelaan menerima segala resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya berdasarkan pada keyakinan bahwa orang lain akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan dan bertindak saling menguntungkan. Percaya yaitu menerima dan mengabaikan kemungkinan bahwa sesuatu akan tidak benar (Casson dan Godley 2000)

Rasa percaya merupakan dasar dari perilaku moral dimana modal sosial dibangun. Moralitas mengarahkan bagi kerjasama dan koordinasi sosial dari semua aktivitas sehingga manusia dapat hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain. Sepanjang adanya rasa percaya, perilaku dan hubungan kekeluargaan maka akan terbangun prinsip-prinsip resiprositas dan pertukaran. Sebagai alat untuk

membangun hubungan, rasa percaya dapat menekan biaya-biaya transaksi yang muncul dalam proses kontak, kontrak dan kontrol. Dengan demikian semua orang tentunya akan lebih menyukai hubungan yang didasari oleh rasa saling percaya dibandingkan dengan hubungan yang oportunistik.

Rasa percaya akan mempermudah terbentuknya kerjasama. Semakin kuat rasa percaya pada orang lain semakin kuat juga kerjasama yang terjadi diantara mereka. Kepercayaan sosial muncul dari hubungan yang bersumber pada norma resiprositas dan jaringan kerja dari keterkaitan warga negara. Dengan adanya rasa saling percaya, tidak dibutuhkan aktivitas monitoring terhadap perilaku orang lain agar orang tersebut berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan.

Kepercayaan dapat dibangun, akan tetapi dapat juga hancur. Demikian juga kepercayaan tidak dapat ditumbuhkan oleh salah satu sumber saja, tetapi seringkali tumbuh berdasarkan pada hubungan teman dan keluarga (Williamson *dalam* Vipriyanti 2007). Rasa percaya ditentukan oleh homogenitas, komposisi populasi dan tingkat keberagaman. Rasa percaya yang tinggi ditemukan pada wilayah dengan ras dan komposisi populasi yang homogen serta tingkat keberagaman yang rendah.

Hasbullah (2006) menyatakan bahwa berbagai tindakan kolektif yang didasari atas rasa saling percaya mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Ketiadaan rasa saling percaya dalam masyarakat akan mengundang berbagai masalah sosial yang serius. Masyarakat yang kurang memiliki rasa saling percaya akan sulit menghindari berbagai situasi kerawanan sosial dan ekonomi yang mengancam. Semangat kolektifitas dan partisipasi masyarakat untuk membangun

bagi kepentingan kehidupan yang lebih baik akan hilang. Lambat laun akan mendatangkan biaya tinggi bagi pembangunan karena masyarakat cenderung bersikap apatis dan hanya menunggu apa yang diberikan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain. Jika rasa saling mempercayai sudah lemah, maka yang akan terjadi adalah sikap-sikap yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku, kriminalitas akan meningkat, tindakan-tindakan destruktif dan anarkhis gampang mencuat, kekerasan dan kerusakan massa akan cepat tersulut. Kurangnya rasa saling percaya juga membuat masyarakat cenderung pasif, sendiri-sendiri dan pada akhirnya muncul perasaan keterisolasian diri. Pada situasi yang demikian masyarakat akan gampang terserang berbagai penyakit kejiwaan seperti kecemasan, putus asa, dan kemungkinan akan meleakukan tindakan-tindakan yang fatal bagi dirinya maupun bagi orang lain.

2.4 Jaringan (Network)

Lenggono (2004) menjelaskan, pengertian jaringan mengacu pada hubungan sosial yang teratur, konsisten dan berlangsung lama, hubungan tersebut bukan hanya melibatkan dua individu, melainkan juga banyak individu. Hubungan antar individu tersebut akan membentuk jaringan sosial yang sekaligus merefleksikan terjadinya pengelompokan sosial dalam kehidupan masyarakat. Mitchell *dalam* Lenggono (2004) mengemukakan, bahwa jaringan sosial merupakan seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk diantara kelompok orang, karakteristik hubungan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menginterpretasikan motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sementara Suparlan (1995) mengemukakan, bahwa jaringan sosial merupakan proses pengelompokan yang terdiri atas sejumlah orang (sedikitnya tiga orang) yang masing-masing mempunyai identitas tersendiri dan dihubungkan melalui hubungan sosial.

Setiap individu dapat memasuki berbagai kelompok sosial yang tersedia dimasyarakat dan menjalin ikatan-ikatan sosial berdasarkan unsur kekerabatan, ketetanggaan, dan pertemanan (Barnes *dalam* Lenggono, 2004). Ikatan sosial tersebut dapat berlangsung diantara mereka yang memiliki status sosial-ekonomi yang sepadan atau tidak dan ikatan tersebut merupakan unsur pembentuk sistem kelas. Setiap individu akan melihat dirinya sebagai pusat dari jaringan yang dimilikinya, ikatan sosial yang terbentuk merupakan sarana yang dapat menjembatani hubungan diantara anggota jaringan tersebut. Di dalam jaringan yang terbentuk tersebut, hubungan sosial dan keanggotaannya dapat melampaui batas teritorial (*borderless*) dan keberadaan masyarakat yang bersangkutan (Kusnadi, 2000).

Jika individu mempunyai mobilitas diri yang tinggi untuk melakukan hubungan sosial yang lebih luas, ini berarti individu tersebut akan memasuki sejumlah pengelompokan dan kesatuan sosial sesuai dengan ruang, waktu, situasi dan kebutuhan atau tujuan yang hendak dicapainya. Keanggotaan individu dalam suatu jaringan bersifat fleksibel dan dinamis, karena pada dasarnya setiap individu sebagai makhluk sosial akan selalu terkait dengan jaringan sosial yang kompleks. Bila seorang individu memasuki sejumlah jaringan sosial yang berbeda-beda sesuai dengan konteks khusus atau fungsinya, ia akan merefleksikan struktur sosial yang berbeda pula. Struktur sosial bukan hanya pencerminan adanya keteraturan hubungan dalam suatu jaringan sosial, melainkan juga menjadi sarana untuk memahami batas-batas status dan peran, serta hak dan kewajiban individu yang terlibat dalam hubungan sosial tersebut.

Berdasarkan tinjauan hubungan sosial yang membentuk jaringan sosial dalam suatu masyarakat, maka jaringan sosial dapat dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut:

1. Jaringan kekuasaan, dimana hubungan sosial yang terbentuk bermuatan kepentingan kekuasaan.
2. Jaringan kepentingan, dimana hubungan sosial yang membentuknya adalah hubungan sosial yang bermuatan kepentingan.
3. Jaringan perasaan, dimana jaringan sosial yang terbentuk atas dasar hubungan sosial yang bermuatan peran.

Masing-masing jenis jaringan sosial tersebut memiliki logika-situasional yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya (Agusyanto 1996). Jaringan kepentingan terbentuk oleh hubungan yang bermuara pada tujuan tertentu atau tujuan khusus. Bila tujuan yang spesifik atau konkrit, seperti untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa sudah dicapai oleh pelaku, hubungan kepentingan itupun tidak dilanjutkan lagi. Struktur sosial yang muncul dari jaringan sosial tipe ini bersifat sementara dan terus berubah-ubah, ruang bagi tindakan dan interaksipun lebih didasarkan pada tujuan relasional. Sebaliknya jika tujuan tersebut tidak konkret dan spesifik atau hampir selalu berulang setiap saat, struktur yang terbentuk relatif stabil atau permanen (Agusyanto 1996).

Berdasarkan status sosial-ekonomi individu yang terlibat dalam suatu jaringan, terdapat dua jenis hubungan sosial, yaitu hubungan sosial yang bersifat horizontal dan vertikal. Hubungan yang bersifat horizontal terjadi jika individu yang terlibat di dalamnya memiliki status sosial-ekonomi yang relatif sama, dengan kewajiban dan sumberdaya yang dipertukarkan relatif sama. Sebaliknya, di dalam hubungan yang bersifat vertikal individu-individu yang terlibat di dalamnya tidak memiliki status sosial-ekonomi yang sama atau sepadan.

Dasgupta dan Serageldin (2002) mengansumsikan bahwa setiap orang mampu berinteraksi dengan orang lain tanpa harus memilih. Tetapi sesungguhnya, setiap orang memiliki pola tertentu dalam berinteraksi, melakukan pilihan dengan siapa berinteraksi dan dengan alasan tertentu. Jaringan kerja pada awalnya merupakan sistem dari saluran komunikasi (*system of communication chanel*) untuk melindungi dan mengembangkan hubungan interpersonal. Membangun saluran komunikasi ini membutuhkan biaya yang dikenal dengan biaya transaksi. Keinginan untuk bergabung dengan orang lain, sebagian disebabkan oleh adanya nilai-nilai bersama. Jaringan kerja juga berperan dalam membangun koalisi dan koordinasi. Secara umum dikatakan bahwa keputusan melakukan investasi dalam saluran tertentu disebabkan oleh adanya kontribusi saluran tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi individu.

Jaringan kerja menekankan pada pentingnya asosiasi vertikal dan horizontal antar manusia dan hubungan inter dan antar asosiasi tersebut. Granovetter (1973) menyatakan bahwa ikatan inter masyarakat (*strong ties*) diperlukan untuk memberikan identitas pada keluarga dan masyarakat serta tujuan bersama. Pandangan ini juga menganggap bahwa tanpa ikatan antar masyarakat (*weak ties*) yang menghubungkan berbagai asosiasi sosial, maka ikatan horizontal yang kuat akan menjadi dasar untuk mewujudkan keinginan kelompok yang terbatas.

Lawang (2004) mengatakan jaringan sosial apapun harus diukur dengan fungsi ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosial sekaligus. Fungsi ekonomi menunjuk pada produktifitas, efisiensi dan efektifitas yang tinggi, sedangkan fungsi sosial menunjuk pada dampak partisipatif, kebersamaan yang diperoleh dari suatu pertumbuhan ekonomi. Jaringan sosial seperti itu sajalah yang disebut sebagai kapital sosial. Jadi, jaringan teroris, narkoba dan perampok, biarpun mendatangkan untung bagi mereka yang masuk

dalam jaringan tersebut, tetap merupakan ancaman bagi masyarakat secara keseluruhan, sehingga jaringan seperti itu bukan merupakan kapital sosial

2. 5 Norma (Share Value)

Hasbullah (2006) mengartikan norma sebagai sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma-norma tersebut biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tetapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

Lawang (2004) mengatakan norma tidak dapat dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan. Kalau struktur jaringan itu terbentuk karena pertukaran sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih, sifat norma kurang lebih sebagai berikut:

1. Norma itu muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan, artinya kalau pertukaran itu keuntungan hanya dinikmati oleh salah satu pihak saja, pertukaran sosial selanjutnya pasti tidak akan terjadi. Karena itu, norma yang muncul disini, bukan sekali jadi melalui satu pertukaran saja. Norma muncul karena beberapa kali pertukaran yang saling menguntungkan dan ini dipegang terus menerus menjadi sebuah kewajiban sosial yang harus dipelihara.
2. Norma bersifat resiprokal, artinya isi norma menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan

yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. Orang yang melanggar norma ini yang berdampak pada berkurangnya keuntungan di kedua belah pihak, akan diberi sanksi negatif yang sangat keras.

3. Jaringan yang terbina lama dan menjamin keuntungan kedua belah pihak secara merata, akan memunculkan norma keadilan, dan akan melanggar prinsip keadilan akan dikenakan sanksi yang keras juga.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh, Indonesia dengan konsentrasi di tiga wilayah pertanian yaitu Kabupaten Aceh Tamiang mewakili wilayah Timur Aceh, Kabupaten Aceh Tengah mewakili wilayah Tengah serta Kabupaten Pidie Jaya yang mewakili wilayah Barat jalur pantai Timur. Ketiga daerah tersebut masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani, oleh karena itu lokasi tersebut sangat sesuai untuk dijadikan lokasi penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods). Metode penelitian ini mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam satu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, realibel dan objektif. Susan Stainback (1988) menyatakan bahwa setiap metode dapat digunakan untuk melengkapi metode lain, bila penelitian dilakukan pada lokasi yang sama, tetapi dengan maksud dan tujuan yang berbeda.

Creswell (2009) menyatakan bahwa metode kombinasi adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Lebih lanjut Creswell menjelaskan bahwa metode kombinasi akan sangat berguna bila metode kuantitatif dan metode kualitatif secara sendiri-sendiri tidak cukup akurat digunakan untuk memahami permasalahan penelitian atau dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara kombinasi

akan dapat memperoleh pemahaman yang paling baik (bila dibandingkan satu metode).

3.2 Sumber Data

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data Primer dan data skunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara, Fokus Group Diskusi (FGD) dan Kuesioner. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data dokumentasi baik dari buku, jurnal, laporan dinas / lembaga serta data dari website yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara; pertama observasi. Herdiansyah (2011) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi sendiri menurut Sugiyono (2014) terbagi menjadi dua yaitu observasi partisipan (observasi terlibat) dan observasi non partisipan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara non partisipan namun peneliti menetap di lokasi penelitian sampai data yang diperlukan dapat dikumpulkan sesuai yang diperlukan oleh peneliti.

Kedua wawancara. Menurut Moleong dalam (Herdiansyah, 2011) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Esterberg, 2002 dalam (Sugiyono, 2014) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara terbagi menjadi dua, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur (wawancara mendalam).

Teknik wawancara yang dimaksud di sini adalah wawancara mendalam, yakni proses komunikasi dan dialog yang panjang antara pewawancara (*interviewer*) yang menyajikan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, dengan adanya rasa saling percaya antara keduanya. Dalam wawancara ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, tetapi garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara mendalam telah dilakukan dengan sejumlah informan yaitu dengan Kepala Dinas Pertanian Aceh Tamiang, Kepala Dinas Pertanian Bener Meriah, dan Kepala Dinas Pertanian Pidie Jaya. Peneliti juga melakukan Fokus Group Diskusi dengan para petani, serta membagikan kuesioner kepada sejumlah responden di tiga kabupaten tersebut.

Ketiga dokumentasi. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi juga merupakan salah satu cara dalam memperoleh suatu dengan melihat pada sumber-sumber data yang berupa dokumen-dokumen. Data dokumentasi dalam penelitian ini diambil dari buku, jurnal, laporan serta data dari website yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Usman & Akbar, 2009), analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.

Miles dan huberman dalam (Sugiyono, 2009) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu: Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menentukan fokus, menyederhanaan, meringkas, dan mengubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara sampai ke kesimpulan terakhir. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan. Makna dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Sedangkan berkaitan dengan data dari kuesioner analisis dilakukan menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS).

BAB IV

MODAL SOSIAL

DAN KEMISKINAN

4. 1 Tingkat Modal Sosial Petani di Aceh

Sebagai sebuah konsep sosiologis modal sosial merupakan pendekatan yang semakin intensif digunakan dalam mengatasi masalah kemiskinan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Bourdieu (1986), seorang sosiolog Perancis kenamaan, dalam sebuah tulisan yang berjudul "*The Forms of Capital*" mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. Penting juga diketahui bentuk-bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material. Padahal sebenarnya dalam setiap transaksi modal ekonomi selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan modal sosial (Syahra, 2003).

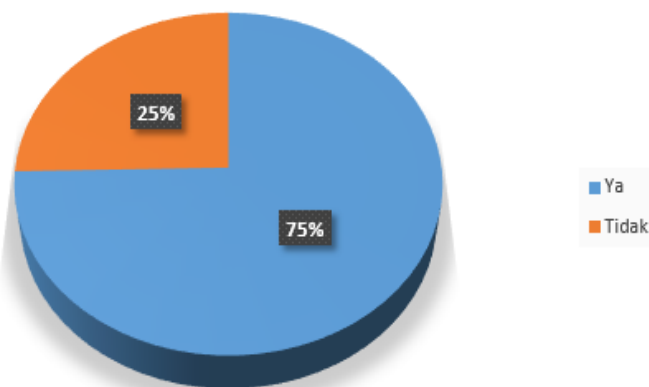
Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Dengan kata lain, dengan menjadi anggota dari suatu kelompok orang akan memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif. Selanjutnya ia mengatakan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu kelompok tergantung pada seberapa jauh kuantitas maupun kualitas jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi,

budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam jaringan hubungannya (Bourdieu, 1986).

Sebagaimana modal fisik yang diciptakan dengan mengubah materi untuk membentuk alat yang memudahkan produksi, modal manusia diciptakan dengan mengubah orang dengan memberi mereka keterampilan dan kemampuan yang memungkinkan mereka bertindak dengan cara baru. Modal sosial pada gilirannya, tercipta ketika relasi antara orang-orang mengalami perubahan sesuatu dengan cara-cara yang memudahkan tindakan. Modal fisik diwujudkan dalam materi yang jelas, modal manusia tidak berwujud, diwujudkan dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari oleh individu. Modal sosial juga tidak berwujud, karena diwujudkan dalam relasi dengan orang-orang. Modal fisik dan modal manusia memudahkan aktifitas produksi dan juga modal sosial (Coleman, 2009).

Untuk melihat tingkat modal sosial dalam masyarakat tani di Aceh beberapa hal terkait dengan modal telah dilakukan analisis. Secara terperinci dapat dilihat dalam ulasan berikut ini:

Grafik 4.1: Partisipasi Dalam Organisasi Kemasyarakatan



Sumber: Data Penelitian 2019

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 224 orang responden (75%) menyatakan mereka berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan, sedangkan 76 responden (25%) mereka menyatakan tidak berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian dapat dikatakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan sangat tinggi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan berarti modal sosial dalam masyarakat juga masih tinggi.

Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli antaranya Siti Irene Astuti D, partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan (Astuti, 2011). Adapun organisasi yang pernah diikuti oleh petani dapat dilihat pada grafik berikut:

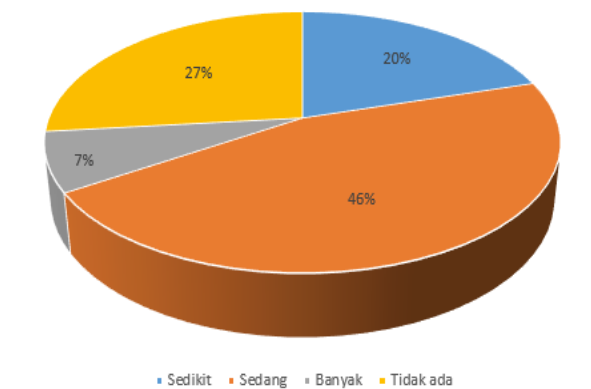
Grafik 4.2: Organisasi yang pernah diikuti



Sumber: Data Penelitian, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa 98 orang responden (32%) menyatakan mereka bergabung dalam organisasi kelompok tani / asosiasi petani, 65 orang responden (21%) menyatakan bergabung dalam organisasi desa, 3 orang responden (1%) bergabung dengan organisasi politik, 55 orang responden (18%) bergabung dalam organisasi sosial keagamaan / paguyuban, sedangkan 79 orang responden (26%) menyatakan tidak bergabung dengan organisasi manapun. Dengan bergabung dengan organisasi tersebut tentunya diharapkan mendapatkan informasi yang bermanfaat terutama terkait dengan usaha tani. Adapaun tingkat informasi yang diperoleh dengan bergabung dalam organisasi yaitu sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.3: Informasi yang diperoleh terkait usaha tani dari organisasi

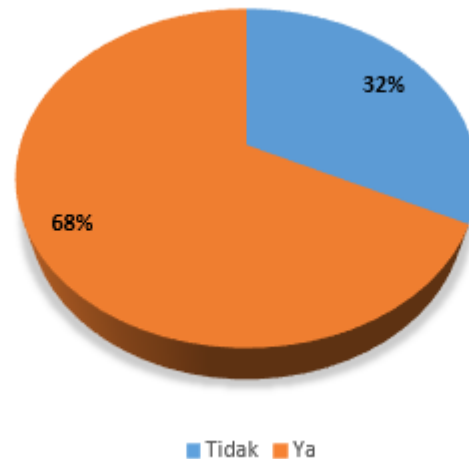


Sumber: Data Penelitian, 2019.

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa 61 orang responden (20%) menyatakan informasi yang diperoleh terkait dengan usaha tani sedikit, 137 orang responden (45%)

menyatakan informasi yang diperoleh terkait dengan usaha tani sedang, 22 orang responden (7%) menyatakan informasi yang diperoleh terkait dengan usaha tani banyak, sedangkan 80 orang responden (26%) menyatakan informasi yang diperoleh terkait dengan usaha tani tidak ada. Selanjutnya untuk melihat gambaran kerjasama individu dengan sesama petani dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.4: Kejasama Individu dengan sesama petani

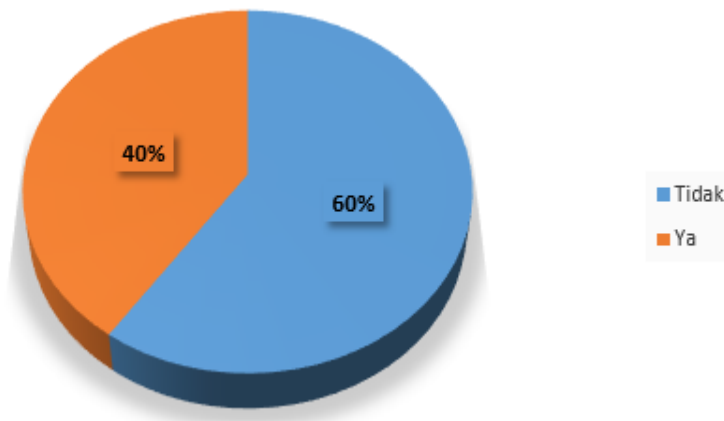


Sumber: Data Penelitian, 2019.

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 203 orang responden (68%) menyatakan bekerjasama sesama petani dalam melakukan usaha tani, sedangkan 97 orang (32%) menyatakan tidak bekerjasama sesama petani dalam melakukan usaha tani. Jika melihat data tersebut modal sosial masyarakat tani terkait kerjasama tergolong tinggi yaitu mencapai 68%. Ini berarti modal modal sosial dari segi kerjasama sudah baik. Selain

kerjasama dengan sesama petani, para petani juga bekerjasama dengan penyedia sarana produksi, hal ini sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.5: Kerjasama Individu dengan Penyedia Sarana Produksi

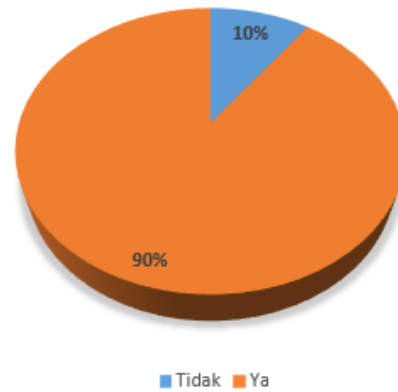


Sumber: Data Penelitian, 2019.

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa 179 orang responden (60%) menyatakan petani di Aceh melakukan kerjasama dengan penyedia jasa produksi, sedangkan 121 orang responden (40%) menyatakan tidak melakukan kerjasama dengan penyedia jasa produksi. Oleh karena dapat dinyatakan bahwa petani di Aceh lebih yang melakukan kerjasama dengan penyedia jasa produksi yaitu mencapai (60%).

Salah satu hal penting dalam modal sosial adalah kepercayaan, untuk melihat tingkat kepercayaan antara petani dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.6: Kepercayaan Antara Sesama Petani



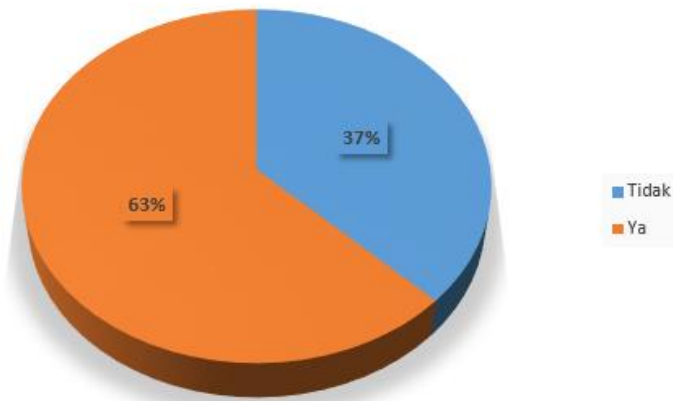
Sumber: Data Penelitian, 2019.

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa 270 orang responden (90%) menyatakan petani di Aceh saling percaya satu sama lain. Sedangkan 30 orang responden (10%) responden menyatakan petani di Aceh tidak percaya satu sama lain. Ini bermakna bahwa tingkat kepercayaan sesama petani di Aceh sangat tinggi yaitu mencapai 90%. Jika melihat hasil penelitian Heliawaty (2015) menyebutkan bahwa kepercayaan, jaringan dan lembaga mempengaruhi perilaku ekonomi, yaitu produksi tanaman kopi. Kepercayaan meningkatkan adopsi teknologi robusta dan potongan kopi arabika sementara ketidakpercayaan menyebabkan pencurian kopi yang masih hijau secara merajalela. Jaringan mempengaruhi harga kopi dan institusi mempengaruhi perilaku petani dalam memperoleh modal usaha.

Oleh karena itu jika merujuk kepada data di atas tingkat modal sosial petani di Aceh terutama terkait dengan Kepercayaan sangat tinggi, dengan demikian diharapkan akses terhadap modal usaha juga semakin mudah karena kepercayaan, jaringan dan lembaga memunyai hubungan satu sama lain dan tentunya

mempengaruhi perilaku ekonomi petani. Untuk mengetahui apakah petani pernah memperoleh pinjaman atau tidak dapat dilihat pada grafik berikut.

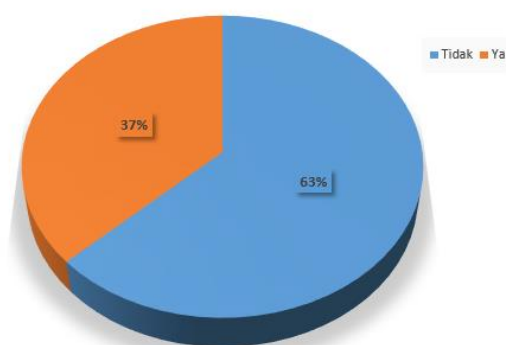
Grafik 4.7: Petani Pernah memperoleh pinjaman dari orang lain



Sumber: Data penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 188 orang responden (63%) menyatakan mereka pernah memperoleh pinjaman dari orang lain, sedangkan 112 orang responden (37%) menyatakan mereka tidak pernah memperoleh pinjaman dari orang lain. Selain itu untuk menguji tingkat kepercayaan para petani di Aceh juga digali informasi apakah mereka pernah memberi pinjaman kepada orang lain. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grfaik 4.8: Apakah anda Pernah Memberi Pinjaman Kepada Orang Lain

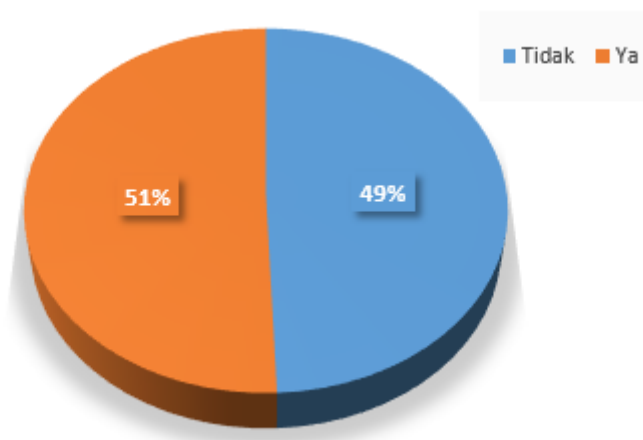


Sumber: Data penelitian 2019

Data tersebut dapat dijelaskan bahwa 189 orang responden (63%) menyatakan bahwa mereka pernah memberi pinjaman kepada orang lain, sedangkan 111 orang responden (37%) menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan pinjaman kepada orang lain.

Selain memberikan pinjaman kepada orang lain, para responden juga digali informasi terkait kepercayaan yaitu apakah mereka pernah menipkan hasil panen kepada orang lain. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

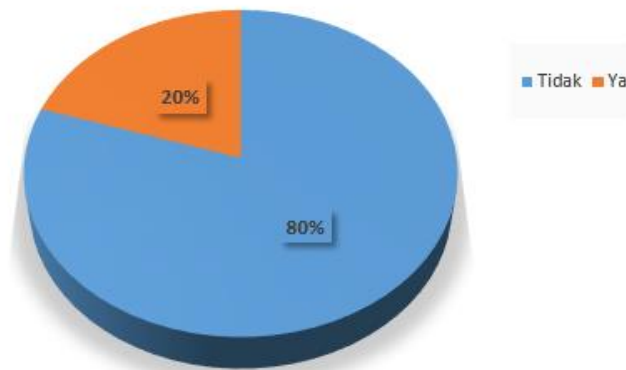
Grafik 4.9: Apakah anda pernah menitipkan hasil panen kepada orang lain



Sumber: Data penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 152 orang responden (51%) petani di Aceh pernah menitipkan hasil panen kepada orang lain untuk dijual ke pasar, sedangkan 148 orang responden (49%) menyatakan tidak pernah menitipkan hasil panen pada orang lain untuk dijual ke pasar. Untuk menguji tingkat kepercayaan satu sama lain perlu juga digali informasi terkait penitipan hasil panen untuk dijual ke pasar, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

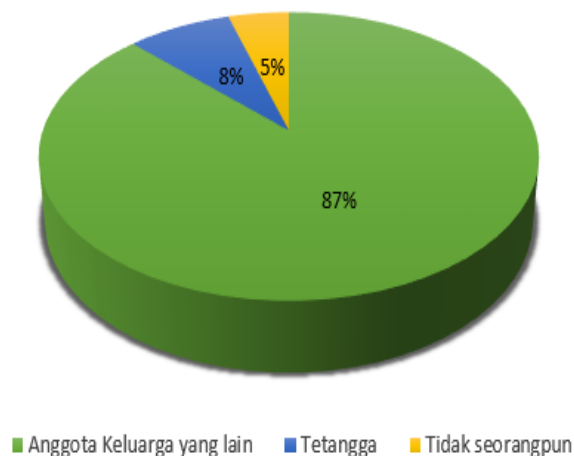
Grafik 4.10: Apakah anda pernah dititipkan hasil panen orang lain untuk dijual



Sumber: Data penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 240 orang responden (80%) menyatakan mereka tidak pernah dititipkan hasil panen orang lain untuk dijual ke pasar, sedangkan 60 orang responden (20%) menyatakan mereka pernah menerima titipan hasil panen orang lain untuk dijual ke pasar. Untuk menjaga harta benda jika harus pergi mendadak siapa yang laing mereka percaya. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

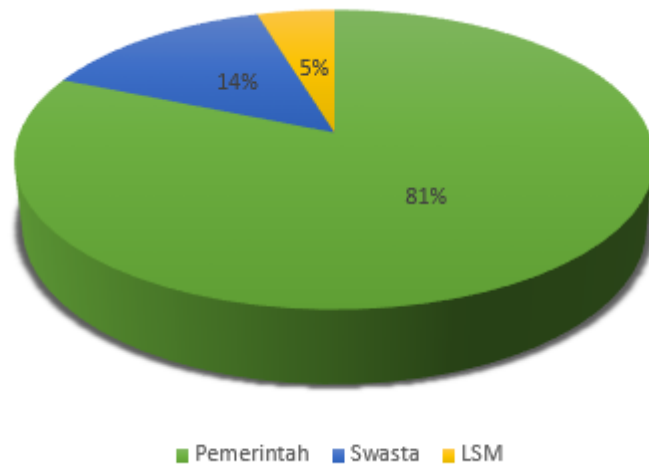
4.11: Jika Mendadak Harus Pergi Siapa Yang Anda Percaya Untuk Menjaga Harta Benda



Sumber: Data penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 262 orang responden (87%) menyatakan jika mendadak harus pergi mereka lebih mempercayai anggota keluarga yang lain untuk menjaga harta benda mereka, 24 orang responden (8%) menyatakan mereka mempercayai tetangga untuk menjaga harta benda mereka jika harus pergi secara mendadak, sedangkan 14 orang responden (5%) mereka tidak mempercayai seorangpun untuk menjaga harta benda mereka jika harus pergi secara mendadak. Sedangkan untuk membangun pertanian di daerah-daerah mereka lebih percaya kepada pemerintah, swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal ini sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

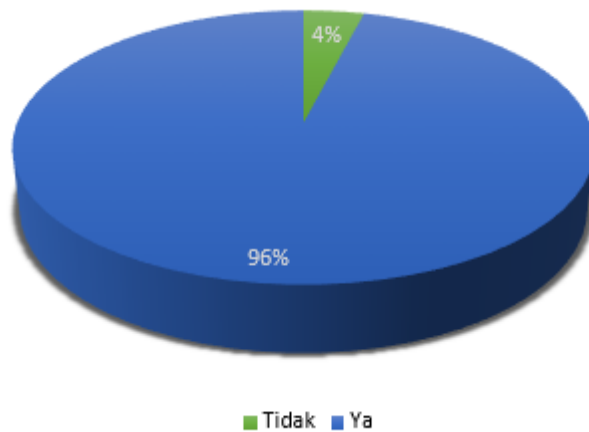
Grafik 4.12: Yang anda percayai untuk membangun pertanian



Sumber: Data penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa sebanyak 244 orang responden (81%) menyatakan bahwa mereka mempercayai pemerintah untuk membangun pertanian, 42 orang responden (14%), mereka mempercayai pihak swasta untuk membangun pertanian, sedangkan sisanya 14 orang responden (5%) mereka lebih percaya kepada LSM untuk membangun pertanian. Walaupun tingkat kepercayaan sesama petani tinggi namun dalam menjalin interaksi sosial tingkat kewaspadaan petani di Aceh sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

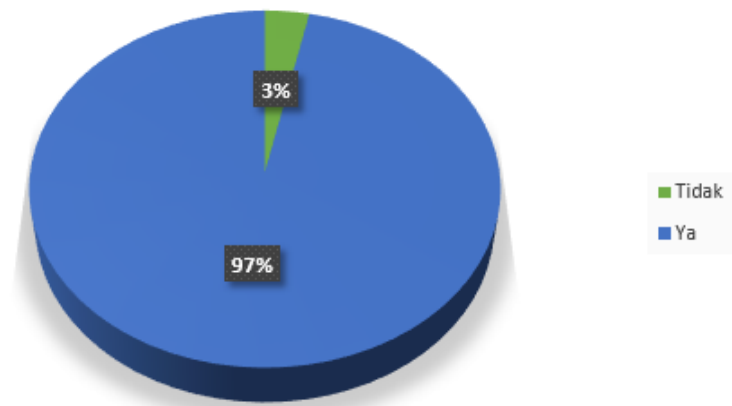
Grafik 4. 13: Apakah Dalam Menjalin Hubungan Anda Selalu Waspada



Sumber: Data penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan 288 orang responden (96%) menyatakan dalam menjalin hubungan mereka selalu waspada, hanya 12 orang responden (4%) yang menyatakan mereka tidak waspada dalam menjalin hubungan dengan sesama masyarakat. Selanjutnya terkait dengan kegiatan gotong royong di Aceh masih tinggi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

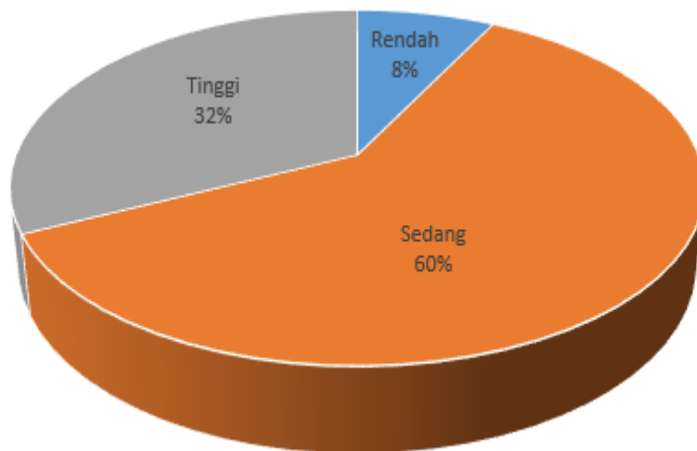
Grafik 4.14: Kegiatan Gotong Royong Masih dilaksanakan di Gampong



Sumber: Data penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 290 orang responden (97%) menyatakan kegiatan gotong royong masih dilaksanakan di gampong, sedangkan 10 rang responden (3%) menyatakan kegiatan gotong royong saat ini sudah tidak dilaksanakan lagi di gampong. Secara umum tingkat interaksi masyarakat baik di warung, di tempat kerja serta dalam kegiatan kemasyarakatan secara umum dapat dikatakan dalam katagori sedang. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.15: Tingkat Interaksi Dalam Masyarakat



Sumber: Data penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 181 orang responden (60%) menyatakan tingkat interaksi dalam masyarakat katagori sedang, 96 orang responden (32%) menyatakan tingkat interaksi dalam masyarakat tinggi, sedangkan 23 orang responden (8%) menyatakan tingkat interaksi dalam masyarakat rendah. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa mayoritas interaksi sosial dalam masyarakat dalam katagori sedang. Data di atas didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya, beliau menyatakan bahwa:

Interaksi sosial masyarakat tani di Aceh sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi interaksi masyarakat tani di desa-desa. Biasanya di desa ada warung-warung kecil yang dijadikan oleh

masyarakat tempat berkumpul dan menukar informasi baik pada saat pagi hari sebelum memulai aktifitas maupun pada sore hari ketika mereka pulang dari aktifitas masing-masing. Petani istirahat sejenak sambil minum kopi sekaligus melepaskan penat setelah sekian jam bekerja di sawah atau di ladang (Wawancara dengan Muzakkir, 18 April 2019)

Interaksi sosial salah satunya melalui komunikasi. Hasil penelitian Shaoling Fu (2018) mengungkapkan bahwa nilai-nilai bersama dan komunikasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas kinerja dan produk pertanian. Oleh karena itu meningkatkan interaksi sosial sesama petani sangat dianjurkan terutama untuk lebih meningkatkan modal sosial petani di masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa modal sosial petani di Aceh dari unsur jaringan, kepercayaan dan aksi kolektif adalah kuat. Namun demikian angka kemiskinan Aceh saat ini masih tinggi mencapai 15,97% (Saifuddin Yunus, *et al.*, 2019). Ini bermakna modal yang kuat tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Aceh.

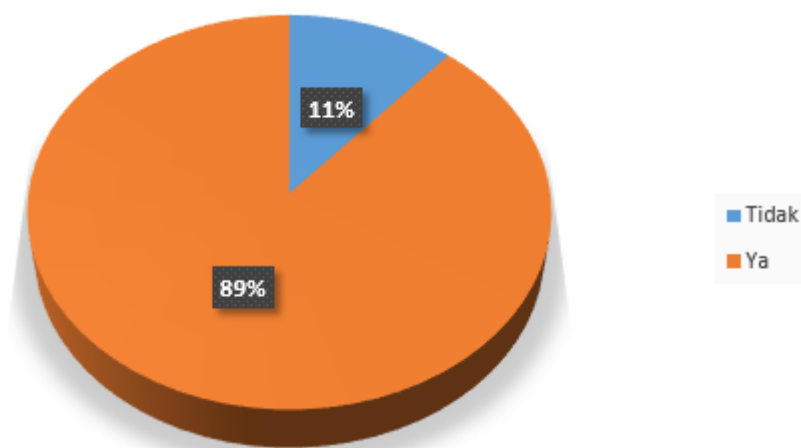
Uraian tersebut di atas memiliki modal sosial dan modal finansial yang baik belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara optimal. Karena masih terdapat aspek lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan petani. Menurut Kepala dinas pertanian Kabupaten Pidie Jaya aspek lain yang sangat penting adalah koordinasi dan sinergisitas antara dinas-dinas dilingkungan pemerintah. Lebih lanjut beliau menjelaskan:

Untuk mengurangi kemiskinan di Aceh memang pekerjaan besar, tidak cukup hanya melibatkan dinas pertanian dan dinas sosial saja, melainkan

semua stakeholder harus duduk bersama memikirkan langkah strategis dan aksi bersama baik pemerintah, akademisi, pihak swasta dan petani. Kalau semua elemen ini berkumpul saya yakin kemiskinan di Aceh dapat ditekan (Wawancara dengan Muzakkir, 18 April 2019).

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat tani dan pengurangan angka kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan modal ekonomi dan modal sosial yang kuat, namun harus didukung oleh faktor lainnya, terutama kerjasama semua stakeholders pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memperkuat argumentasi di atas berikut dijelaskan gambaran partisipasi masyarakat tani jika terjadi musibah.

Grafik 5.16: Partisipasi Masyarakat Jika ada Musibah

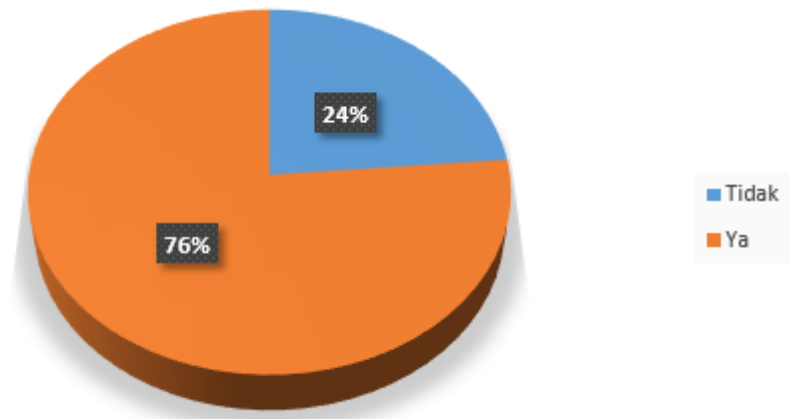


Sumber: Data penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 266 orang responden (89%) menyatakan jika terjadi musibah masyarakat ikut

berpartisipasi (membantu) sementara 34 orang responden (11%) menyatakan tidak membantu. Selanjutnya apakah petani di Aceh lebih mementingkan kesejahteraan keluarga sendiri daripada kesejahteraan masyarakat umum, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

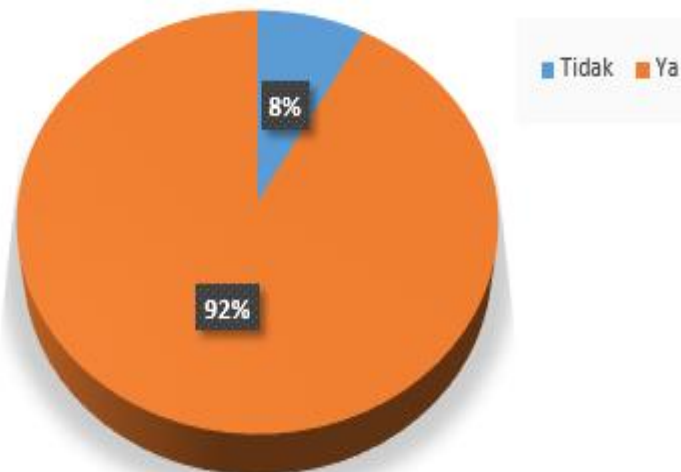
Grafik 4.17: Petani Lebih Mementingkan Kesejahteraan Keluarga Sendiri Daripada Kesejahteraan Masyarakat Umum



Sumber: Data penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 229 orang responden (76%) menyatakan setuju bahwa petani di Aceh lebih mementingkan kesejahteraan keluarga sendiri daripada kesejahteraan masyarakat secara umum, sedangkan 71 orang responden (24%) menyatakan tidak setuju dikatakan petani di Aceh lebih mementingkan kesejahteraan keluarga sendiri daripada kesejahteraan masyarakat secara umum. Selanjutnya apakah petani di Aceh akan mengorbankan waktu untuk kegiatan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan berikut.

Grafik 4.18: Apakah Anda Akan Mengorbankan Waktu Untuk Kegiatan Kemasyarakatan

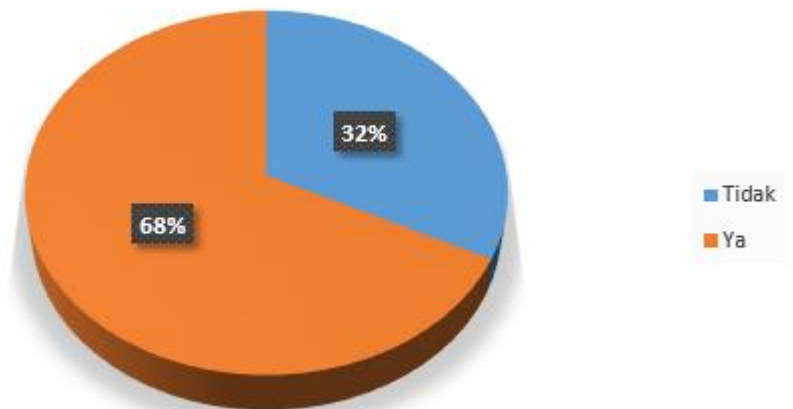


Sumber: Data penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 276 orang responden (91%) menyatakan setuju (ya) jika ada satu kegiatan umum yang secara langsung tidak bermanfaat kepada mereka tetapi bermanfaat untuk orang lain, mereka akan mengorbankan waktu untuk kegiatan tersebut, sementara 24 orang responden (8%) menyatakan tidak akan mengorbankan waktu untuk kegiatan tersebut, jika kegiatan tersebut tidak bermanfaat secara langsung kepada mereka.

Terkait dengan hal tersebut di atas dalam penelitian ini juga menggali informasi mengenai apakah petani di Aceh akan mengorbankan uang untuk kegiatan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.19: Apakah anda akan mengorbankan uang untuk kegiatan kemasyarakatan



Sumber: Data penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 203 orang responden (68%) menyatakan setuju (ya) jika ada satu kegiatan umum yang secara langsung tidak bermanfaat kepada mereka tetapi bermanfaat untuk orang lain, mereka akan mengorbankan uang untuk kegiatan tersebut, sementara 97 orang responden (32%) menyatakan tidak akan mengorbankan uang untuk kegiatan tersebut, jika kegiatan tersebut tidak bermanfaat secara langsung kepada mereka.

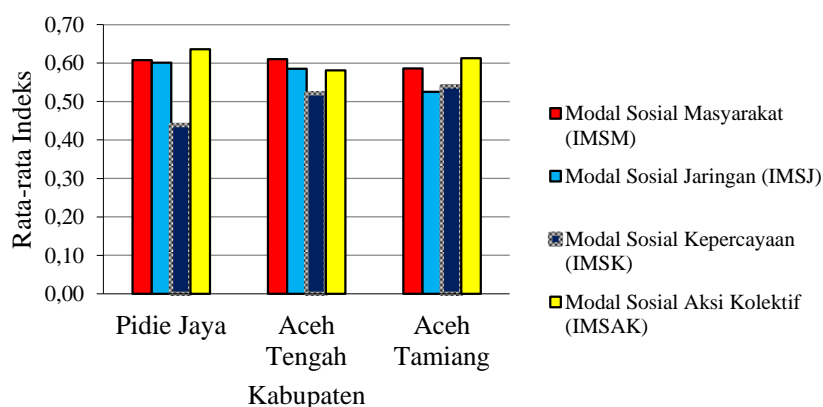
4. 2 Stok Modal Sosial Petani di Aceh

Modal sosial masyarakat yang tinggi dicirikan oleh adanya rasa saling percaya antar masyarakat, tingginya kerapatan jaringan kerja, interaksi sosial antar masyarakat kuat, adanya pertukaran informasi yang bermanfaat, intensitas kerjasama yang tinggi, serta

kepatuhan terhadap norma dan nilai-nilai bersama untuk mewujudkan harapan bersama dan juga berkurangnya sifat oportunistik individu. Modal sosial akan mendorong terjadinya suatu proses pembangunan yang beretika dan bermoral yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan melalui distribusi pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang mempunyai tujuan untuk kebaikan bersama, tingkat toleransi dan tingkat kriminalitas juga merupakan indikator modal sosial dalam suatu masyarakat (Stone 2001).

Stok modal sosial masyarakat petani di tiga kabupaten tidak memiliki perbedaan yang signifikan, terutama antara Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Tengah. Stok modal social masyarakat yang paling rendah yaitu di Kabupaten Aceh Tamiang. Begitu juga dengan modal sosial struktural yaitu keterlibatan masyarakat dalam jaringan sosial seperti bergabung dalam kelompok tani, organisasi keagamaan dan juga sebagai anggota partai politik tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Keterlibatan masyarakat dalam jaringan sosial sebagai elemen modal sosial struktural untuk Kabupaten Aceh Tamiang adalah yang terkecil. Perbedaan elemen modal social yang relative besar pada ketiga kabupaten tersebut yaitu pada unsur kognitif (Tingkat Kepercayaan). Pidie Jaya adalah kabupaten yang paling rendah modal sosial kognitif ini, kemudian disusul Kabupaten Aceh Tengah. Stok modal sosial dimensi kognitif yang paling tinggi yaitu pada masyarakat petani di Kabupaten Aceh Tamiang. Tinggi rendahnya tingkat modal sosial tersebut tentunya berkaitan dengan perbedaan tingkat rasa percaya, kerjasama, interaksi sosial masyarakat dan lain sebagainya di masing-masing Kabupaten.

Grafik 4.20: Rata-rata indeks modal sosial masyarakat dan komponen lain di tiap Kabupaten di Aceh



Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Komponen modal sosial struktural yang merupakan unsur pembentuk modal sosial struktural yaitu keterlibatan masyarakat di dalam jaringan dan asosiasi lokal dijadikan ukuran untuk mengukur proses interaksi sosial. Interaksi sosial dalam kapital sosial sangat penting, karena kapital sosial itu selalu dilihat dalam hubungannya dengan kegiatan bersama, kelompok atau jaringan, dimana interaksi sosial merupakan media yang paling utama. Interaksi sosial di dalam masyarakat dilihat dari adanya tindakan sosial yang dilakukan secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama yang dibatasi oleh institusi tertentu sehingga nilai dan normanya jelas dan hubungan yang terkandung didalamnya jelas pula (Lawang 2004).

Oleh karena itu, dimensi struktural memfasilitasi masyarakat untuk melakukan aksi kolektif (*output dari modal sosial*). Komponen modal sosial struktural di Kabupaten Pidie Jaya yang paling tinggi, walaupun tidak berbeda jauh dengan Kabupaten Aceh Tengah. Secara

agregat temuan ini dapat dijelaskan bahwa derajat interaksi sosial di Kabupaten Pidie Jaya lebih tinggi dibandingkan dengan di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tamiang.

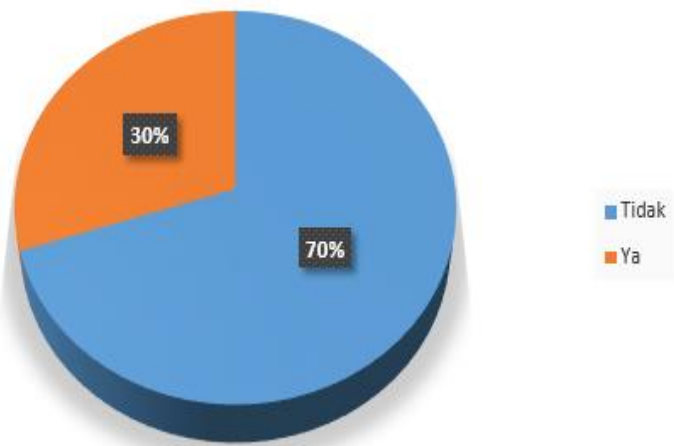
Berbeda dari dimensi struktural, dimensi kognitif (tingkat Kepercayaan) dari modal sosial yaitu berfungsi dalam menggerakkan dan menuntun aksi kolektif yang dilakukan masyarakat agar tercapai manfaat bersama. Indikator Pendekatan terhadap dimensi kognitif dari modal sosial adalah kepercayaan dan ketaatan atas norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Dimensi kognitif dari modal sosial masyarakat secara agregat tertinggi juga di Kabupaten Pidie Jaya dan terendah di Kabupaten Aceh Tamiang. Temuan di atas menggambarkan bahwa modal sosial masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya yang terbentuk dari jaringan kerja dengan keterlibatan anggota rumah tangga dalam asosiasi lokal dapat menggerakkan dan menuntun aksi kolektif masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Indikator aksi kolektif merupakan variabel untuk mengukur keluaran (*output*) dari modal sosial masyarakat. Aksi kolektif hanya akan terjadi jika terdapat modal sosial yang signifikan di suatu wilayah atau daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum aksi kolektif di Kabupaten Pidie Jaya berbeda dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tamiang. Aksi kolektif masyarakat yang paling tinggi yaitu di Kabupaten Aceh Tamiang dan yang paling rendah justru berada pada masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat ketidak selarasan antara modal social komponen structural dan kognitif dengan komponen aksi kolektif. Seharusnya komponen aksi kolektif lebih tinggi di Kabupaten Pidie Jaya dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa komponen modal social structural dan kognitif yang terbentuk di masyarakat Kabupaten Pidie Jaya belum mampu mendorong masyarakat Pidie Jaya untuk bekerja Bersama dalam mencapai tujuan mereka.

4.3 Hubungan Modal Sosial Dengan Kemiskinan

Sebelum membahas hubungan modal sosial dengan kemiskinan terlebih dahulu pada bagian ini diawali dengan penyebab kemiskinan yang merupakan salah satu kelemahan dalam pertanian di Indonesia hari dan hal itu harus diperbaiki, yaitu; (1) Pengelolaan pasca panen rendah; (2) Infrastruktur kurang; (3) Lahan sempit; (4) Modal tidak mencukupi; (5) Pendidikan rendah; (6) Penguasaan teknologi kurang; (7) Ketrampilan rendah; dan (8) Mental malas. Terkait dengan hal tersebut berikut akan diuraikan satu persatu secara terperinci mulai point 1 hingga 8 sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4. 21: Pengelohan Pasca Panen



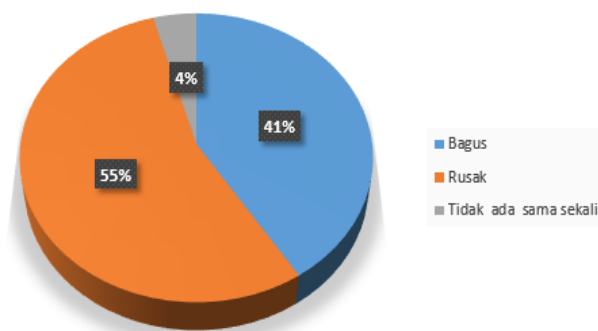
Sumber: Data Penelitian, 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 210 orang responden (70%) menyatakan mereka melakukan pengolahan pasca

panen, dan 90 orang responden (30%) menyatakan mereka tidak melakukan pengolahan pasca panen. Jika satu produk hasil pertanian langsung dijual ke pasar tanpa pengolahan tentu harganya akan berbeda dengan hasil pertanian yang diolah terlebih dahulu baru di jual ke pasar. Yang terjadi di Aceh ternyata mayoritas petani (70%) tidak mengolah hasil pertanian terlebih dahulu dan langsung menjual kepasar. Hal ini tentu berdampak pada rendahnya penghasilan yang didapat oleh petani tersebut. Jika dianalisis lebih mendalam ditemukan banyak penyebab kenapa kemudian hasil panennya tidak diolah terlebih dahulu, misalnya tidak memiliki alat atau keterbatasan teknologi, pengetahuan tentang pertanian yang rendah serta infrastruktur ke lokasi pertanian yang tidak memadai.

Untuk mendongkrak harga pertanian supaya bernilai saing, maka infrastruktur ke lokasi pertanian merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Untuk mengetahui kondisi infrastruktur ke lokasi pertanian di Aceh dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.22: Infrastruktur ke Lokasi pertanian

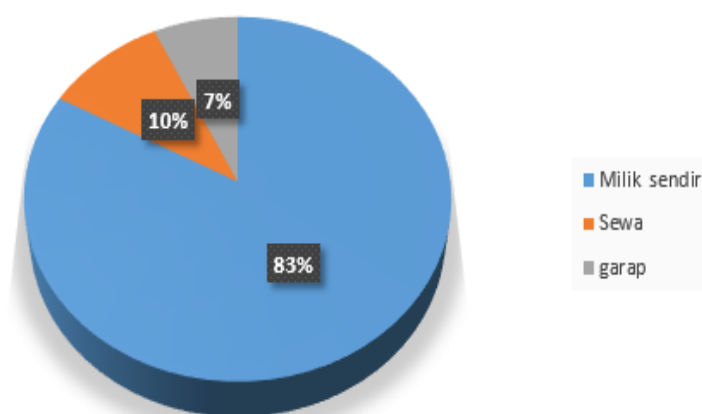


Sumber: Data Penelitian, 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 164 orang responden (55%) menyatakan infrastruktur ke lokasi pertanian rusak, 123 orang responden (41%) menyatakan infrastruktur ke lokasi pertanian bagus, dan 13 orang responden (4%) menyatakan infrastruktur ke lokasi pertanian tidak ada sama sekali. Data tersebut menggambarkan bahwa kondisi infrastruktur ke lokasi penelitian (53%) rusak, ini artinya persentase tingkat kerusakan infrastruktur ke lokasi penelitian lebih banyak yang rusak dari pada yang berkondisi baik bahkan (4%) responden menyatakan infrastruktur ke lokasi pertanian tidak ada sama sekali. Infrastruktur yang rusak ke lokasi pertanian seperti tentunya berdampak kepada ongkos angkut hasil panen sehingga pada akhirnya berdampak pada rendahnya penghasilan petani.

Seterusnya dapat dijelaskan terkait status lahan petani di Aceh, mayoritas petani di Aceh memiliki lahan sendiri. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada grafik tersebut.

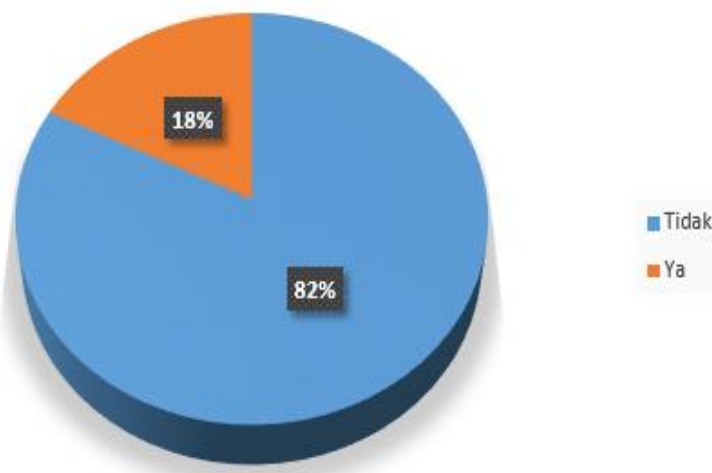
Grafik 4.23: Status lahan dan luas lahan



Sumber: Data Penelitian, 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 249 orang responden (83%) menyatakan mereka memiliki lahan pertanian sendiri, 30 orang responden (10%) menyatakan lahan sewa dan 21 orang responden (7%) menyatakan lahan garapan, dengan rata-rata luas lahan pertanian adalah 1.56 hektar. Jika petani mempunyai lahan sendiri dan modal yang cukup, maka petani tersebut akan sejahtera. Namun pertanyaan kemudian apakah petani yang memiliki lahan sendiri tersebut memiliki modal usaha yang cukup?. Jawabannya adalah tidak, mereka memiliki modal yang tidak memadai. Oleh karena itu untuk mengolah hasil pertanian secara maksimal pasti terkendala karena modal terbatas yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kesejahteraan mereka. Untuk lebih jelas mengenai hal tersebut berikut dijelaskan ketersediaan modal usaha petani di Aceh.

Grafik 4.24: Apakah Ketersediaan Modal Usaha memadai

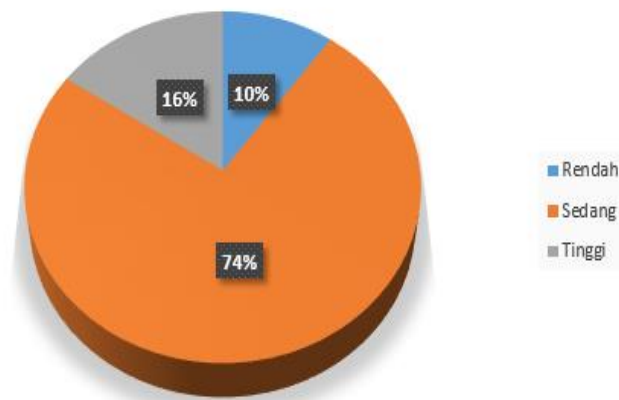


Sumber: Data Penelitian, 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 247 orang responden (82%) menyatakan modal usaha yang ada tidak memadai, sedangkan 53 orang responden (18%) menyatakan modal usaha yang ada sudah memadai. Data tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas petani Aceh mengalami masalah di bidang permodalan. Modal yang tidak memadai tentunya berpengaruh pada tingkat produktifitas kerja, yang kemudian berpengaruh pula pada hasil pertanian. Akhirnya akibat modal usaha yang tidak memadai petani di Aceh terus berada dalam lingkaran kemiskinan, walaupun separuh waktu dalam hidup mereka telah dihabiskan untuk bertani, akibat modal yang minim mereka tidak bisa menikmati kesejahteraan sebagaimana yang didambakan.

Selain modal usaha pengetahuan tentang pertanian juga menentukan keberhasilan seorang disektor pertanian. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan petani di Aceh di bidang pertanian dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.25: Pengetahuan Tentang Pertanian

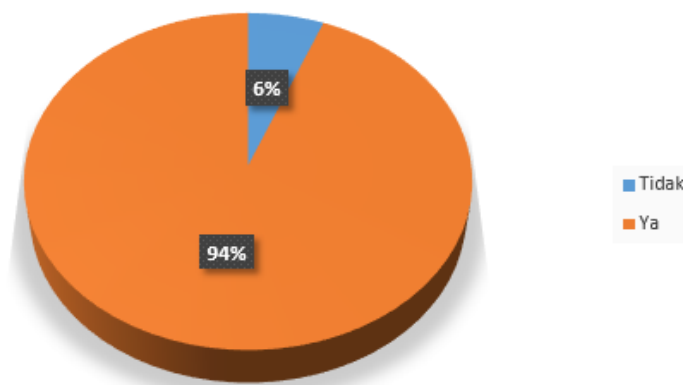


Sumber: Data Penelitian, 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 223 orang responden (74%) menyatakan pengetahuan tentang pertanian adalah sedang, 47 orang responden (16%) menyatakan pengetahuan tentang pertanian adalah tinggi dan 30 orang responden (10%) menyatakan pengetahuan tentang pertanian adalah rendah. Pengetahuan tentang pertanian bisa diperoleh dari pelatihan / peyuluhan bisa juga dari pengalaman mereka selama bertahun-tahun bekerja sebagai petani. Kedua hal tersebut diakumulasi menjadi sumber daya petani yang dimaknai sebagai pengetahuan dalam bidang pertanian. Dari hasil penelitian di dapati bahwa tingkat pengetahuan petani di Aceh dominan pada katagori sedang yaitu mencapai 74%.

Selain pengetahuan tentang pertanian, penguasaan teknologi pertanian juga penting untuk mendukung kesejahteraan petani. Untuk mengetahui tingkat penguasaan teknologi pertanian di Aceh dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.26: Penguasaan teknologi



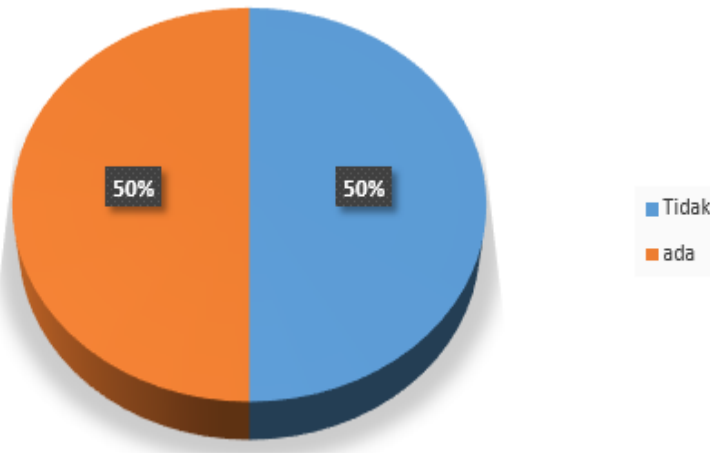
Sumber: Data Penelitian, 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 282 orang responden (94%) menyatakan mereka menguasai teknologi pertanian, sedangkan 18 orang responden (6%) menyatakan mereka tidak menguasai teknologi pertanian. Teknologi di bidang pertanian yang berkembang begitu cepat ternyata mendapat respon yang positif di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 94% petani menguasai teknologi pertanian.

Penguasaan teknologi dalam kajian ini dimaknai dengan memahami perkembangan teknologi di bidang pertanian, artinya petani tidak mesti memiliki teknologi pertanian sendiri. Ketika mereka memahami teknologi tentunya mereka menggunakan teknologi tersebut baik ketika penggarapan, ketika panen dan pasca panen. Misalnya untuk mobil pembajak sawah dan mesin pemotong padi, mereka yang sudah mengerti kelebihan teknologi tersebut bisa menyewakan mobil / mesin pemotong padi tersebut untuk mempermudah dan mempercepat kerja mereka di bidang pertanian. Dengan demikian kelahiran teknologi terbaru di bidang pertanian juga dirasakan manfaatnya oleh petani, setidaknya untuk mempermudah dan mempercepat kerja-kerja petani diberbagai wilayah.

Untuk menambah ekonomi keluarga dan kesejahteraan dalam rumah tangga biasanya petani bekerja ekstra atau kerja tambahan. Jika memiliki ketrampilan selain bertani tentunya mereka berpeluang untuk kerja tambahan dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga. Untuk kasus petani di Aceh antara yang memiliki ketrampilan selain bertani dengan yang tidak memiliki ketrampilan persentasenya sama (50% : 50%), hal ini sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.27: Ketrampilan Selain bertani



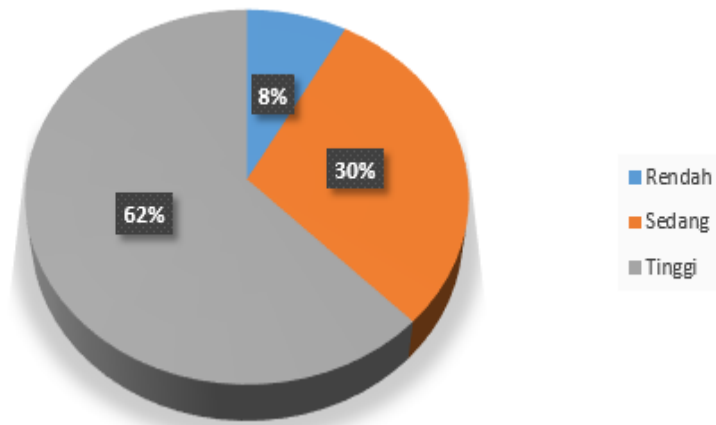
Sumber: Data penelitian 2019

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa 150 orang responden (50%) mereka memiliki skil selain bertani sedangkan 150 orang responden (50%) lagi menyatakan mereka tidak memiliki skil selain bertani. Kondisi tersebut dapat dipahami bahwa jumlah petani yang memiliki skil selain bertani dengan yang tidak memiliki skil adalah sama (50:50).

Bagi yang memiliki skil asal mereka memiliki kemauan dan semangat kerja tinggi tentunya bisa bekerja sambilan untuk meningkatkan penghasilan dan ekonomi keluarga. Bagi yang tidak memiliki skil namun memiliki semangat kerja yang tinggi juga memungkinkan untuk meningkatkan penghasilan dan ekonomi keluarga, karena skil itu bisa dipelajari dan ditempa. Oleh karena

itu semangat kerja merupakan salah satu aspek penting dalam menghantarkan kesuksesan bagi seorang petani. Selanjutnya terkait semangat kerja petani di Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut.

Grafik 4.28: Semangat Bekerja.



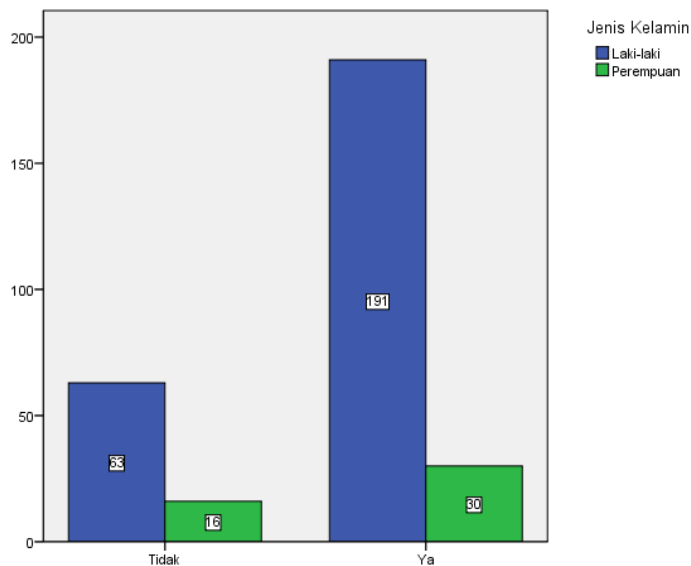
Sumber: Data penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa 187 orang responden (62%) menyatakan semangat bekerja tinggi, 89 orang responden (30%) menyatakan semangat bekerja sedang dan 24 orang responden (8%) menyatakan semangat beerja rendah. Ini bermakna bahwa petani di Aceh lebih banyak yang bersemangat dalam bekerja dibandingkan yang tidak bersemangat. Jika hal ini dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya maka jelaslah bahwa asal memiliki semangat kerja yang tinggi walaupun tidak memiliki skill selain bertani namun berpeluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan penghasilan dalam rumah tangga. Begitu juga sebaliknya jika memiliki skill namun semangat

kerja rendah tentu sulit untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan mensejahterakan keluarga.

Pada penjelasan berikutnya akan dijelaskan mengenai partisipasi anggota keluarga dalam organisasi kemasyarakatan menurut jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki lebih dominan berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan dibandingkan dengan perempuan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan grafik berikut.

Grafik 4.29: Partisipasi anggota keluarga dalam organisasi kemasyarakatan menurut jenis kelamin



Sumber: Data Penelitian 2019

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa laki-laki lebih dominan dalam berpartisipasi anggota keluarga dalam kegiatan kemasyarakatan yaitu mencapai 191 orang responden yang menyatakan mereka responden laki-laki berpartisipasi dalam

kegiatan kemasyarakatan, sementara perempuan hanya 30 prang responden yang berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Untuk melihat hubungan antara pendapatan dengan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1: Hubungan Jenis kelamin dengan pendapatan

		Correlations	
		Jenis Kelamin	Pendapatan perbulan Rp
Jenis Kelamin	Pearson Correlation	1	-.150**
	Sig. (2-tailed)		.009
	N	300	300
Pendapatan perbulan Rp	Pearson Correlation	-.150**	1
	Sig. (2-tailed)	.009	
	N	300	300

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat korelasi / hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pendapatan perbulan yaitu pada level 0.01.

4.4 Hubungan Stok Modal Sosial Masyarakat dan Tingkat Kemiskinan

Indeks Modal Sosial Masyarakat (IMSM) yang diukur dari nilai indeks menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dimana p-value hasil uji lebih kecil dari 0,05 (derajat pembatasan). Nilai mean rank untuk masyarakat petani yang termasuk dalam katagori tidak miskin lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang miskin. Begitu juga dengan komponen modal sosial jaringan (structural) dan aksi kolektif, kedua komponen modal sosial tersebut

modal social masyarakat secara umum yaitu berbeda secara signifikan. Nilai mean rank dari kedua komponen tersebut lebih tinggi pada masyarakat petani yang termasuk katagori tidak miskin. Akan tetapi untuk komponen modal social kepercayaan walaupun nilai mean ranknya lebih tinggi pada masyarakat petani yang katagori tidak miskin dibandingkan pada masyarakat petani yang termasuk dalam katagori miskin namun perbedaannya tidak signifikan pada tingkat derajat kebebasannya 0,05, sedangkang jika derajat kebebasannya kurang dari 10% atau 0,1, maka modal sosial komponen aksi kolektif ini juga berbeda secara signifikan. Untuk lebih jelas lihat tabel berikut

Tabel 4.2: Hasil Uji Beda Indeks Modal Sosial Masyarakat Berdasarkan Status Kemiskinan

No	Variabel Modal Sosial	Mean Rank		P-value
		Tidak Miskin	Miskin	
1.	Indeks Modal Sosial Masyarakat (IMSM)	163,02	135,61	0.006
2.	Indeks Modal Sosial Jaringan (IMSJ)	159,75	139,49	0.043
3.	Indeks Modal Sosial Kepercayaan (IMSK)	158,70	140,74	0.062
4.	Indeks Modal Sosial Aksi Kolektif (IMSAK)	159,16	140,19	0.054

Selanjutnya, hasil uji korelasi menunjukkan bahwa secara agregat modal sosial masyarakat diseluruh kabupaten dan komponen modal sosial jaringan sebagai komponen struktural, komponen modal

sosial kepercayaan untuk komponen kognitif dan komponen aksi kolektif berkorelasi positif dan signifikan dengan indeks kemiskinan petani. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jika modal social masyarakat petani meningkat, maka indeks kemiskinan juga meningkat artinya tingkat kemiskinan akan berkurang. Namun demikian jika dilihat dari tingkat korelasi, maka antara modal social dan kemiskinan tersebut tidak begitu kuat. Dimensi aksi kolektif memiliki tingkat korelasi yang lebih besar dibandingkan dengan dimensi jaringan dan kepercayaan. Tingginya derajat korelasi komponen aksi kolektif tentu mempermudah masyarakat untuk memperoleh bantuan dari pihak luar untuk lebih cepat membangun desa dan pertanian mereka. Untuk lebih jelas lihat tabel berikut.

Tabel 4.3: Hasil Uji Korelasi Spearman Antara Modal Sosial Masyarakat dengan Kemiskinan.

No	Variabel Modal Sosial	Koefisien Korelasi	P-value. (2-tailed)
1.	Indeks Modal Sosial Masyarakat (IMSM)	0.187	0.001
2.	Indeks Modal Sosial Jaringan (IMSJ)	0.123	0.034
3.	Indeks Modal Sosial Kepercayaan (IMSK)	0.122	0.035
4.	Indeks Modal Sosial Aksi Kolektif (IMSAK)	0.175	0.002

Hasil uji korelasi tersebut memperkuat hasil uji beda antara modal sosial masyarakat pada rumah tangga petani yang tidak miskin dengan modal sosial masyarakat pada rumah tangga petani yang miskin. Modal sosial masyarakat yang lebih tinggi memiliki peluang membangun semakin besar. Keterlibatan anggota di dalam jaringan

organisasi terutama asosiasi lokal yang dimasuki kepala atau anggota rumah tangga akan menghasilkan proses, kualitas dan kuantitas interaksi sosial masyarakat lebih berkembang.

Demikian juga dengan kepercayaan. Kepercayaan menjadi modal bagi masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak-pihak luar yang akan membantu mengembangkan usaha-usaha khususnya usahatani mereka. Aksi kolektif yang dilakukan masyarakat seperti partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan pertanian juga mendorong para pemberi bantuan untuk mengalokasikan program kerja mereka ke wilayah tersebut. Selain itu, kegiatan yang dilakukan secara kolektif dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai usahatani bagi setiap keluarga.

Pendapatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Investasi dari modal sosial terbukti memberikan kemudahan tersebut. Makin tinggi modal sosial masyarakat makin tinggi pula peluangnya meningkatkan pendapatannya. Proses, kualitas dan kuantitas interaksi sosial yang lebih baik yang dilakukan masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kerjasama dan membangun kepercayaan. Begitu juga dengan intensitas dalam melakukan aksi kolektif, membangun kerjasama dan saling percaya antar sesama masyarakat di dalam komunitas akan menumbuhkan nilai-nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan inilah yang menjadi modal bagi masyarakat untuk lebih mudah akses terhadap bantuan-bantuan untuk membiayai usaha tani.

4.5 Penyebab Tinggi atau Rendahnya Modal Sosial Dalam Masyarakat

Banyak faktor yang menyebabkan petani miskin, antara lain rendahnya kepemilikan lahan dan produktivitas lahan sehingga berdampak pada pendapatan petani yang rendah juga. Rendahnya kepemilikan lahan adalah salah satu penyebab para petani tak pernah bisa hidup makmur. Hingga saat ini para petani di Indonesia rata-rata hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar. Terutama para petani di Pulau Jawa (Dji, 2017). Kondisi ini menyebabkan petani sulit untuk mengusahakan lahan sendiri pada tingkat yang menguntungkan. Kondisi ini juga terjadi pada masyarakat tani di Aceh. Hal wawancara peneliti dengan salah seorang informan mendapati hal sebagai berikut:

Penyebab tinggi atau rendahnya modal sosial di dalam masyarakat disebabkan petani tidak punya lahan sendiri, kebanyakan petani bekerja pada lahan orang lain. Saat ini di Aceh Tamiang misalnya terdapat 2.858 orang petani dengan status buruh tani. Mereka bekerja pada lahan orang lain dan tidak memiliki lahan sendiri (Wawancara dengan Pak Yunus, Kadis Pertanian dan Peternakan Aceh Tamiang, 14 Juli 2020).

Dari data di atas dapat dipahami bahwa masalah besar yang dihadapi petani hari ini di Aceh, terutama di Aceh Tamiang adalah rendahnya kepemilikan lahan sendiri. Bahkan mereka bekerja sepanjang waktu sebagai buruh tani tanpa memiliki lahan sendiri. Kondisi ini membuat petani tidak bisa bangkit dan terjebak dalam kemiskinan yang permanen.

Masalah lain yang dihadapi petani adalah sebagian besar petani belum memiliki ketrampilan pertanian yang memadai, karena

sebagian besar petani berpendidikan rendah. Keterbatasan ketrampilan, dan pendidikan yang kurang memadai membuat para petani kesulitan mengadopsi teknologi pertanian yang baru. Padahal perkembangan dunia pertanian sekarang ini sangat tergantung dengan penguasaan teknologi. Di Aceh Tamiang misalnya petani bawang dan cabe masih menggunakan cara tradisional dalam menggarapa lahan mereka tanpa dibantu oleh teknologi pertanian.

Foto : Kondisi Petani bawang di Aceh Tamiang yang masih menggunakan cara tradisional.



Sumber: Data Penelitian, 2020

Kondisi tersebut memerlukan campur tangan pemerintah secara serius supaya modal sosial petani bisa meningkat. Sebagaimana hasil penelitian tahun 2019 yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa pendidikan petani di Aceh masih rendah, hanya 7% saja yang pernah masuk

perguruan tinggi. Ilmu bertani yang dimiliki oleh petani hari ini kebanyakannya diperoleh secara turun temurun. Bukan melalui pendidikan formal atau pelatihan. Oleh karena itu peran Dinas Pertanian melalui Penyuluh Pertanian lapangan (PPL) sangat diperlukan. Terkait dengan modal sosial petani di Aceh tengah dapat kita lihat hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Modal Sosial Petani di Aceh Tengah tergolong tinggi. Petani di sini lebih tinggi pengetahuan dari penyuluh karena pengetahuan turun temurun sebagai petani kopi. Mereka meyakini bahwa sektor pertanian menjanjikan untuk pemenuhan ekonomi keluarga (Wawancara dengan Nasrun Liwanza, Kadis Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, 26 Agustus 2020).

Dari data di atas dapat dipahami bahwa Aceh Tengah dikenal dengan daerah penghasil kopi. Kopi menjadi produk pertanian andalan di daerah tersebut. Kebanyakan masyarakat tani disana sebagai petani kopi. Oleh karena itu sangat wajar pengetahuan tentang kopi sangat dikuasi oleh masyarakat disana, karena mereka telah menggeluti usaha tersebut secara turun temurun. Pengetahuan tentang cara bertani kopi juga mereka peroleh secara turun temurun. Akan tetapi tidak semua ilmu bertani mereka kuasi, misalnya untuk tanaman jagung dan semangka. Perkembangan dunia pertanian sekarang sangat maju, oleh karena itu petani sangat penting untuk dibekali dengan penguasaan teknologi.

Dalam kelompok sosial modal sosial biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis turun temurun (*repeated social experiences*) dan kesamaan kepercayaan pada

dimensi kebutuhan (*religious beliefs*) cenderung memiliki kohesif tinggi, tetapi rentang jaringan maupun *trust* yang terbangun sangat sempit. Sebaliknya pada kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan serta dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan yang lebih luas. Pada tipologi kelompok kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan serta dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern akan lebih banyak menghadirkan dampak positif bagi kelompok maupun kontribusinya pada pembangunan masyarakat secara luas (Hasbullah, 2006).

Kelompok tani merupakan wadah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupannya yang lebih sejahtera. Masalahnya hari ini yang dihadapi oleh masyarakat tani yang bergabung dalam kelompok tani adalah rendahnya kesadaran anggota kelompok untuk kepentingan bersama. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut:

Salah satu penyebab rendahnya modal sosial di masyarakat adalah kesadaran untuk kepentingan bersama kurang. Misalnya ada bantuan bergulir yang harus dikembalikan, supaya orang lain juga bisa dapat, pengembalian ini yang susah bahkan nyaris tidak ada (Wawancara dengan Rusyd, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya, 4 September 2020).

Dari data di atas dapat dipahami bahwa modal sosial yang terkait dengan kepercayaan (*trust*) sudah tidak ada di masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan di atas pengembalian dana bergilir misalnya, diharapkan semua anggota kelompok bisa mendapatkan secara bergiliran. Namun kenyataannya apabila salah satu anggota kelompok sudah mendapatkan dana tersebut pengembaliannya tidak ada atau langsung macet sehingga menyebabkan anggota yang lain tidak bisa menikmati bantuan tersebut. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama terkait dengan akhlak dan perilaku masyarakat yang harus diperbaiki. Secara umum kehidupan ekonomi masyarakat tani sudah lebih baik sekarang. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut:

Sebetulnya petani kita tidak ada lagi yang miskin absolut, petani sekarang tidak ada yang kelaparan. Mereka bisa makan, bertahan hidup dan bahkan memiliki kendaraan bermotor. Keinginan berkembang dari diri petani sangat tinggi. Apabila mereka melihat petani lain sukses mereka akan ikut. Sebagai contoh di Pidie Jaya dari 100 H bantuan jagung yang dibantu tahun 2014, saat ini tahun 2020 sudah berkembang menjadi 2000 Ha (Wawancara dengan Rusyd, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya, 4 September 2020).

Dari data di atas dapat dipahami bahwa kondisi petani saat ini sudah lebih baik dari dulu. Saat ini petani sudah memiliki kendaraan bermotor untuk pergi ke sawah. Semangat untuk sukses dari diri sendiri sangat tinggi. Motivasi yang kuat dari

dalam diri petani ini mejadi modal paling penting untuk mereka bangkit dan keluar dari kemiskinan.

Secara tidak langsung petani adalah seorang pemimpin dalam mengambil segala keputusan terkait usaha pertaniannya. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Sekarang bukan lagi zaman tukar barang dengan uang lalu permasalahan selesai. Petani sekarang dituntut memiliki kreasi dan menguasai manajemen sehingga hasil produksinya memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan petani bisa sejahtera.

Modal sosial merupakan salah satu modal penting untuk berhasilnya suatu program pembangunan. Tingginya nilai modal sosial yang dimiliki pada suatu daerah dapat membantu petani dalam hal produksi, distribusi dan inovasi. Banyaknya jumlah kelompok tani di daerah pedesaan juga termasuk modal sosial yang berguna untuk lebih cepat tersalurkanya aspirasi petani kepada pihak pemerintah. Modal sosial merupakan rangkaian proses hubungan sosial antara individu maupun antara kelompok yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lain seperti saling percaya guna melakukan kerjasama demi meraih tujuan atau kepentingan bersama.

BAB V

MODAL SOSIAL DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

5.1 Pembangunan dan Pembangunan Pertanian

Pembangunan dan pengembangan sering sekali diartikan sama khususnya dalam membahas pembangunan suatu wilayah. Pada dasarnya pembangunan dan pengembangan memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pembangunan berasal dari kata bangun, bangun artinya beranjak dari posisi duduk ke posisi berdiri atau dari posisi terbaring ke posisi tegak. Berdasarkan arti tersebut pembangunan dapat diartikan sebagai proses menciptakan sesuatu dari posisi yang belum ada ke posisi yang akan ada. Pembangunan yaitu suatu proses menuju kearah yang lebih baik dan berkembang. Sedangkan perkembangan diartikan sebagai proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Easton (1985) mengartikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Dalam proses pembangunan diperlukan input sebagai bahan masukan konservasi. Lalu proses konservasi untuk mengolah bahan input dan terakhir output sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan. Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005), mengatakan pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (1991) mengartikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara

sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Selanjutnya Ginanjar Kartasasmita (1996) menyebutkan pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tikson (2005) Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukannya bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya. Sedangkan pelaksanaannya yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern (Siagian : 1991). Dari defenisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah tercapai secara absolut.

Pembangunan merupakan upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (*society*) atau negara (*state*) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang.

Pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pendapat dari ahli-ahli tersebut jika disimpulkan, arti pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana kearah yang lebih baik.

Tikson (2005) mengemukakan bahwa dalam teori ilmu sosial, pembangunan dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar: 1) modernisasi dan 2) ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995). Paradigma modernisasi mencakup tentang pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan dalam teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*). Dari paradigma tersebut kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Para ahli manajemen menganggap pembangunan sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional. Teori Harrod Domar menekankan bahwa pembangunan masyarakat hanya merupakan masalah penyediaan modal dan investasi, pembangunan tidak lain adalah investasi/invest/ penanaman modal. Rostow menjelaskan proses pembangunan bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Lima tahap pembangunan: a. masyarakat tradisional; b. prakondisi untuk lepas landas; c. lepas landas; d. bergerak ke kedewasaan; e. zaman konsumsi massal yang tinggi.

Teori Dependensi atau Teori Ketergantungan lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara

Dunia Ketiga. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori dependensi lahir karena teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi. Kegagalan modernisasi membawa kemajuan bagi negara dunia ketiga telah menumbuhkan sikap kritis beberapa ilmuwan sosial untuk memberikan suatu teori pembangunan yang baru.

Indikator pengukuran keberhasilan pembangunan dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara. Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Sejumlah indikator, terutama indikator ekonomi yang sering digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula indikator-indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI).

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan

per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Struktur ekonomi telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

Indeks Kualitas Hidup IKH atau Physical Quality of life Index (PQLI) ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya

status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain yaitu Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity*. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan *knowledge*, *attitude* dan *skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

Pembangunan Pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu meningkatkan produksi pertanian, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan. A. T. Mosher di dalam bukunya *Getting Agriculture Moving*, mengatakan bahwa pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral dari pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Secara luas pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga, sosial dan sebagainya demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Pertanian merupakan sektor utama penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat diolah menjadi bahan sandang, pangan, dan papan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan, maka dari itu pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.

Pembangunan pertanian secara umum ditujukan untuk: 1) Meningkatkan Produksi pangan menuju swasembada dan meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan protein, lemak, vitamin, dan mineral, 2) Meningkatkan tingkat hidup petani melalui peningkatan penghasilan petani, 3) Memperluas lapangan kerja disektor pertanian dalam rangka perataan pendapatan, 4) Meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi impor hasil pertanian, 5) Meningkatkan dukungan yang kuat terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi, 6) Memanfaatkan dan memelihara kelestarian sumber alam, serta memelihara dan memperbaiki lingkungan hidup, 7) Meningkatkan pertumbuhan pembangunan pedesaan secara terpadu dan serasi dalam kerangka pembangunan daerah. Pembangunan pertanian yang merupakan bagian dari pembangunan

ekonomi harus selalu diarahkan agar dapat tercapainya tujuan akhir tersebut.

Pembangunan pertanian dapat ditingkatkan melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi. Intensifikasi adalah upaya peningkatan produktivitas sumberdaya alam seperti peningkatan penggunaan lahan kering, perairan dan area pasang surut serta pemanfaatan sarana produksi, pestisida, pupuk, air, dan lain-lain. Ekstensifikasi adalah usaha untuk memperluas sumberdaya alam seperti memperluas area panen baik tanaman pangan atau tanaman perkebunan, perluasan area tangkapan ikan, perluasan penanaman rumput untuk pakan ternak, serta memperluas sumberdaya lainnya.

Diversifikasi dilakukan sebagai upaya menciptakan keanekaragaman dalam melakukan usaha tani baik secara vertikal mulai kegiatan produksi hingga pemasaran, maupun horizontal yakni merupakan penyeimbangan antara komoditas dan wilayah. Diversifikasi juga dapat diterapkan dalam pemilihan lokasi pembangunan pertanian sehingga terjadi keseimbangan antara provinsi maju dan provinsi kurang maju. Rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan atau mengembalikan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian yang rusak atau kritis serta membahayakan kondisi lingkungan. Serta memulihkan kemampuan produktivitas usaha tani di daerah rawan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk melaksanakan pembangunan pertanian diperlukan beberapa syarat yaitu adanya pasaran hasil produksi pertanian, teknologi baru, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, perangsang produksi bagi petani, dan pengangkutan. Salah satu tujuan dari pembangunan pertanian adalah meningkatkan produksi pertanian, untuk itu dibutuhkan pasaran dengan harga yang cukup tinggi untuk memasarkan hasil produksi

tersebut guna mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan petani dalam menjalankan usaha taninya serta meningkatkan pendapatan petani.

Pembangunan pertanian akan berhenti tanpa diikuti dengan perkembangan ilmu dan teknologi baru seperti penelitian, balai-balai percobaan pemerintah, masalah-masalah yang seharusnya dipelajari, program penelitian, dan pelatihan. Pertumbuhan pembangunan pertanian akan cepat dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi baru yang dapat mendukung kegiatan pertanian agar dapat meningkatkan produksi pertanian. Dalam menerapkan ilmu dan teknologi baru di bidang pertanian perlu adanya alat-alat dan bahan-bahan untuk mendukung penerapan ilmu dan teknologi baru tersebut, alat dan bahan yang digunakan harus dapat memberikan hasil produksi pertanian yang lebih tinggi dan mudah didapatkan oleh petani.

Selain teknologi baru dan bahan atau alat pertanian Petani juga membutuhkan perangsang agar lebih semangat dalam menjalankan usaha taninya seperti kebijaksanaan harga, pembagian hasil, tersedianya barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan keluarga petani, pendidikan atau penyuluhan pertanian, dan penghargaan masyarakat khususnya petani terhadap prestasi. Di dalam pembangunan pertanian perlu adanya sarana pengangkutan yang murah dan efisien agar produksi pertanian dapat tersebar luas secara efektif.

Paradigma pembangunan pertanian ke depan adalah pertanian berkelanjutan yang berada dalam lingkup pembangunan manusia, yang bertumpu pada peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan harus memadukan tiga tujuan, sebagaimana dikatakan oleh Gold dalam Mardikanto (2009), yaitu mengamankan lingkungan, menguntungkan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk

mencapai itu semua, pembangunan pertanian harus mengikutsertakan dan menggerakkan masyarakat tani secara aktif dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Todaro dan Smith (2011) mengatakan bahwa strategi pembangunan yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan tiga unsur pelengkap dasar. Pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, institutional, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenagakerjaan. Ketiga, diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya (non pertanian), yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh sektor pertanian.

Pembangunan pertanian harus fokus pada petani itu sendiri, yang senantiasa mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta komponen- komponen lain yang saling terkait. Pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergi dengan pembangunan sektor lainnya. Tujuan pembangunan pertanian sebagaimana yang sudah dirumuskan oleh Departemen Pertanian (2004) adalah : 1) Membangun sumber daya manusia aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh; 2) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya petani secara berkelanjutan; 3) Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan; 4) Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; 5) Menumbuh kembangkan usaha pertanian yang dapat memacu aktivitas ekonomi pedesaan; dan 6) Membangun sistem ketatalaksanaan pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Sasaran pembangunan pertanian yang harus tercapai sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, melalui Departemen Pertanian adalah : 1) Terwujudnya sistem pertanian industrial yang memiliki daya saing; 2) Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri; 3) Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat petani; 4) Terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian serta meningkatnya pendapatan petani. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tersebut, pelaksanaannya tidak bisa lepas dari ketatalaksanaan program/kegiatan dan koordinasi di antara pelaku pembangunan pertanian AT Mosher dalam (Iqbal, 2007).

Strategi kebijakan pembangunan pertanian yang selama ini dilakukan sangat mempengaruhi bentuk dan peran kelembagaan petani saat ini. Pemahaman sosial budaya dan kelembagaan membantu memilah faktor-faktor tertentu kedalam suatu urutan kegiatan yang mendekati kondisi kultural petani yang melakukan kegiatan usaha tani masing-masing. Pemahaman sosial budaya meliputi penguasaan pranata sosial dan tatanan sosial setempat. Termasuk dalam pranata dan tatanan sosial tersebut antara lain adalah peran kelembagaan petani dalam kaitan dengan kegiatan usahatani dan pembangunan pertanian, peran kepemimpinan lokal, dan pola komunikasi yang menggambarkan arah dan arus informasi dalam suatu lembaga (Suradisastra, 2006).

Posisi, peran, dan fungsi kelembagaan petani seringkali disusun sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan pembangunan wilayah sesuai dengan kebijakan pembangunan setempat. Dalam kondisi demikian, kelembagaan petani diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan dan bukan untuk mensejahterakan petani. Pendekatan seperti ini secara langsung ataupun tidak telah mengubah atau melumpuhkan kelembagaan tertentu. Namun disisi lain tidak dapat disangkal bahwa kelembagaan

petani yang dibentuk secara paksa juga dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja kelembagaan petani kearah yang lebih baik.

Peran lain dari suatu kelembagaan petani adalah peran menggerakkan tindak komunal. Suatu lembaga umumnya memiliki potensi kolektif yang berasal dari anggotanya. Sikap kolektif sebagai suatu kesatuan kini merupakan tantangan tersendiri bagi para pelaksana pembangunan pertanian. Memahami dan memanfaatkan secara tepat sifat-sifat komunal dan modal sosial lain akan memberikan dampak yang diharapkan. Pembangunan pertanian yang dilaksanakan pada kelompok masyarakat tertentu perlu dikaji kesesuaiannya berdasarkan pada sistem nilai, sosial budaya, dan ideologi kelompok tersebut. Nilai-nilai dan falsafah tersebut merupakan bagian dari modal sosial yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pertanian. Namun, kelembagaan petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar. Kedepan, agar dapat berperan sebagai aset komunitas masyarakat desa yang partisipatif, maka pengembangan kelembagaan harus dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri sehingga menjadi mandiri (Syahyuti, 2007).

Sejalan dengan penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, konsep pelaksanaan pembangunan pertanian diarahkan pada perluasan peran pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian adalah : 1) Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan agribisnis, terutama pertanian; 2) Fasilitasi terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat; 3) Penyediaan prasarana dan sarana fisik dengan fokus pemenuhan kebutuhan publik yang mendukung

sektor pertanian serta lingkungan bisnis secara luas; 4) Akselerasi pembangunan wilayah dan stimulasi tumbuhnya investasi masyarakat serta dunia usaha. Dalam menunjang keberhasilan suatu program/kegiatan, diperlukan partisipasi dari segenap pemangku kepentingan (stakeholder). Alasan perlunya partisipasi pemangku kepentingan untuk menunjang keberhasilan suatu program sebagaimana disampaikan Krishna dan Lovell (1985) adalah: 1) Untuk meningkatkan rencana mengembangkan program/kegiatan secara umum dan kegiatan prioritas secara khusus; 2) Agar implementasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 3) Untuk menjamin kelangsungan program/kegiatan; 4) Dapat meningkatkan kesetaraan dalam implementasi program.

Upaya penyempurnaan kelembagaan pembangunan pertanian selama ini lebih menekankan pada penyempurnaan struktur daripada penyempurnaan strategi dan kinerja. Dengan asumsi bahwa setiap peraturan perundang-undangan terkait pembangunan sektor pertanian memiliki tujuan mulia, tidak salah bila kinerja kelembagaan pelaksana juga ditingkatkan kualitasnya dan diukur produktivitasnya. Reformasi kelembagaan pembangunan pertanian tidak hanya berupa perampingan atau pengembangan struktur kelembagaan saja, namun juga pemberdayaan kelembagaan masyarakat petani sebagai pemangku kepentingan utama pembangunan sektor pertanian (Suradisastra, 2006).

Campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan pertanian (*agricultural policy*) diperlukan untuk mempengaruhi keputusan para *stakeholders* agar terlaksana pembangunan pertanian sesuai dengan yang direncanakan. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk memutus rantai lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal, yang merupakan karakteristik negara berkembang dengan ciri sumber daya yang belum dikelola sebagaimana mestinya, mata pencaharian penduduk yang mayoritas sebagai petani yang

kurang produktif, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan kualitas sumber daya manusianya masih rendah (Hanafie, 2010).

Hernanto (1993) menyatakan bahwa petani saja tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan usahatannya sendiri. Karena itu bantuan dari luar diperlukan baik secara langsung dalam bentuk bimbingan dan pembinaan usaha maupun tidak langsung dalam bentuk insentif yang dapat mendorong petani menerima hal-hal baru, dan mengadakan tindakan perubahan. Insentif itu bisa berupa jaminan tersedianya sarana produksi yang diperlukan petani dalam jumlah yang cukup, harga terjangkau, dan selalu dapat diperoleh secara berkelanjutan. Tidak kalah pentingnya adalah adanya peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak petani dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memberikan keleluasaan petani bertindak dalam pengembangan usahatannya. Implementasi program atau kegiatan pembangunan pertanian baik melalui pemberian bimbingan maupun insentif kepada petani cenderung menjadi ranah pemangku kepentingan utama (pemerintah) yang secara signifikan berpengaruh atas keberlangsungan kegiatan. Pemerintah bertindak sebagai penyandang dana, pelaksana kegiatan, organisasi pengawas dan advokasi. Sementara pemangku kepentingan yang lain yang terkena dampak, termasuk pihak swasta dan akademisi, relatif kurang dilibatkan (Iqbal, 2007).

5. 2 Modal Sosial dan Pembangunan Pertanian

Modal sosial dibutuhkan untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh seperti dalam kasus bentuk-bentuk *human capital* dan *physical capital*. Akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas masyarakat dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebajikan- kebajikan seperti kesetiaan, kejujuran, dan *dependability* (Fukuyama,1995). Sumber daya - sumber daya aktual

atau tersirat yang berkembang pada seorang individu atau sekelompok individu memiliki suatu jaringan yang dapat bertahan lama sehingga menginstitutionalisasi hubungan yang saling menguntungkan (Bourdieu dalam Yustika, 2008). Seperangkat elemen dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat akan mempengaruhi relasi antar manusia dan sekaligus sebagai input bagi fungsi produksi dan/atau manfaat.

Lina dan Von Bern mengatakan bahwa modal sosial memiliki sumbangan positif dalam kaitannya dengan komitmen pekerja, fleksibilitas organisasi, pengelolaan tindakan bersama yang lebih baik, dan pengembangan modal pengetahuan (*conceptual capital*). Lesser (2000) mengatakan, modal sosial sangat penting bagi komunitas karena: 1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas, 2) menjadi media pembagian kekuasaan dalam komunitas, 3) mengembangkan solidaritas, 4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas, 5) memungkinkan pencapaian bersama, dan 6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas.

Pendekatan terhadap modal sosial secara umum bisa dilakukan melalui dua perspektif, sebagaimana disampaikan Rosyadi dalam (Yustika, 2012). Pertama, mengkaji modal sosial dari perspektif pelaku (*actor's perspective*) yang diformulasikan oleh Bourdieu, yang melihat modal sosial berisi sumber daya- sumber daya dimana pelaku individu dapat menggunakannya karena kepemilikannya terhadap jaringan secara eksklusif (*exclusive networks*). Kedua, mencermati modal sosial dan perspektif masyarakat (*society's perspective*) yang dikonseptualisasikan oleh Putnam, yang melihat modal sebagai barang publik yang diatur oleh organisasi dan jaringan horizontal yang eksis dalam masyarakat.

Untuk menjamin terwujudnya pembangunan pertanian, sangat tergantung dengan modal sosial terutama kemampuan

masyarakat pedesaan untuk mengelola dan mengatasi tekanan ekonomi, sosial dan lingkungannya (Mathijs, 2003; Munasib dan Jordan, 2011). Masyarakat pedesaan yang diberkahi dengan kekayaan modal sosial, meliputi jaringan sosial, norma dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hubungan sosial, berada pada posisi yang menguntungkan dalam menyelesaikan sengketa, berbagi informasi, dan berhasil melaksanakan program pembangunan. Namun keberhasilan pelaksanaan program tidak bisa disamakan antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, walaupun dengan ketersediaan faktor produksi yang sama, karena memiliki modal sosial yang berbeda (Trigilia, 2001, dan Woodhouse, 2006).

Satu konsep yang dekat dengan modal sosial yaitu kualitas masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Dahlan (Simarmata, 2009), kualitas masyarakat perlu untuk mewujudkan kemampuan dan prestasi bersama. Hal ini mencakup ciri-ciri yang berhubungan dengan kelangsungan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu peranan pendidikan baik dalam keluarga maupun sekolah sangat penting dalam membentuk modal sosial, selain itu juga bisa dilakukan melalui berbagai pelatihan kelompok untuk membangun visi misi bersama, serta menumbuhkan rasa saling percaya (Ancok, 2003).

Keterampilan dapat diamati dan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan serta keyakinan seseorang terhadap suatu objek (Robbins, 2002), karena secara kognitif kepercayaan terhadap suatu objek bisa mempengaruhi sikap seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Petani yang berumur lebih tua lebih mampu mempertahankan modal sosial yang sudah ada sejak masa sebelumnya di bidang pertanian (Sawitri, 2017). Limon et al. (2014) juga menemukan bahwa ada hubungan yang positif antara umur dan akumulasi dari modal sosial. Rauch dan Casella (2001) menambahkan jaringan sosial dapat mempengaruhi keberlanjutan

ekonomi petani dengan mempengaruhi praktek pertanian dan kecenderungan mereka untuk mengadopsi teknologi baru melalui penyediaan informasi melalui jaringan tersebut. Petani kemudian dapat mempelajari teknik-teknik baru dan memperoleh pengetahuan, mendapatkan pelatihan informal dari orang lain yang telah mengadopsi praktek-praktek tersebut dan bahkan mendapatkan bantuan resmi untuk menerapkan berbagai praktik teknologi pertanian. Selain itu, peran jaringan dalam memberikan informasi tentang pekerjaan dan peluang pasar telah banyak dibuktikan.

Modal sosial juga secara tidak langsung berdampak terhadap produktivitas pertanian dan keberlanjutan ekonomi, serta keberlanjutan sosial daerah (*regional social sustainability*), karena mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang tersedia baik melalui kedekatan dan kekerabatan atau hubungan sosial sehingga berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan pendapatan petani. Olawuyi dan Oladele (2012) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa modal sosial dan dimensinya berpengaruh positif terhadap tingkat keanggotaan, tingkat kehadiran dalam pertemuan, dan kontribusi tenaga kerja yang secara statistik berpengaruh pula terhadap kesempatan kerja, sedangkan tingkat heterogenitas dan kontribusi modal keuangan berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja.

Peran jaringan dalam memberikan informasi tentang pekerjaan dan peluang pasar telah banyak dibuktikan. Dalam hal ini, modal sosial juga secara tidak langsung berdampak terhadap jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk mendapatkan pekerjaan, baik melalui kedekatan dan kekerabatan atau hubungan sosial (Rauch dan Casella, 2001). Informasi tentang pekerjaan dan peluang pasar sangat penting, karena dapat mengurangi migrasi tenaga kerja dari desa ke kota melalui peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian di

pedesaan, hal ini menunjukkan kesempatan kerja yang tinggi di pedesaan (Limon et.al., 2014).

Modal sosial dalam kelompok dapat mempengaruhi kestabilan kehidupan keluarga dan kemandirian masyarakat sehingga mampu membuka kesempatan kerja bagi petani yang berujung pada peningkatan produktivitas dan pendapatan petani (Wuysang, R 2014). Penelitian pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan rumah tangga pedesaan di lakukan oleh Grootaert et.al (2002) di Burkina Faso menghasilkan kesimpulan bahwa tingkatan modal sosial berpengaruh positif terhadap pengeluaran per kapita dan akses yang mudah terhadap pinjaman. Rumah tangga miskin yang memiliki lahan yang sempit memperoleh manfaat yang lebih dari modal sosial dibandingkan dengan rumah tangga yang lain. Omonona et.al (2014) mengatakan bahwa dimensi modal sosial seperti tingkat homogenitas, tingkat kehadiran dalam pertemuan, orientasi kelompok, kontribusi keuangan, kontribusi tenaga kerja merupakan karakteristik dari tingkatan kelembagaan yang sangat berkaitan dengan pengeluaran per kapita yang tentu saja berpengaruh terhadap kesejahteraan. Namun indikator tingkat heterogenitas dan kontribusi modal keuangan berpengaruh negatif terhadap kinerja petani dalam melaksanakan suatu program/kegiatan kelompok dan tingkat kesejahteraan petani (Olawuyi dan Oladele, 2012).

Pengaruh negatif modal sosial terhadap kinerja dalam melaksanakan kegiatan kelompok diperoleh juga oleh Anggita (2013) dalam penelitiannya terhadap kolektivitas usaha tani di Kabupaten Karawang dan Subang, dikatakan bahwa kondisi modal sosial kalangan masyarakat petani tidak dapat mendukung produktivitas kinerja karena adanya trauma finansial yang berpengaruh terhadap kapasitas, kualitas dan kontinuitas produksi, sehingga biaya produksi

menjadi tidak efisien yang mengakibatkan pendapatan petani sangat rendah.

Dimensi Struktural Modal Sosial (*Structural Dimension of Social Capital*) merujuk pada interaksi sosial itu sendiri, melalui pembentukan hubungan antara individu atau kelompok dengan melaksanakan kerjasama sehingga dapat mengurangi biaya transaksi, dan menumbuhkan pembelajaran sosial di masyarakat. Dimensi ini menjelaskan bagaimana individu dapat memperoleh keuntungan tertentu dengan memanfaatkan kedekatan hubungan personal dalam interaksi struktur sosial, meliputi hubungan dalam jaringan, konfigurasi/bentuk jaringan, dan bentuk organisasi yang memberikan keuntungan untuk anggotanya (Nahapiet dan Ghoshal, 1998). Artinya, orang dapat menggunakan hubungan personal mereka untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh informasi, atau akses terhadap sumber daya tertentu.

Dimensi struktural dalam modal sosial telah dipisahkan dalam tiga kategori, yaitu modal sosial sebagai ikatan (*bonding*), jembatan/mediasi (*bridging*) dan menghubungkan (*Linking*) (Narayan, 1999; Putnam, 2000; Evans, 1996). *Bonding* modal sosial mengacu pada modal sosial yang dihasilkan melalui interaksi antara anggota kelompok yang relatif homogen (keluarga atau teman dekat), sedangkan modal sosial yang menjembatani (*bridging*) mengacu pada modal sosial yang dihasilkan dan dibagi melalui hubungan satu sama lain antara kelompok yang heterogen (tetangga atau kenalan lainnya). *Linking* modal sosial yang menggambarkan ikatan yang menghubungkan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan politik maupun finansial. Melalui ikatan hubungan tersebut memungkinkan kelompok untuk mengakses sumber daya, ide-ide dan informasi dari lembaga-lembaga yang berwenang, serta meningkatkan modal sosial dan tindakan sosial dari sudut pandang

politik maupun ekonomi secara efektif. Terakhir, dimensi struktural juga berbentuk badan usaha (*corporate*) yang dibentuk oleh kelompok profesional (serikat petani atau koperasi pertanian) yang memberikan keuntungan untuk anggotanya (Sabatini, 2009).

Dimensi kognitif modal sosial (*Cognitif Dimension of Social Capital*), termasuk didalamnya atribut seperti kesepakatan bersama atau paradigma bersama yang memfasilitasi pemahaman bersama dari tujuan dilakukannya kesepakatan, dan cara yang tepat bagaimana bertindak dalam suatu sistem sosial (Ostrom, 2000). Walaupun tidak adanya ikatan dan hubungan khusus (keluarga atau kekerabatan) antara individu anggota kelompok, modal sosial mampu mempengaruhi orang untuk bekerja sama (Uphoff, 1999). Dimensi kognitif mengacu pada penyesuaian antara nilai-nilai individu dengan nilai-nilai masyarakat, melalui rasionalisasi perilaku bersama dan membuatnya menjadi hal yang penting (Nahaphiet dan Ghoshal, 1998). Kondisi tersebut akan memunculkan kohesivitas masyarakat, yaitu suatu keadaan dimana kelompok saling menyukai dan mempercayai, memiliki komitmen untuk mencapai tujuan kelompok, dan berbagi kebanggaan sebagai sebuah kelompok, karena kekompakan dalam kelompok sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Coleman (1990), dimana nilai-nilai kebersamaan yang dimiliki oleh individu dapat menjadi suatu modal sosial yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Dimensi Relasional Modal Sosial (*Relational Dimension of Social Capital*), yaitu suatu jenis hubungan kedekatan antar masyarakat (tidak selalu berlangsung lama) yang telah membangun sejumlah interaksi diantara mereka untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan (Granovetter, 1992). Dimensi ini mencakup keyakinan dan kepercayaan (Fukuyama, 1995; Putnam, 1993), norma dan sanksi sosial (Coleman, 1990; Putnam, 1995) dan timbal balik

(*reciprocity*) (Coleman, 1990; Jones dan Woolcock, 2007). Kepercayaan dapat menjadi kontrol bagaimana mekanisme suatu hubungan menjadi kuat, karena dapat mendorong upaya bersama, apabila tidak ada rasa saling percaya akan berdampak negatif pada perkembangan pembangunan.

Demikian juga, seseorang yang dipercaya memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang tidak akan mungkin tercapai dalam situasi di mana kepercayaan tidak ada. Kumlin dan Rothstein (2005) menyebutkan bahwa ada hubungan korelasi yang positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap pelayanan publik, kepercayaan sosial dan pembangunan. Norma dan sanksi sosial sangat efektif dalam memberikan harapan yang mengikat interaksi dalam kelompok. Norma akan muncul ketika ada kesepakatan dalam sistem sosial masyarakat, dan menjadi bentuk yang paling penting dari modal sosial karena dapat memberikan individu suatu kepercayaan untuk berinvestasi dalam kegiatan kolektif atau kelompok, dengan menganggap bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama (*reciprocity*) dalam interaksi sosial (Coleman, 1990). Perlakuan timbal balik (*reciprocity*), dipahami sebagai kombinasi antara altruism jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Seseorang akan berbuat baik kepada orang lain atau mau melakukan sesuatu untuk orang lain dengan harapan ada balasan dari kebaikan yang telah dilakukan ketika mereka memerlukan bantuan (Limon et.al., 2014). Dalam sebuah komunitas yang memiliki tingkat *reciprocity* yang kuat, masyarakat akan peduli terhadap kepentingan orang lain

5.3 Modal Sosial dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Pembangunan Pertanian berkelanjutan adalah pembangunan pertanian yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembangunan pertanian berkelanjutan ialah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan di masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan pertanian berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyeluruh. Pembangunan pertanian berkelanjutan sangat memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Dampak buruk terhadap lingkungan hidup harus dihindari dari setiap kegiatan sosial dan ekonomi sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga dimasa sekarang dan dimasa mendatang.

Laporan KTT Dunia 2005, telah menjabarkan pembangunan berkelanjutan dalam tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, jenis pembangunan dibidang lainnya juga diperhitungkan. Pembangunan ekonomi dijadikan sebagai langkah awal dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan bidang lainnya diberi asumsi akan mengalami keberhasilan setelah pembangunan ekonomi berhasil dilakukan. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari pada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kecukupan kebutuhan ekonomi. Dalam prosesnya, dilakukan pelestarian aset berupa pembangunan sumber daya dengan pengelolaan yang ramah lingkungan secara tepat guna. Pembangunan berkelanjutan tetap memperhitungkan keadilan bagi masyarakat pada masa sekarang dan masa depan. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Setiap keputusan dalam pembangunan harus mempertimbangkan aktivitas manusia yang dipandang sebagai penyebab perubahan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan memberdayakan masyarakat sebagai organisasi sosial. Manusia dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan melalui perkembangan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan. Tujuan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan adalah memberikan motivasi terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di dalam masyarakat diciptakan rasa sadar akan peningkatan kemampuan sumber daya manusia sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi meningkat. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga bertujuan meningkatkan penghargaan terhadap bentuk kelembagaan dan organisasi sosial masyarakat. Pembangunan berkelanjutan menjadi suatu sistem pengendali terhadap proses pembangunan, pengembangan nilai-nilai masyarakat tradisional yang berlandaskan kearifan lokal, serta peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat dengan cara berorganisasi.

Tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan tujuan pelestarian lingkungan. Kondisi lingkungan yang lestari dapat mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Pada masyarakat yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang tidak pasti, pembangunan akan sulit terlaksana. Selain

itu, degradasi alam akan terjadi pada pembangunan ekonomi yang tidak membatasi penggunaan sumber daya alam secara wajar. Pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap lingkungan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari setiap kegiatan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan menerapkan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan dalam pembangunan. Bidang utama yang harus menerima manfaat dari pembangunan yaitu bidang lingkungan hidup, sosial dan ekonomi. Setiap kegiatan pembangunan dilandasi oleh tujuan untuk memberikan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi masyarakat. Kegiatan pembangunan juga harus mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ekonomi masyarakat dan negara secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan pembangunan harus dapat dipulihkan kembali secara berkelanjutan setelah dimanfaatkan. Perlindungan lingkungan hidup di dalam pembangunan berkelanjutan mencakup wilayah lokal, regional, maupun global. Lingkungan hidup harus dikelola dengan kearifan lokal. Pihak yang mendukung kelestarian lingkungan hidup harus didukung dengan insentif, sedangkan pajak diberlakukan bagi pengguna sumber daya alam (Rizal, 2017).

Konsep pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan pada empat nilai utama, yaitu ketertinggalan transisi energi, kerusakan ekosistem, ancaman perubahan iklim yang sangat ekstrim, dan kekurangan bahan makanan. Pembangunan berkelanjutan mementingkan nilai ekonomi sekaligus nilai pelestarian lingkungan secara ekologi maupun sosial di masa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menanamkan nilai kepada masyarakat berupa pengembangan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik. Nilai-nilai pembangunan

berkelanjutan mulai ditetapkan pada tahun 1970 seiring dengan bertambahnya masalah lingkungan. Beberapa perwakilan negara mulai mengadakan pertemuan yang membahas tentang kerusakan lingkungan. Pertemuan ini meningkat seiring kesadaran masyarakat yang sangat tinggi akan pentingnya lingkungan hidup (Hasan dan Azis, 2018).

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian terpenting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Pentingnya kelompok seperti koperasi (lembaga usaha) maupun kelompok tani dalam pembangunan pertanian telah banyak dipelajari dalam ilmu ekonomi pertanian dan ilmu sosiologi, karena kelompok paling mencerminkan modal sosial dalam sektor pertanian. Jaringan sosial dapat mempengaruhi keberlanjutan ekonomi petani dengan mempengaruhi praktek pertanian dan kecenderungan mereka untuk mengadopsi teknologi baru melalui penyediaan informasi melalui jaringan tersebut. Petani kemudian dapat mempelajari teknik-teknik baru dan memperoleh pengetahuan,

mendapatkan pelatihan informal dari orang lain yang telah mengadopsi praktek-praktek tersebut dan bahkan mendapatkan bantuan resmi untuk menerapkan berbagai praktik teknologi pertanian. Selain itu, peran jaringan dalam memberikan informasi tentang pekerjaan dan peluang pasar telah banyak dibuktikan.

Modal sosial, secara tidak langsung berdampak terhadap produktivitas pertanian dan keberlanjutan ekonomi, serta keberlanjutan sosial daerah (*regional social sustainability*), karena mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang tersedia baik melalui kedekatan dan kekerabatan atau hubungan sosial (Rauch dan Casella, 2001). Hal tersebut sangat penting, karena dapat mengurangi migrasi tenaga kerja dari desa ke kota melalui peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian di pedesaan (Limon et.al., 2014). Keberlanjutan sosial daerah dapat juga dicapai dengan meningkatkan peran petani dalam jaringan kelompok di pedesaan yang bergerak di sektor non- pertanian. Kelompok seperti itu dapat memainkan peran penting dalam struktur sosial wilayah dan selanjutnya berkontribusi dalam mempertahankan warisan budaya dan alam, *social cohesion*, dan pembangunan identitas sosial (budaya, sipil, agama, perkembangan, perempuan dan organisasi kepemudaan, kelompok lingkungan), seperti yang telah ditemukan oleh Jordan et al. (2010).

Karena dibangun melalui keterlibatan masyarakat, modal sosial di kalangan petani dapat meningkatkan tanggung jawab sosial dengan mempromosikan pelaksanaan praktek pertanian yang berkelanjutan dan akhirnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada penyelamatan lingkungan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Mathijs (2003) serta Munasib dan Jordan (2011), bahwa modal sosial memiliki efek positif pada kesadaran petani terhadap lingkungan, sehingga praktek pertanian yang ramah lingkungan dapat terlaksana. Beberapa penulis telah mengkaji pentingnya kelompok dalam kebijakan pembangunan

pedesaan, terutama dari perspektif modal sosial, karena kelompok muncul sebagai akibat dari kepercayaan antara individu dan merupakan dasar untuk kepercayaan yang lebih besar dan upaya tindakan kolektif baru untuk melakukan proyek-proyek yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat (Putnam, 1993).

Peran kelompok sebagai perantara dalam pelaksanaan kebijakan publik sangat dihargai. Modal sosial sangat terkait dengan kualitas lingkungan asosiatif yang ada di tingkat lokal dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika pembangunan di daerah pedesaan dan akhirnya berpengaruh pada kelangsungan hidup masyarakat pedesaan dan kohesi sosial mereka, di mana petani adalah pemain kuncinya. Dalam konteks kebijakan publik, modal sosial pada intinya menunjuk pada political will dan penciptaan jaringan-jaringan, kepercayaan, nilai-nilai bersama, norma-norma, dan kebersamaan yang timbul dari adanya interaksi manusia di dalam sebuah masyarakat.

Modal sosial bukan merupakan produk dari inisiatif dan kebijakan pemerintah, namun demikian, modal sosial dapat ditingkatkan atau dihancurkan oleh negara melalui kebijakan publik (Cox, 1995; Suharto, 2007). Pemerintah dapat mempengaruhi secara positif kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, partisipasi, jaringan, kolaborasi sosial dalam sebuah komunitas (Suharto, 2007). Di tingkat lokal, modal sosial dapat menjembatani hubungan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyebarkan informasi dan mengimplementasikan program-program pembangunan (Inayah, 2012). Akibat positif yang dihasilkan adalah pemerintah akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat sehingga mendorong efektifitas pemerintahan (Hasbullah, 2006).

Kekeliruan utama dalam pembangunan pertanian selama ini adalah masih termajinkannya konsep kelembagaan lokal. Kurang dilibatkannya organisasi yang sudah ada di tengah masyarakat

pertanian atau pedesaan itu sendiri mengakibatkan pembangunan pertanian tidak dapat berjalan dengan maksimal. Elizabeth dan Iwan (2009) juga mengatakan hal yang sama bahwa pembangunan pertanian yang dilaksanakan selama ini kurang menekankan pada *Local Institution Endowment* (berbasis pada kelembagaan lokal) yang telah ada. Kelembagaan petani lebih dianggap sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya memberdayakan dan menguatkan modal sosial masyarakat (Syahyuti, 2007). Suatu lembaga umumnya memiliki potensi kolektif yang berasal dari anggotanya sebagai suatu kesatuan. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi para pelaksana pembangunan pertanian. Memahami dan memanfaatkan secara tepat sifat-sifat komunal dan modal sosial lain akan memberikan dampak yang diharapkan. Kedepan, agar dapat berperan sebagai aset komunitas masyarakat desa yang partisipatif, maka pengembangan kelembagaan harus dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri sehingga menjadi mandiri (Syahyuti, 2007).

Selain sebagai suatu pedoman hidup, sistem nilai budaya juga digunakan sebagai pendorong kelakuan manusia dalam hidup, bahkan menjadi suatu sistem tata kelakuan yang lebih tinggi dari yang lain, seperti hukum, adat, aturan sopan santun dan sebagainya. Pada individu yang sejak kecil diresapi dengan nilai-nilai budaya yang telah berakar, sangat susah untuk diganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu singkat (Sajogyo dan Pudjiwati, 2002).

BAB VI

PENGUATAN MODAL SOSIAL DAN MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN

6.1 Program Pemerintah Untuk Memperkuat Modal Sosial

Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesalingpercayaan dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Modal sosial yang ada di masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan pertanian. Pengembangan masyarakat dan pembangunan di bidang pertanian tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi harus didukung dengan aspek sosial.

Masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani telah membentuk sebuah instisusi dalam bentuk kelompok-kelompok tani untuk saling berkoordinasi antar anggota. Namun modal sosial yang ada di masyarakat masih minim, terutama dari aspek pemanfaatan jaringan sosial dan kepercayaan di kalangan kelompok. Norma-norma dan jaringan sosial yang merupakan kunci dalam menyelesaikan aspek-aspek permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pertanian. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting untuk memperkuat modal sosial petani dalam bentuk program konkrit. Program-program yang telah diluncurkan oleh pemerintah untuk memperkuat modal sosial yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut:

Program konkrit yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu pengembangan padi dan jagung. Selain itu memanfaatkan tanah kosong untuk penanaman bawang. Saat ini pemerintah telah membantu benih bawang sumber dana APBA Provinsi Aceh dengan estimasi hasil 600-700 kg / Rante atau 15 ton / Hektar (Wawancara dengan Pak Yunus, Kadis Pertanian dan Peternakan Aceh Tamiang, 14 Juli 2020).

Dari data di atas dapat dipahami bahwa program pemerintah untuk penguatan modal sosial petani yaitu melalui pengembangan padi, jagung dan bawang. Pengembangan padi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penanaman padi dari sistem yang ada ke padi organik. Penguatan modal sosial masyarakat dalam pengembangan padi organik adalah dari aspek penguatan sumber daya manusia, dimana petani ditingkatkan kapasitas pengetahuannya melalui berbagai pelatihan dan penyuluhan. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan informan berikut:

Setiap penyuluh mempunyai kelompok binaan pada setiap desa. Untuk penguatan modal sosial petani juga dilakukan pengiriman petani untuk mengikuti pelatihan ke tempat lain, misalnya Pak Gimun dikirim untuk mengikuti pelatihan ke Medan yang dilakukan oleh salah satu LSM yang bergerak di bidang pertanian. Program yang diikuti disana terkait dengan penanaman padi dengan menggunakan pupuk organik, kemudian Pak Gimun menerapkan ilmunya tersebut di desanya. Hasil yang

diperoleh saat ini hasil panen padi dengan sistem tersebut padinya lebih pulen. Hasil panen padi pak Gimun sekarang telah menjadi incaran masyarakat untuk dibeli, bahkan harus dipesan terlebih dahulu karena persediaannya yang terbatas. Hal ini dilakukan oleh seorang petani di desa Gedong Biara Kecamatan Sruwey Kabupaten Aceh Tamiang (Wawancara dengan Saleh, Penyuluh lapangan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, 14 Juli 2020).

Dari data di atas dapat dipahami bahwa penguatan modal sosial petani yang dilakukan pemerintah di Aceh Tamiang yaitu dengan peningkatan sumber daya petani melalui kegiatan pelatihan yang di kirim tempat lain. Ketika petani dari Aceh mengikuti pelatihan ke luar provinsi tentunya akan terbuka wawasan merkea dan terbangunnya jaringan sosial. Setelah selesai pelatihan petani tidak hanya dapat ilmu tetapi juga dapat koneksi yang kemudian bisa digunakan untuk penjualan hasil pertanian yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi petani. Berikut adalah foto salah seorang petani yang bernama pak Gimun yang pernah mengikuti pelatihan pengembangan padi organik tersebut.

Foto: Pak Gimun (dua dari kanan ke kiri) saat wawancara di lokasi penelitian di desa Gedong Biara Kecamatan Sruwey Kabupaten Aceh Taming.



Sumber: Dokumen Penelitian 2020

Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologis khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok. Pada saat ini, semakin banyak pihak yang memberikan perhatian yang besar terhadap modal sosial dalam pembangunan

pertanian dari praktek aktivitas-aktivitas sosial kapital yang dibentuk dan dilembagakan oleh warga masyarakat lokal.

Fukuyama (1999) menyatakan bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Di dalamnya merupakan komponen kultural bagi kehidupan masyarakat modern. Berbagai permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di berbagai Negara, determinan utamanya adalah rendahnya modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat.

Modal sosial yang rendah dapat melemahkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk memperkuat modal sosial petani dan terbukanya akses ke pihak luar pemerintah telah mendorong terbentuknya lembaga keuangan mikro syariah yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh petani untuk peminjaman modal usaha dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Pemerintah telah mendorong terbentuknya lembaga keuangan mikro syariah melalui kerja sama dengan pihak swasta. Selain ini pemerintah juga memfasilitasi petani untuk bekerjasama dengan Bank Aceh dalam bentuk sarana produksi melalui sistem bagi hasil (Wawancara dengan Yunus, Kadis Pertanian dan Peternakan Aceh Tamiang, 14 Juli 2020).

Dari data di atas dapat dipahami bahwa program pemerintah dalam penguatan modal berikutnya adalah memfasilitasi terbukanya akses ke pihak perbankan. Selain mendorong terbentuknya lembaga keuangan mikro syariah pemerintah juga memfasilitasi petani untuk bekerjasama dengan pihak Bank dalam bentuk sarana produksi melalui sistem bagi

hasil. Dengan difasilitasi oleh pemerintah kepercayaan Bank kepada petani dan keberanian petani untuk berurusan dengan Bank akan terjadi, disini diharapkan tumbuhnya sikap saling percaya antar individu dan antar institusi dalam masyarakat (*trust*). Kepercayaan adalah salah satu komponen terpenting dalam modal sosial. Setelah terbentuknya modal sosial kepercayaan selanjutnya akan lahir kerjasama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*). Pada akhirnya hubungan yang erat dan padu dalam membangun solidaritas masyarakat akan terwujud (*kohesifitas*).

Menurut Hadisapoetro (1973), ada lima faktor yang dapat melangsungkan pembangunan pertanian adalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor pasar, yang dapat disamakan dengan faktor adanya kebutuhan.
- 2) Faktor teknologi, yang berkembang yang dapat disamakan dengan keahlian.
- 3) Faktor tersedianya alat-alat dan bahan-bahan pertanian yang dapat disamakan dengan modal.
- 4) Faktor insentif yang dapat mempengaruhi kesediaan petani.
- 5) Faktor transportasi yang dapat disamakan dengan faktor modal.

Dalam rangka pembangunan pertanian pemerintah juga sedang menggalakkan program pengembangan buah-buah di Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang melalui program TAMSAR 27. Merujuk kepada konsep di atas dari aspek pasar atau kebutuhan masyarakat dan aspek lainnya sangat mendukung. Buah - buahan bukan hanya di pasakan di Aceh Tamiang akan tetap juga dipasarkan ke Sumatera Utara. Mall Brastagi Medan salah satu tujuan dipasarkannya buah-buahan asal Aceh

tamiang tersebut dan sudah punya komitmen dengan pemerintah daerah. Dari segi geografis sangat mendukung dengan jarak tempuh hanya 3 Jam. Untuk mengembalikan Aceh Tamiang sebagai daerah penghasil buah-buahan pemerintah saat ini sedang mengembangkan penanaman buah-buahan di daerah tersebut. Hal ini sebagaimana terungkap dalam wawancara berikut:

Di Gampong Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka ada program TAMSAR 27. Program kerja sama agro Foresti untuk pengembangan buah-buahan, yaitu Mangga, Durian Musang King, Pokat Mentega dan Nenas Madu. Selain di pasarkan di Aceh Tamiang buah-buahan tersebut juga akan di jual ke Medan Sumatera Utara (Wawancara dengan Yunus, Kadis Pertanian dan Peternakan Aceh Tamiang, 14 Juli 2020).

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa berbagai produk buah-buahan saat ini sedang dikembangkan di Aceh Tamiang, salah satunya di gampong Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Aceh tamiang. Buah-buahan yang dikembangkan yaitu Mangga, Durian Musang King, Pokat Mentega dan Nenas Madu. Untuk memudahkan akses ke lokasi pertanian, pemerintah juga telah merealisasikan Program Pembangunan Jalan Usaha Tani. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

Program lainnya yaitu pembangunan Jalan Usaha Tani, dilakukan secara swakelola, namun pelaksanaan program secara swakelola tidak berhasil. Kemudian pemerintah membantu alat berat untuk menyelesaikan jalan tersebut,

sehingga jalan usaha tani tersebut sudah dapat dinikmati oleh masyarakat dan sekarang menjadi jalan desa (Wawancara dengan Yunus, Kadis Pertanian dan Peternakan Aceh Tamiang, 14 Juli 2020).

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mendukung pengembangan di bidang pertanian pemerintah telah membangun jalan usaha tani. Program ini dimaksudkan untuk memudahkan petani dalam hal akses ke lokasi pertanian, sejak masa penanaman hingga panen. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh Hadisapoetro bahwa transportasi menjadi salah satu modal terpenting dalam mendukung keberhasilan petani.

Sedangkan di Aceh Tengah program konkrit untuk meningkatkan modal sosial petani juga sangat menarik yaitu mendorong petani mengakses dana Usaha Kredit Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007 menjadi salah satu program pemerintah dalam pengembangan UMKM, serta meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal. Dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM sejalan dengan akan diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan sebagai berikut: Pertama, Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6%. Kedua, total plafon KUR ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun 2020, dan akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp. 325 Triliun pada tahun 2024. Ketiga, Peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per

debitur. Sejalan dengan kebijakan tersebut pemerintah Aceh Tengah telah mendorong petani mengakses dana KUR tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut:

Program konkrit di Aceh Tengah yaitu pengembangan hortikultura, pangan, pertanian, peternakan dan jagung, dengan komoditi andalan Kopi. Kemudian Mendorong petani mengakses dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Wawancara dengan Nasrun Liwanza, Kadis Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, 26 Agustus 2020).

Dari data di atas dapat jelaskan bahwa untuk mendorong pengembangan usaha disektor pertanian, pemerintah Aceh Tengah saat ini telah mendorong program hortikultura (sayur-sayuran), pangan, pertanian, peternakan, dan jagung dengan komoditas andalan adalah Kopi. Terkait dengan penguatan modal sosial pemerintah melalui Dinas Pertanian Aceh Tengah telah membuka jaringan dan akses petani kepada perbankan. Dalam merealisasikan program KUR tersebut maka terbentuk sikap saling percaya antara petani dan pemberi dan (Bank). Disini peran penguatan modal sosial jelas terlihat dengan nyata. Untuk menghindari gagal panen pemerintah juga mengasuransikan petani. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko gagal panen dari petani. Dengan adanya program asuransi tersebut petani semakin nyaman dengan usaha mereka. Terkait dengan asuransi petani, berikut petikan wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut:

Pemerintah juga memberi asuransi kepada petani jika gagal panen dengan premi / iuran

ditanggung oleh pemerintah Rp 144.000 dan oleh petani 36.000 / Ha / musim tanam. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani, asuransi yang dimaksud yaitu asuransi Jasindo (Wawancara dengan Nasrun Liwanza, Kadis Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, 26 Agustus 2020).

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa saat ini pemerintah telah memberi asuransi jika gagal panen. Program ini sangat menarik karena pemerintah juga menanggung premi dengan persentase lebih besar dari yang ditanggung oleh petani. Dengan hanya membayar Rp. 36.000 /Ha / Musim tanam petani sudah aman dari resiko gagal panen. Pemerintah juga masih memberikan bantuan kepada kelompok tani hingga saat ini, namun bantuannya dalam bentuk program tidak adalagi bantuan uang tunai. Untuk menghindari adanya persoalan dikemudian hari, pemerintah telah mensyaratkan kelompok tani terdaftar di Notaris. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan berikut.

Semua bantuan dari pemerintah diberikan kepada petani harus secara kelompok tani, tidak boleh untuk individu. Untuk menghindari kelompok fiktif pemerintah mensyaratkan kelompok tersebut terdaftar di Notaris dan memiliki Akte Notaris (Wawancara dengan Nasrun Liwanza, Kadis Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, 26 Agustus 2020).

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa saat ini tidak ada lagi bantuan untuk individu, semua bantuan dari pemerintah

diberikan secara berkelompok. Untuk menghindari adanya kelompok yang tidak bertanggung jawab pemerintah mensyaratkan kelompok tani harus memiliki Akte Notaris jika ingin mengajukan bantuan kepada Pemerintah. Dalam modal sosial Akte Notaris yang disyaratkan oleh pemerintah adalah bagian norma sosial yang menjadi panduan dalam pelaksanaan program.

Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Hasbullah (2006) menjelaskan aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Setiap daerah memiliki sektor andalannya, kalau di Takengon Aceh Tengah sektor andalannya adalah kopi, sedangkan di Pidie Jaya sektor andalan adalah padi dan jagung. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Sedangkan program konkrit di pidie Jaya yaitu pengembangan jagung, cabe, bawang dan semangka, dengan sektor andalan padi dan jagung. Hasil produksi jagung di Pidie Jaya terus meningkat, saat ini produksi jagung mencapai 8 Ton pertahun dengan harga rata-rata Rp 3.000,- maka penghasilan petani Rp. 24.000.000,/tahun/Ha. Luas areal jagung di Pidie Jaya dari tahun ke tahun terus bertambah, Pada tahun 2014 luas areal jagung hanya 100 Ha, sedangkan saat ini luas areal jagung telah mencapai 2.000 Ha. (Wawancara dengan Pak Rusydi, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya, 4 September 2020).

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa produk andalan yang dikembangkan oleh pemerintah di Pidie Jaya adalah padi dan jagung. Saat ini luas areal jagung di Pidie Jaya pada tahun 2020 telah mencapai 2.000 Ha. Jika harga terendahnya Rp. 3000 maka penghasilan petani perbulan adalah 2.000.000 / Ha. Untuk meningkatkan produktifitas petani bawang pemerintah juga membantu bibit bawang merah (umbi), mosa, pupuk dan pestisida. Sedangkan untuk pertanian padi pemerintah telah membuat rumah burung hantu untuk mengurangi hama tikus. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Sesuai dengan intruksi bupati untuk pertanian padi dihimbau kepada masyarakat untuk membangun rumah burung hantu di sawah sebanyak 5 buah setiap desa. Sumber dana untuk membuat rumah burung hantu tersebut adalah dari dana desa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hama tikus pada tanaman padi. Dengan adanya Rumah burung hantu produksi padi meningkat dan ekonomi petani juga semakin membaik. Ide pembangunan rumah burung hantu di sawah untuk mengusir hama tikus adalah belajar dari masyarakat Demak Jawa Tengah (Wawancara dengan Rusydi, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya, 4 September 2020).

Dari data di atas dapat dipahami bahwa untuk penguatan modal sosial petani di sektor pertanian padi, pemerintah telah mengirim petani padi ke Demak Jawa Tengah untuk belajar dan melihat secara langsung bagaimana masyarakat di sana meningkatkan produksi padi mereka dengan membasmi hama tikus dengan membangun rumah burung hantu. Setelah pulang

dari pelatihan tersebut petani pun mempraktekkan ilmu pengusiran hama tersebut di daerahnya masing-masing. Hal ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah dengan mengizinkan penggunaan dana untuk pembuatan rumah burung hantu sebanyak 5 buah pada setiap desa yang memiliki areal persawahan.

Setelah ada rumah burung hantu untuk mengusir hama tikus, kasus kematian petani akibat tersengat listrik di sawah sendiri sudah tidak ada. Sebelumnya beberapa petani di Pidie Jaya telah menjadi korban akibat menggunakan kabel yang beraliran listrik di persawahan untuk mengusir tikus. Penggunaan rumah burung hantu untuk mengusir hama tikus selain ramah lingkungan juga terjamin dari segi aspek keselamatan. Oleh karena itu penggunaan rumah burung hantu untuk mengusir hama tikus adalah langkah yang tepat dan petani sendiri telah merasakan manfaatnya.

5.2 Dampak Program Pemerintah Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda. Walaupun begitu, kadang-kadang kemiskinan sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari karena mereka merasakan hidup dalam kemiskinan. Meskipun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Darmawati, 2017).

Umumnya kaum konservatif melihat masalah kemiskinan sebagai kesalahan pada orang miskin sendiri. Kaum konservatif tidak memandang kemiskinan sebagai masalah yang serius dan percaya bahwa kemiskinan akan terselesaikan dengan sendirinya. Umumnya mereka pasif terhadap kemiskinan. Kaum liberal memandang kemiskinan sebagai masalah yang serius, karenanya harus dipecahkan. Masalah kemiskinan dapat diselesaikan dalam struktur politik, ekonomi yang sudah ada. Ada kepercayaan kuat kaum liberal, bahwa orang miskin pasti dapat mengatasi kemiskinan mereka asal mereka mendapat kesempatan berusaha yang memadai.

Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan yang sedang dijalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi lebih tinggi. Hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin, karena mereka (penduduk) sendiri tidak sadar akan kemiskinannya. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat (Darmawati, 2017).

Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal 33

dan 34. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan sosial (pemberantasan kemiskinan) adalah dengan memberikan bantuan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2012, bantuan sosial (bansos) merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Firmansyah, 2020).

Meskipun sering dianggap sebagai alat politik karena berinteraksi langsung dengan masyarakat (Sjahir, Kis Katos, dan Schulze, 2013), bansos yang terintegrasi dengan baik dan tepat sasaran telah terbukti mampu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan (Barrientos, 2010; International Labour Organization, 2004; World Bank, 2017). Davoodi, Tiongson, dan Asawanuchit (2003) mengungkapkan bahwa negara dengan belanja pendidikan dan kesehatan yang lebih pro-kemiskinan (*pro-poor*) cenderung memiliki hasil pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, tata kelola yang baik, tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi, serta akses terhadap informasi yang lebih luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak program pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan sebagaimana disampaikan oleh Kadis Perkebunan Aceh Tamiang yaitu sebagai berikut:

Dampak program bantuan pemerintah saat ini sangat signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Apalagi saat ini ada program Gerakan Aceh Mandiri pangan (GAMPANG) (Wawancara, 6 April 2021).

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan adanya program Gerakan Aceh Mandiri pangan (GAMPANG) yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat hasilnya luar biasa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di seluruh Kabupaten Kota di Aceh. Hal ini sejalan dengan peringatan WHO dan Presiden Republik Indonesia bahwa ancaman pandemi Covid-19 akan menimbulkan krisis pangan yang diprediksi akan terjadi di akhir tahun 2020, Pemerintah Aceh mengambil langkah sosialisasi Gerakan Aceh Aman Pangan (Gampang) melalui video conference kepada seluruh kabupaten/kota di Aceh. Upaya itu dilakukan untuk menyiapkan kabupaten/kota termasuk desa agar dapat bersiaga dan memfokuskan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Gampong (APBK/APBG) untuk kepentingan ketahanan pangan.

Dalam arahan Gubernur Aceh yang disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, H. T Ahmad Dadek menyatakan bahwa Gampang harus menjadi suatu gerakan untuk semua pihak, sebagaimana gerakan kita dalam menghadapi Covid-19, bukan bersifat parsial apalagi proyek. dalam memperkuat ketahanan pangan banyak hal yang harus dilaksanakan dan itu tidak dapat dilakukan secara individual melainkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga menjadi komitmen bersama dengan mengedepankan tata kelola terpadu dan menjadi sebuah gerakan terarah dan terukur untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok terutama di masa pandemi Covid-19 (<https://humas.acehprov.go.id/>)

Pemerintah sudah menyediakan bantuan stimulus lewat bantuan khusus keuangan senilai 300 milyar kepada kabupaten/kota untuk peningkatan sarana kesehatan, Gampang, dampak ekonomi, dan pengawasan perbatasan. Dari dana tersebut hampir 40 persennya digunakan untuk Gerakan Aceh Mandiri Pangan dan

dampak ekonomi, nantinya akan dikelola oleh kabupaten/kota dengan bimbingan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Provinsi.

Sejalan dengan hal tersebut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto menjelaskan, untuk program Gampang tersebut Pemerintah Aceh sudah menyediakan dana hampir mencapai 100 milyar dan itu merupakan dana bantuan khusus. Bantuan keuangan khusus tersebut sudah ditetapkan melalui Pergub Nomor 40 Tahun 2020 tentang bantuan keuangan. Disamping itu dari DPA SKPA juga tersedia kegiatan pengembangan beberapa komoditi pangan seperti padi dan jagung, serta pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan budidaya ikan air tawar dengan total anggaran hampir 50 milyar.

Dalam menjaga ketersediaan pangan akan mengelola dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga pasokan bahan pangan pokok Aceh, sehingga stabilitas harga bahan pangan pokok di pasaran tetap terjaga dan masyarakat tidak kesulitan memperoleh bahan pangan. Sedangkan tugas dan kewenangan kabupaten/kota adalah membantu Pemerintah Aceh dengan ikut mensosialisasi terkait program Gampang dalam APBK baik di perubahan maupun tahun 2021 dan kepada seluruh gampong dan pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Sementara Kepada dinas Perkebunan Aceh Tengah dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwa dampak program bantuan pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan sangat signifikan, yaitu sebagai berikut:

Dampak program bantuan pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah juga sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Melalui bantuan

yang diberikan telah mendorong petani untuk terus melaksanakan kegiatan usaha taninya. Pemberian bantuan premi asuransi usahatani misalnya mendorong petani untuk mau menanam padi dikarenakan ada asuransi yang membayar sebesar Rp 6.000.000,- per musim tanam jika petani mengalami gagal panen (Wawancara, 25 Mei 2021).

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa dampak bantuan pemerintah di kabupaten Aceh Tengah sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Untuk meningkatkan usaha tani di Kabupaten Aceh Tengah pemerintah telah menggelontorkan sejumlah dana untuk premi asuransi petani, sehingga jika gagal panen petani tetap mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) permusim tanam. Dengan demikian semangat bertani tetap tinggi tanpa ada kekhawatiran gagal panen. Selain itu di Aceh Tengah juga ada program pecah Kartu Keluarga (KK) untuk merangsang petani yang baru menikah dengan mendapatkan lahan usaha tani. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah yaitu sebagai berikut:

Program Pecah KK juga memberi dampak kepada petani, dimana petani yang baru menikah dan pisah dari orang tua mereka akan terbantu dengan diberikannya lahan usaha tani, sehingga mereka bisa memperoleh pendapatan dari usahatani yang mereka jalankan (Wawancara, 25 Mei 2021).

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah memberikan lahan usaha tani bagi petani yang baru menikah dengan Pecah KK. Dengan demikian diharapkan petani tersebut

lebih cepat mandiri. Bagi petani yang pecah KK tersebut juga mendapatkan program premi asuransi petani dari pemerintah untuk menjamin gagal panen agar petani tetap berdaya.

Sedangkan di Kabupaten Pidie Jaya dampak program pemerintah bagi pengentasan kemiskinan adalah sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya berikut:

Dampak dari kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit, dan obat-obatan pertanian dapat meningkatkan hasil produksi pertanian seperti bawang merah, jagung dan juga padi (Wawancara, 25 Mei 2021).

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti pupuk, bibit dan obat-obatan telah meningkatkan produksi hasil pertanian. Selain memberikan bantuan tersebut pemerintah juga mengedukasi masyarakat cara mengatasi hama tikus secara ramah lingkungan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pertanian berikut ini:

Pemerintah juga memberikan bantuan pengadaan dan pengenalan cara mengatasi serangan hama tikus pada padi dengan membangun rumah burung hantu. Program ini telah terbukti meningkatkan produksi padi di Kabupaten Pidie Jaya (Wawancara, 25 Mei 2021).

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah Pidie Jaya memberikan bantuan rumah burung hantu kepada

petani agar dapat mengusir hama tikus pada padi masyarakat, sehingga dengan demikian bisa meningkatkan produksi panen padi masyarakat. Burung hantu (*Tyto Alba*) menjadi burung yang sangat berguna bagi petani karena Burung Hantu merupakan musuh alami tikus. *Tyto Alba* merupakan predator alami bagi hama tikus di lahan pertanian. Selain ramah lingkungan rumah burung hantu juga murah secara ekonomis dibandingkan dengan racun tikus dan pestisida lain yang dijual dipasaran. Dengan penggunaan burung hantu juga telah ikut serta berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan.

Introduksi burung hantu bisa dilakukan dengan menempatkan sepasang atau beberapa pasang burung hantu dalam sarang buatan. Sarang buatan diperlukan karena burung hantu bukan tipe burung pembuat sarang. Biasanya burung hantu menempati sarang bekas burung lain. Setelah burung hantu tersebut tinggal di wilayah tersebut, maka biasanya mereka akan berkembang biak dan menjadi predator bagi tikus.

Cara berburu burung hantu ini pun cukup efektif dalam mengendalikan tikus dalam kewasannya. Hal ini karena *Tyto Alba* tidak akan berburu mangsanya di tempat lain apabila di sekitar sangkarnya masih cukup banyak dan mudah untuk mendapatkan tikus. Namun kawasan perburuan ini akan semakin meluas sejalan dengan semakin berkurangnya populasi tikus di kawasan perburuan sebelumnya. Dengan demikian populasi tikus pada kawasan tersebut akan terkontrol dengan baik oleh keberadaan populasi burung hantu dalam jangka panjang. Berdasarkan penelitian, seekor burung hantu mampu memakan tikus antara 6-8 ekor dalam semalam (Khairon Nisa, 2019). Jika burung hantu ada belasan ekor, maka ratusan ekor tikus dapat dibunuh dalam satu malam.

6.3 Model Pengentasan Kemiskinan

Seiring dengan semakin menajamnya stagnasi ekonomi akibat pandemic Covid-19 dan diperkuat oleh desakan inflasi dan dinamika global, telah melahirkan arus urbanisasi yang meningkat setiap tahun. Hal ini tentu melahirkan persoalan baru pada konteks pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa peluang kerja semakin susah dan rakyat miskin semakin meningkat, terutama di Provisis Aceh hingga Maret tahun 2021. Oleh karena itu untuk menyiapi hal tersebut diperlu satu model pengentasan kemiskinan yang berkesan untuk menekan angka kemiskinan. Dari hasil kajian penulis memdapati beberapa model penguatan modal sosial petani untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini antara lain sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yunus kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sebagai berikut:

Model penguatan modal sosial petani yang sesuai saat ini yaitu dengan dengan memanfaatkan lahan yang ada, memanfaatkan lahan pekarangan, membantu pengetahuan dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta memberikan bantuan hibah dalam bentuk program, hal ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yaitu ketahanan pangan keluarga. (Wawancara dengan Yunus, Kadis Pertanian dan Peternakan Aceh Tamiang, 30 Agustus 2020).

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa salah satu alternatif model penguatan modal sosial untuk pengentasan kemiskinan adalah dengan memanfaatkan sebaik mungkin pekarangan yang ada pada setiap rumah penduduk. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yaitu ketahanan

pangan keluarga. Halaman pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran, cabe dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sehingga dengan demikian dapat membantu ekonomi keluarga di tengah situasi yang sulit saat ini.

Sejakan dengan model penguatan modal sosial sebagaimana tersebut di atas informan lain dari Aceh Tengah menyebutkan pendapat yang hampir sama yaitu:

Model penguatan modal sosial di Kabupaten Aceh Tengah khususnya yang di lakukan oleh Dinas Pertanian Aceh Tengah seperti memberi bantuan modal, penguatan kapasitas penyuluh lapangan, mendorong petani untuk akses ke kredit KUR serta program pecah KK. Selain itu juga membantu premi asuransi bagi petani yang mau menanam padi.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa model penguatan modal sosial yang diterapkan oleh pemerintah Aceh Tengah untuk pengentasan kemiskinan yaitu dengan memberi bantuan modal, penguatan kapasitas penyuluh lapangan, mendorong petani untuk akses ke kredit KUR, membantu premi asuransi bagi petani yang mau menanam padi serta program pecah KK. Selain itu pemerintah Aceh Tengah juga memberikan bantuan dalam bentuk sarana prasarana sebagaimana disamapaikan dalam wawancara berikut:

Model pengentasan kemiskinan yang lain yaitu memberikan bantuan sarana maupun prasarana produksi sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Wilayah yang cocok dengan tanaman pinang dibantu sarana dan prasarana untuk usaha tani pinang, jika cocok dengan kemiri, durian dan lainnya akan

diberikan bantuan sarana untuk komoditi andalan tersebut.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa model penguatan modal sosial untuk pengentasan kemiskinan di Aceh Tengah yaitu dengan memberikan bantuan sarana maupun prasarana produksi sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Wilayah yang cocok dengan tanaman pinang dibantu sarana dan prasarana untuk usaha tani pinang, jika cocok dengan kemiri maka dibantu dengan sarana prasarana untuk pertanian kemiri, demikian juga yang menanam durian akan dibantu sarana prasarana yang sesuai untuk tanaman durian dan tanaman lainnya akan diberikan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan komoditi tersebut.

Sementara informan lain dari Pidie Jaya menuturan hal yang hampir sama dengan yang disampaikan oleh informan dari Aceh Tamiang dan Aceh Tengah. Beliau menuturkan bahwa:

Model penguatan kapasitas petani di Pidie Jaya yaitu pemberian bantuan sarana produksi pertanian, pelatihan-pelatihan oleh penyuluh pertanian, studi banding dan menginisiasi terbentunya kilang padi modern agar padi yang dihasilkan di Pidie Jaya di jual langsung keluar daerah seperti medan.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa model penguatan modal sosial untuk pengentasan petani di Pidie Jaya dilakukan dengan pemberian bantuan sarana produksi pertanian, pelatihan oleh penyuluh pertanian, studi banding dan menginisiasi

terbentuknya kilang padi modern. Kilang padi modern sangat cocok didirikan di Pidie Jaya mengingat daerah tersebut terkenal dengan salah satu daerah penghasil padi terbaik di Aceh. Dengan adanya kilang padi modern ini dapat menaikkan harga gabah petani sehingga petani sejahtera dapat diraih sesuai dengan harapan pemerintah.

Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Pertama, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin. Kedua, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Lasmawan dan Suryadi, 2012).

Dari ketiga pendekatan secara konseptual yang disebutkan di atas ketiganya telah diterapkan dalam pengentasan kemiskinan di Aceh yaitu pendekatan terarah, pendekatan kelompok dan pendekatan pendampingan. Secara skematik model penguatan modal sosial dan pengentasan kemiskinan yang diterapkan di Aceh dapat dilihat pada diagram berikut:



Diagram 6.1: Model Pengentasan Kemiskinan

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan (program pengentasan kemiskinan) yang dipilih harus dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Lasmawan dan Suryadi 2012).

Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan

akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusyanto R. 1996. *Dampak jaringan-jaringan sosial dalam organisasi: kasus PAM Jaya DKI Jakarta* (Tesis). Depok: Universitas Indonesia.
- Agus Setiadi, 2021. *Aceh Kembali Jadi Provinsi Termiskin di Sumatera*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5374577/aceh-kembali-jadi-provinsi-termiskin-di-sumatera>. Diakses 26 Februari 2021.
- Akbar dan Usman. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Aker, J. C. 2007. *Social networks and household welfare in Tanzania: Working together to get out of poverty*. Berkeley: University of California.
- Amalia, Ayu Diah, 2015 Modal Sosial dan Kemiskinan (*Social Capital and Poverty*), *Sosio Informa* Vol. 1, No. 03 (2015), hal. 310-323.
- Ancok, D. 2003. Modal sosial dan kualitas masyarakat. *Psikologika: jurnal pemikiran dan penelitian psikologi*, 8(15), 4-14.
- Anggita, T. 2013. Dukungan Modal Sosial Dalam Kolektivitas Usaha Tani Untuk Mendukung Kinerja Produksi Pertanian Studi Kasus: Kabupaten Karawang dan Subang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 24(3): 203-216.
- Asdak, 2002. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asra, A. 2012. *Tinjauan pustaka: Kemiskinan di dalam: Konsep dan ukuran kemiskinan alternatif*. Editor: Firdausy CM. Jakarta: LIPI.

- Astuti, Lifa Indri, Hermawan, Mochammad Rozikin, 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi Pada Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri) *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 11, PP.1886-1892
- Astuti, Siti Irene D, 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Baiyegunhi, L. J. S, 2014. Social capital effects on rural household poverty in Msinga, KwaZuluNatal, South Africa. *Agrekon* 53 (2): 47-64.
- Bourdieu, Pierre. 1986. The Forms of Capital, dalam J. Richardson, ed. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Budhi Cahyono. 2014. Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo, EKOBIS Vol.15, No.1, Januari 2014: 21 – 16
- Casson M, Godley A. 2000. *Cultural Factors in Economic Growth*. Germany. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg.
- Coleman, James S. 1990. *Foundation of Social Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Coleman, James S. 2009. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media
- Cox, Eva. 1995. *A Truly Civil Society*. Sydney. ABC Book.
- Cristoforou A. 2003. *Social Capital and Economic Growth: The Case of Greece*. London School of Economic: Paper for The 1st PhD Symposium on Social Science Research in Greece of The Hellenic Observatory. European Institute. asimina@aueb.gr.

- Darmawati, 2017. Tinjauan HAM Terhadap Pemberantasan Kemiskinan Demi Mencapai Tujuan Millenium Development Goals. *Jurnal Al-Himayah*. Vol.1, (2). PP 173-194.
- Dasgupta P, Serageldin I. 2002. *Social Capital: A Multi Faceted Perspective*. World Bank. Washington DC.
- Dji, 2017. *Kenapa Petani Indonesia Miskin. Ini Jawabannya*. <https://www.berdesa.com/kenapa-petani-indonesia-miskin-jawabannya/> diakses 5 September 2020
- Dudung, Abdul Adjid. 2001. *Membangun Pertanian Modern*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Sinar Tani.
- Easton, D. 1985. Political Science in the United States. *International Political Science Review*, 6, 133 - 152.
- Eko S. 2004. Modal sosial desentralisasi dan demokrasi lokal. *Analisis CSIS* 33 (3):299-326.
- Elizabeth, R. dan Iwan S.A. 2009. *Sistem Kelembagaan Komunitas Petani Sayuran di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali*. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/MKP_B6.pdf.
- Fadli, 2015. Modal Sosial dan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Agrium*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015. PP. 35-39.
- Firmnasyah, Abrian Duta, 2020. *Dampak Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dan Pengurangan Ketimpangan Di Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/dampak-pemberian-bantuan-sosial-terhadap-pengentasan-kemiskinan-dan-pengurangan-ketimpangan-di-indonesia/>. Dikases, 22 Desember 2020.

- Fukuyama F. 1995. *Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity*. The Free Press. New York.
- Fukuyama, Francis 1999. *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demorasi Liberal*. Yogyakarta: Penerbit Qalam
- Gatra. 2018. Genjot Ketahanan Pangan, Aceh Fokus Program Upsus Pajale, <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/321858-genjot-ketahanan-pangan-aceh-fokus-program-upsus-pajale>, Diakses 8 September 2018.
- Galli, Alessandro, Stuart H. M. Butchart, Matt Walpole, Ben Collen, Arco van Strien, Jörn P. W. Scharlemann, Rosamunde E. A. Almond, Jonathan E. M. Baillie, Bastian Bomhard, Claire Brown, John Bruno, Kent E. Carpenter, Geneviève M. Carr, Janice Chanson, Anna M. Chenery, Jorge Csirke, Nick C. Davidson, Frank Dentener, Matt Foster, , James N. Galloway, Piero Genovesi, Richard D. Gregory, Marc Hockings, Valerie Kapos, Jean-Francois Lamarque, Fiona Leverington, Jonathan Loh, Melodie A. McGeoch, Louise McRae, Anahit Minasyan, Monica Hernández Morcillo, Thomasina E. E. Oldfield, Daniel Pauly, Suhel Quader, Carmen Revenga, John R. Sauer, Benjamin Skolnik, Dian Spear, Damon Stanwell-Smith, Simon N. Stuart, Andy Symes, Megan Tierney, Tristan D. Tyrrell, Jean-Christophe Vié, Reg Watson, 2010. Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines. *Science* 328 (5982), pp. 1164-1168. DOI: 10.1126/science.1187512
- Glaeser EL, Laibson D, Sacerdote B. 2001. The economic approach to social capital. *Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper Number 1916*. Harvard University Cambridge. Massachusetts. <http://post.economics.harvard.edu/hier/2001/papers/2001ist.html>.

- Granovetter MS. 1973. The strength of weak ties. *American Journal of Sociol* 78:1360-80.
- Granovetter, M. 1992. Economic institutions as social constructions: a framework for analysis. *Acta sociologica*, 35(1), 3-11.
- Grootaert C, van Bastelaer T. 2002. *The Role of Social Capital in Development: An empirical assessment*. Cambridge University Press. Cambridge UK.
- Grootaert C. 1999. Social capital household welfare and poverty in Indonesia. *Policy Research Working Paper No. 2148*. The World Bank Social Development Washington DC, World Bank.
- Hadisapoetro. 1973. *Biaya dan Pendapatan dalam Usahatani*. Departemen Ekonomi Pertanian UGM. Yogyakarta.
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar ekonomi pertanian*. Penerbit Andi.
- Hasan, M., dan Azis, M. 2018. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal (PDF), edisi ke-2*. Makassar: CV. Nur Lina
- Hasbullah J. 2006. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. MR-United Press Jakarta. Jakarta.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa;
- Heliawaty, M.Saleh S. Ali, Darmawan Salman, Rahman Mappangaja, 2015. Social Capital and Economic Behavior of Farmers. *International Journal of Scientific & Technology Research* 4, (01); PP 86-91.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

- Hernanto, F. 1993. *Ilmu Usahatani*. Jakarta: Penebar Swadaya. 309 hal
- Huraerah, A, 2013. Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol 12. Nomor 1, Juni 2013, PP.3-13.
- Inayah. 2012. Peran Modal Sosial dalam Pembangunan. Ragam. *Jurnal Pengembangan Humaniora Politeknik Negeri Semarang*. Vol. 12 No.1. PP 201-220
- Iqbal, M. 2007. Analisis peran pemangku kepentingan dan implementasinya dalam pembangunan pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3), 89-99.
- Jones, V. N., & Woolcock, M. 2007. *Using mixed methods to assess social capital in low income countries: A practical guide* (No. 1207). GDI, The University of Manchester.
- Jordan, J. L., Anil, B., & Munasib, A. 2010. Community development and local social capital. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 42(1), 143-159.
- Kamarni, N, 2012, Analisis Modal Sosial Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan kewirusahaan*. Vol.3 Nomor 3, September 2012. PP. 36-52.
- Kaplale, L, 2012, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kota Ambon, *Jurnal Agribisnis Kepulauan*. Vol.1 Nomor 1, PP, 101-115.
- Kiely, R. 1995. Marxism, post-Marxism and development fetishism. *Capital & Class*, 19(1), 73-101.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Humaniora Utama Press. Bandung.

- Kumlin, S., & Rothstein, B. 2005. Making and breaking social capital: The impact of welfare-state institutions. *Comparative political studies*, 38(4), 339-365.
- Laba K. 2006. Dampak pemekaran kabupaten terhadap akumulasi stok modal sosial dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir: kasus wilayah pesisir Teluk Lewoleba Kabupaten Lembata NTT [Tesis]. Bogor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Lasamawan, Iwayan dan Suryadi, Made. 2012. Pengembangan Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai-Nilai *Nyamabraya* (Ajaran Tatwamasi) Pada Masyarakat Perkotaan Di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 1, No. 1, PP 55-67
- Lawang RMZ. 2004. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik suatu Pengantar*. FISIP UI PRESS. Jakarta.
- Lenggono PS. 2004. Modal sosial dalam pengelolaan tambak: studi kasus pada komunitas petambak di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara [tesis]. Bogor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Lesser LE. 2000. *Knowledge and Social Capital: Foundation and Application*. Butterworth Heinemann. United States of America.
- Lintas Nasional (2017) Petani Aceh Termiskin di Sumatera, <http://www.lintasnasional.com/2017/11/11/petani-aceh-termiskin-di-sumatera-faisal-ridha-pemerintah-harus-fokus/>, Diakses 12 September 2018.
- Loekman, Soetrisno. 1999. *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mardikanto, Totok, 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.467 Hal

- Mathijs, E. 2003. Social capital and farmers' willingness to adopt countryside stewardship schemes. *Outlook on agriculture*, 32(1), 13-16.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Iqbal, 2021. *Aceh Jadi Provinsi Termiskin, Pemprov Salahkan Pandemi Covid*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210217194322-4-224149/aceh-jadi-provinsi-termiskin-pemprov-salahkan-pandemi-covid>. Diakses 26 Februari 2021.
- Mukherjee, S. & Benson, T. 2003. Determinants of poverty in Malawi, 1998. *World Development*, 31(2), 339-58
- Mosher, A.T. 1987. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Syarat-Syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi*. CV Yasaguna
- Munasib, A., & Jordan, J. 2011. The Effect of Social Capital on the Choice to Use Sustainable Agricultural Practices. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 43(2), 213-227.
- Nahapiet, Janine & Ghoshal, Sumantra. 1998. Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. *The Academy of Management Review*. 23. 10.2307/259373
- Narayan D, Pritchett L.1999. *Cent and Sociability. Household Income and Social Capital in Rural Tanzania*. *Economic Development and Cultural Change* 47 (8): 871-986.
- Narayan D. 1999. *Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty*. Property Group, Prem World Bank July 1999.
- Nasution, A. 2016. Peranan Modal Sosial Dalam Pengurangan Kemiskinan Rumah Tangga di Perdesaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Volume 7. Nomor 2, Desember 2016. PP, 171-183.

- Okezone. 2018. Dana Otsus Rp56 Triliun Lebih, Kemiskinan di Aceh Justru Meningkat, <https://news.okezone.com/read/2018/07/17/340/1923627/dana-otsus-rp56-triliun-lebih-kemiskinan-di-aceh-justru-meningkat>, Diakses 13 September 2018.
- Olawuyi S.D, & Oladele. S.E. 2012. Social Capital and Rural Household Welfare in Surulere LGA of Oyo State Nigeria. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, Vol.3. 11.
- Omonona, B. T., Amao, J. O., & Bamimore, J. A. 2014. Social capital and farming household welfare in Oyo state, Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*, 5(9), 1.
- Ostrom, E. 2000. Collective action and the evolution of social norms. *Journal of economic perspectives*, 14(3), 137-158.
- Portes A. 1998. Social Capital. Its origins and application in modern sociology. *Annual Review of Sociology* 24.
- Portes, Alejandro, 1996, *The New Second Generation*, Russell Sage Foundation.
- Pretty J, Ward H. 2001. Social capital and the environment. *World Development* 29 (2): 209-227
- Purwito Zanuar Rahmadi dan Bambang Santoso. 2016. Modal Sosial Petani Sawah Berlahan Sempit Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga, *Jurnal Analisa Sosiologi April 2016*, 5(1): 62-73
- Putnam RD. 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton University Press. Princeton. New Jersey.
- Putnam RD. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life* dalam *The American Prospect*. Vol 13. PP 35-42
- Putnam RD. 1995. Bowling alone. America's declining social capital. *Journal of Democracy* 6 (1): 65-78.

- Putnam RD.2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Rauch, J. E., & Casella, A. (Eds.). 2001. *Networks and markets*. Russell Sage Foundation.
- Rizal, Reda. 2017. *Analisis Kualitas Lingkungan* (PDF). Jakarta: Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jakarta.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Robbins, S. P., Hilda, & Dewi Sartika. 2002. *Prinsip-prinsip perilaku organisasi* (Ed. 5.). Jakarta: Erlangga.
- Sabatini, F. 2009. Social capital as social networks: A new framework for measurement and an empirical analysis of its determinants and consequences. *The Journal of Socio-Economics*, 38(3), 429-442.
- Saifuddin dkk, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Korban Konflik Melalui Komoditi Sawit*. Lhokseumawe, Laporan Penelitian.
- Saifuddin dkk, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Pasca Konflik Aceh Melalui Komoditi Kelapa Sawit*. Banda Aceh: Bandar Publising.
- Sajogyo, & Sajogyo, Pudjiwati. 2002. *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan Jilid 2*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Salikin, 2003. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta, Kanisius
- Santoso, Budhi. 2014. Menuju Kemandirian Pangan 2015 – 2025, Edisi 01, Tahun xx, Mei 2014. <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/139104-Konten-Menuju%20Kemandirian%20Pangan.pdf>, Diakses 25 Agustus 2018.

- Sawitri, D. R. 2017. Education for sustainable development: how early is too early?. *Advanced Science Letters*, 23(3), 2559-2560.
- Shaoling Fu, Hua Liu, Kim Hua Tan, Yuanzhu Zhan, Yalan Ding and Wene Qi, 2018. How Social Capital Affects the Quality Performance of Agricultural Products: Evidence from a Binary Perspective of China. *Sustainability* 2018, 10, 3009; PP 1-15, doi:10.3390/su10093009w.
- Simarmata, R. 2009. Peran Modal Sosial dalam Memdorong Sektor Pendidikan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Samosir (Studi Pada SMK HKBP Pangururan).
- Siagian, S.P. 1991. Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi. C.V. Haji Masagung. Jakarta
- Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim, 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharto. Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan P. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Suradisastra, K. 2006. Revitalisasi kelembagaan untuk percepatan pembangunan sektor pertanian dalam otonomi daerah.
- Sudalmi, Endang Sri. 2010. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. *INNOFARM: Jurnal Inovasi Pertanian*. Vol.9, No. 2, PP 15 -28.
- Syahza, Rusydi. 2003. Modal sosial; Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1. PP. 1-22

- Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol 5 No. 1. 235-256
- Tenzin, G., Otsuka, K., & Natsuda, K. 2013. Impact of social capital on poverty: A case of rural households in Eastern Bhutan. *Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies (RCAPS), Working Paper Series RWP-13.004*.
- Tikson, D. T. 2005. *Keterbelakangan & ketergantungan: teori pembangunan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand*. Ininnawa.
- Trigilia, C. 2001. Social capital and local development. *European journal of social theory*, 4(4), 427-442.
- Todaro.M.P dan Smith.S.C, 2011, "Pembangunan Ekonomi", Edisi Sebelas. Jakarta, Erlangga.
- UNDP. 2006, *Human Development Report 2006*. New York: Palgrave Macmillan
- Uphoff N. 1999. *Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation, in Dugasputa and I. Seregaldin (eds). Social Capital: A Multifaced Perspective*, World Bank, Washington, DC.
- Vipriyanti NU. 2007. Analisis keterkaitan modal sosial dan pembangunan ekonomi wilayah: studi kasus di empat kabupaten di Bali [draf disertasi]. Bogor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Woodhouse, A. 2006. Social capital and economic development in regional Australia: A case study. *Journal of rural studies*, 22(1), 83-94.
- World Bank. 1998. *The Initiative on Defining Monitoring and Measuring Social Capital*. Overview and Program Description.

Social Development Family. Environmentally and Socially Sustainable Development Network.

- Wuysang, Rendy. 2014. Modal Sosial Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Suatu Studi Dalam Pengembangan Usaha Kelompok Tani Di Desa Tincep Kecamatan Sonder. *Journal "Acta Diurna"* Volume III. No.3. Pp 1-11
- Yunus, Saifuddin. 2014. *Sumber Daya Manusia Modal Pembangunan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang. Bayumedia.
- Zamzami, Daspriani Y. 2021. *Aceh Kembali Termiskin di Sumatera, Pengamat Sebut karena Salah Kelola Anggaran*. <https://regional.kompas.com/read/2021/02/17/15441631/aceh-kembali-termiskin-di-sumatera-pengamat-sebut-karena-salah-kelola>. Diakses 26 Februari 2021.
- Zuber, Ahmad, Selamat Yulius, Saheb (2013). Peranan Modal Sosial Bagi Petani Miskin Untuk Mempertahankan Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Di Pedesaan Ngawi (Studi Kasus Di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur), *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 2, Nomor 1 (2013), hal. 17 – 34.

INDEKS

A

A T Mosher · 89
Aceh Tamiang · 3, 8, 9, 40, 61, 62, 63, 124
Aceh Tengah · 3, 8, 9, 38, 61, 62, 63, 121, 124, 125
adopsi teknologi · 48
agricultural policy · 93
Agus Setiadi · 7, 128
Agusyanto · 35, 128
Ahmad Dadek · 8, 119
Akbar · 40, 128
Aker · 15, 128
Akselerasi pembangunan · 92
aksi kolektif · 4, 27, 63, 74, 75, 76
Aloysius Gunadi Brata · 17
alturisme · 105
amoral familism · 30
angka kemiskinan · 1, 7, 8, 15, 56
Asdak · 18, 128
asosiasi horizontal · 3
asosiasi lokal · 27, 29, 62, 63, 76
Asra · 15, 128
Astuti · 20, 44, 128

B

Baiyegunhi · 15, 129
Bambang Santoso · 6, 135
Bastelaer · 15, 131
biaya transaksi · 29, 32, 36, 98
Biklen · 40
Bogdan · 40

bonding · 2, 28, 98
Bonding · 98
bonding social capital · 28
Bourdieu · 42, 94, 95, 129
Bratakusumah · 82, 135
bridging · 2, 17, 28, 98
bridging social capital · 28
Brundtland · 22
Buckley · 16
budaya · 5, 20, 21, 42, 83, 91, 92, 104, 106, 117, 118
Budhi Cahyono · 5, 129

C

Casson dan Godley · 31
civic engagement · 31
Code of Conduct · 21
Cognitif Dimension of Social Capital · 99
Coleman · 24, 43, 99, 100, 129
collective action · 4
collective interest · 30
common value · 30
communitarian view · 28
community development · 5
conceptual capital · 95
Creswell · 38

D

Dasgupta dan Serageldin · 35
demografi politik · 83
dependent development · 84
destruktif · 33
Determinan · 27, 29, 30
Determinan modal sosial · 29, 30

dimensi kognitif · 27, 61, 63
Dimensi kognitif · 27, 63, 99
dimensi struktural · 27, 99
distal · 31
Distal · 31
Dudung · 19, 129

E

Easton · 82, 130
ekstensifikasi · 88
empowerment · 5
entitas sosial · 36, 115
Esterberg · 39
exclusive networks · 95

F

Fadli · 3, 130
Food and Agriculture Organization · 21
Fukuyama · 25, 94, 100, 110, 130

G

Getting Agriculture Moving · 87
Ginanjari Kartasmita · 82
Grootaert · 3, 15, 17, 27, 29, 97, 131
Gross Domestic Product · 9

H

Harrod Domar · 84
Hasbullah · 32, 36, 80, 106, 115, 131
Heliawaty · 48, 131
Herdiansyah · 39, 132

human capital · 30, 94

Huraerah · 5, 132

I

Indeks Kualitas Hidup · 85, 86

Indeks Pembangunan Manusia · 85, 86

informasi pasar · 5

intensifikasi · 88

interlinkage institution · 4

J

jaringan kerja · 5, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 63

jejaringan · 2

K

Kamarni · 4, 5, 132

Kaplale · 4, 132

Kemiskinan · 3, 6, 7, 63, 74, 75, 117, 128, 129, 132, 134, 136

kohesif · 79

kohesifitas · 105, 111

Kolektif · 75, 76

kolektifitas · 33

kolektivitas usaha · 98

Komunitas · 130

koneksi · 29, 109

Koperasi · 5

Kozel dan Parker · 17

L

Lawang · 24, 31, 36, 37, 62, 133

Lenggono · 33, 34, 133

level makro · 27
level meso · 27
level mikro · 27
Linking · 98
local institution endowment · 106
Loekman · 18, 133
logika-situasional · 35

M

Meso · 29
Michael Woolcock · 17
Mikro · 17, 29, 113
Miles · 40
mixed methods · 38, 132
modal ekonomi · 6, 42
Modal Soal Petani · 79
Model Pengentasan Kemiskinan · 127, 133
Moleong · 39, 133
Muhammad Iqbal · 8, 133
Mukherjee & Benson · 15
mutual benefit · 111
Muzakkir · 56

N

Narayan · 17, 25, 28, 29, 98, 134
Nasrun Liwanza · 79, 113, 114, 115
nation building · 82
Network · 29, 33, 138
networks view · 28
Nilai Tukar Petani · 1
norma · 6, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 60, 63, 87, 94, 95,
100, 105, 107, 115
Norma · 26, 29, 36, 37, 100, 107, 115

O

Organisasi Kemasyarakatan · 43

Otonomi · 1, 131

otonomi khusus · 1, 7

P

Paradigma pembangunan · 90

partisipasi · 5, 17, 31, 32, 44, 57, 72, 76, 79, 92, 102, 105, 117, 118

Pathan · 17

patron-client · 30

pedesaan · 1, 21, 81, 85, 88, 90, 91, 95, 97, 104, 105, 106

Pembangunan berkelanjutan · 18, 101, 102, 103

pengentasan kemiskinan · 2, 3, 4, 5, 23, 26, 119, 125, 126, 127

Pengentasan Kemiskinan · 117, 123, 130, 132

pertumbuhan ekonomi · 3, 8, 9, 16, 23, 27, 36, 84, 85, 87, 133

Pidie Jaya · 3, 8, 9, 38, 40, 55, 61, 62, 63, 80, 81, 115, 116, 122,
126

pola inter-relasi · 5

political will · 105

pro-poor · 118

propoor growth · 15

proximal · 30

Purwito Zanuvar · 6, 135

Putnam · 16, 25, 30, 95, 98, 100, 105, 135

R

Rahmadi · 6, 135

rasa percaya · 29, 31, 32, 61

Reduksi · 40

regional social sustainability · 96, 104

Relational Dimension of Social Capital · 99

religious beliefs · 79

rent-seeking · 29
repeated social experiences · 79
resiprokal · 37
resiprositas · 29, 31, 32
Responsible Fisheries · 21
Riyadi · 82, 135

S

Saifuddin · 4, 56, 136, 138
Saifuddin Yunus · 56
Schiff · 94
sektor pertanian · 1, 86, 90, 91, 92, 93, 97, 104, 137
Share Value · 36
Siagian · 82, 83, 136
social capital · 25, 131, 132, 135, 137
society) · 83
sosial capital · 5
stabilitas ekonomi · 15
stagnasi ekonomi · 17, 123
state · 83, 132, 134
Stiglitz · 16
strong intra community ties · 28
strong ties · 36
Struktur sosial · 34, 35
Sugiyono · 39, 40, 136
Suparlan · 33, 136
Suradisastra · 91, 93, 137
Susan Stainback · 38
Syahyuti · 92, 106, 137
synergy view · 28
system of communication chanel · 35

T

Tanzania · 17, 128, 134
teknologi pertanian · 1, 69, 78, 96, 104
Tenzin · 15, 137
Teori Dependensi · 84
The Forms of Capital · 42, 129
Tikson · 83, 84, 85, 137
tindakan kolektif · 32, 105
Trust · 31, 130

U

under-development · 84
UNDP · 23, 86, 137
Uphoff · 27, 99, 137
Usman · 40, 128

V

Viprianti · 31
Vipriyanti · 28, 29, 32, 137

W

weak extra community network · 28
weak ties · 36, 131
Williamson · 32
Wilson · 17
World Bank · 16, 118, 129, 131, 134, 137, 138
World Commission on Environment and Development · 22
world system theory · 84

Y

Yustika · 94, 95, 138

MODAL SOSIAL,

KEMISKINAN

DAN **PEMBANGUNAN**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Modal sosial diyakini oleh banyak pakar berkontribusi positif terhadap keberhasilan pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Modal sosial dapat dimanfaatkan sebagai energi untuk mengatasi kemiskinan, diantaranya melalui peningkatan dan pemanfaatan jaringan. Modal sosial bonding dan bridging komunitas petani dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Modal sosial merupakan perkara yang urgen dalam setiap pembangunan, di samping modal finansial dan sumber daya alam. Pembangunan pertanian juga diperlukan upaya penguatan modal sosial petani untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Upaya pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial yang terintegrasi dengan baik dan tepat sasaran telah terbukti mampu mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah Aceh sudah menyediakan bantuan stimulus lewat bantuan khusus keuangan kepada kabupaten/kota untuk peningkatan sarana kesehatan, Gerakan Aceh Aman Pangan (Gampang), dampak ekonomi, dan pengawasan perbatasan. Sebanyak 40% dari dana program tersebut digunakan untuk Gerakan Aceh Mandiri Pangan dan dampak ekonomi, Program tersebut dikelola oleh kabupaten/kota dengan bimbingan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Provinsi. Model penguatan modal sosial yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten untuk pengentasan kemiskinan antara lain dengan memberi bantuan modal, penguatan kapasitas penyuluh lapangan, mendorong petani untuk akses ke kredit Usaha Rakyat, membantu premi asuransi bagi petani yang mau menanam padi serta program pecah Kartu Keluarga, bantuan sarana produksi pertanian, pelatihan oleh penyuluh pertanian, studi banding, menginisiasi terbentunya kilang padi modern serta memanfaatkan sebaik mungkin pekarangan yang ada pada setiap rumah penduduk. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yaitu ketahanan pangan keluarga.



SEFA BUMI PERSADA
Jl. Malikussaleh No. 3
www.sefabumipersada.com
Telp. 085260363550

ISBN 978-623-6983-34-8

